



ISSN 2355 - 2700 E-ISSN 2550 - 0139

MONETER

Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Volume 6, Nomor 2, Oktober 2019

MONETER



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Alamat : Jl. Dewi Sartika No.289, Cawang - Jakarta Timur

Telepon : 021 736515 / Fax. 021 7365704

URL : <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>



9 772550 013007



Diterbitkan Oleh :

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Event Organizer Dengan Aplikasi Accurate Versi 5 (Studi Kasus: PT. Inti Nuansa Ciptavisi)

Mari Rahmawati¹, Annissa Martriani²

Strategi Satuan Pengawas Internal untuk Meminimalisasi Temuan (Studi kasus pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri A)

Helti Nur Aisyiah

Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KKP Pratama Sukabumi)

Dicki Prayudi

Lemahnya Pengendalian Internal Berdampak Terjadinya Mark Up Biaya Pengawasan di Perusahaan PT Alrsy

Andi Martias

Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus?

Arif Farida

Analisis Kinerja Keuangan Industri Gas Yang Terdaftar di BEJ (Studi Kasus PT. Aneka Gas Industri Tbk)

Dian Indah Sari¹, Slamet Maryoso²

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta

Dedi Suharyadi¹, Rini Martiwi², Eulin Karlina³

Evaluasi Penerapan Tata Kelola Bank Pada PT BPR Eka Bumi Artha

Wangsit Supeno¹, Vina Islami²

Pengaruh Tingkat Persediaan Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada PT Sepatu Bata, Tbk

Popon Rabia Adawia¹, Ayu Azizah²

Analisis Jumlah Wajib Pajak Pph OP Yang Tidak Menyampaikan SPT Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Dede Suleman

Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 – 2016

Novira Sartika¹, Adrian Irnanda Pratama²

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	iii
PENGANTAR REDAKSI	iv
 Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Event Organizer Dengan Aplikasi Accurate Versi 5 (Studi Kasus: PT. Inti Nuansa Ciptavisir Mari Rahmawati ¹ , Annissa Martriani ²	97-106
 Strategi Satuan Pengawas Internal untuk Meminimalisasi Temuan (Studi kasus pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri A) Helti Nur Aisyiah	107-112
 Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KKP Pratama Sukabumi) Dicki Prayudi	113-120
 Lemahnya Pengendalian Internal Berdampak Terjadinya Mark Up Biaya Pengawalan di Perusahaan PT Alrsy Andi Martias	121-134
 Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? Arif Farida.....	135-140
 Analisis Kinerja Keuangan Industri Gas Yang Terdaftar di BEJ (Studi Kasus PT. Aneka Gas Industri Tbk) Dian Indah Sari ¹ , Slamet Maryoso ²	141-148
 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta Dedi Suharyadi ¹ , Rini Martiwi ² , Eulin Karlina ³	149-156
 Evaluasi Penerapan Tata Kelola Bank Pada PT BPR Eka Bumi Artha Wangsit Supeno ¹ , Vina Islami ²	157-166
 Pengaruh Tingkat Persediaan Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada PT Sepatu Bata, Tbk Popon Rabia Adawia ¹ . Ayu Azizah ²	167-172
 Analisis Jumlah Wajib Pajak Pph OP Yang Tidak Menyampaikan SPT Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Dede Suleman	173-178
 Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 – 2016 Novira Sartika ¹ , Adrian Irnanda Pratama ²	179-188

MONETER

Editorial Team

Chief Editor

Kartika Yuliantari, S.E., M.E. Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, UBSI

Editor

Agus Junaidi, Sistem Informasi
Akuntansi UBSI

Reviewers

Dr. Faroman Syarief, S.E., M.M.,
Unbhara

Dra. Rini Wijayaningsih, M.M.,
Unbhara

Dr. Ir. Raden Achmad Harianto, M.M.,
Unbhara

Eka Dyah Setyaningsih, S.E., M.M.,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBSI

Dwiyatmoko Puji Widodo, S.E., M.M.,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBSI

Sabil, S.E., M.M., Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, UBSI

Hartanti, S.E., M.M., Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, UBSI

Advisory Boards

Ida Zuniarti, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, UBSI

Administrative Staff

Maya Sopa, LPPM UBSI

Published by
LPPM UBSI

Jl. Dewi Sartika No. 289, Cawang,

Jakarta Timur

Telp : 021-8010836



<http://www.bsi.ac.id>

e-mail: jurnal.moneter@bsi.ac.id

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter>

p-ISSN: 2355-2700 | e-ISSN: 2550-0139

Indexed by

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrohmanirrohim

Redaksi mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas terbitnya Jurnal Moneter Edisi Volume VI No. 2 bulan Oktober 2019 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Jurnal Moneter yang telah terindex oleh Google Scholar, dalam edisi ini menerbitkan 11 artikel naskah yang berasal dari dosen atau peneliti. Artikel telah melalui proses review oleh reviewer yang mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing.

Redaksi menerima naskah berupa artikel, hasil penelitian atau karya ilmiah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya pada media-media lainnya melalui laman <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter>

Akhirnya, Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan peneliti yang telah berpartisipasi dalam penerbitan Jurnal Moneter edisi ini. Semoga Jurnal Moneter kali ini dapat memenuhi khasanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika serta masyarakat pada umumnya.

Wassalam,

Redaksi

Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Event Organizer Dengan Aplikasi Accurate Versi 5 (Studi Kasus: PT. Inti Nuansa Ciptavisi)

Mari Rahmawati¹, Annisa Martriani²

¹Program Studi Sistem Informasi Akuntansi

Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Kamal Raya No.18, Rigroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat

e-mail: mari.mrw@bsi.ac.id

²Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Kamal Raya No.18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat

e-mail: myanissa15@gmail.com

(Rahmawati & Martriani, 2019)

Rahmawati, M., & Martriani, A. (2019). Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Event Organizer Dengan Aplikasi Accurate Versi 5 (Studi Kasus: PT. Inti Nuansa Ciptavisi). *Moneter*, 6(2), 1–10.

Abstract - *The development of science and technology is now able to influence human life, especially for companies. To get a better and optimal work result, companies use this technology by developing an existing system that is to make manual system changes into a modern system. PT. Inti Nuansa Ciptavisi (INC Production) is a service company engaged in the event organizer. In making financial reports still use manual methods that require accuracy and a very long time, so the transactions carried out often get problems or errors that cause transactions not on time or late. Accurate version 5 is an accounting application that provides the best solution to solve existing problems, this application can help the process of accounting work to be faster and more precise.*

Keywords: *Accounting Information System, Financial Report, Accurate version 5*

PENDAHULUAN

Akuntansi memerlukan *database* yang *confidential* karena seluruh transaksi yang ada rata-rata berkaitan dengan keuangan sebuah perusahaan atau badan perseorangan. Pengelolaan akuntansi secara manual memiliki lebih banyak resiko dibandingkan dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Misal, dalam hal yang paling sederhana yaitu penginputan jurnal, seringkali terjadi penggantian, atau dua kali *input* dengan nomor atau kode *voucher* yang sama dengan transaksi yang berbeda.

Hal ini dapat berakibat pada tidak *balance*-nya buku besar dan laporan keuangan yang dibuat. Kemungkinan lain adalah sudah membayar hutang ke *vendor*, tetapi karena pencatatanya masih manual, suatu saat datang surat tagihan pembayaran dari *vendor* yang menyatakan belum membayar atas sejumlah tagihan, dan tidak dapat mencarinya dengan cepat, informasi waktu pembayaran, dengan apa harus dibayar, misal dengan giro atau cek, nomor berapa gironya, dan informasi lainnya.

Atas dasar contoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bidang akuntansi pun sangat membutuhkan sistem terkomputerisasi. Didukung dengan pengetahuan ilmu teknologi, maka bidang akuntansi dan teknologi informasi dapat menciptakan berbagai

macam *software* aplikasi akuntansi salah satunya adalah *Accurate Versi 5 Accounting*.

Sebuah organisasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual jasa kepada para pelangganya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit. (Hery, 2012)

Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan (*users*), terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. (Hery, 2012)

METODOLOGI PENELITIAN

1. Akuntansi

Menurut *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) dalam (Harahap S. , 2015), Akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants*:

(AICPA) dalam (Hery, 2017), “Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklarifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya”.

2. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut (Andi, 2017) menyatakan, “Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan”.

SIA terdiri dari enam komponen, yaitu:



Sumber : (Andi, 2017)

Gambar 1. Peraga Sistem Informasi Akuntansi

3. Tool Aplikasi (Accurate Versi 5)

Tool aplikasi yang digunakan adalah program akuntansi *Accurate 5*.

Accurate dalam jurnal (Setiawan, 2015) “adalah sebuah aplikasi akuntansi yang dikembangkan oleh PT. Cipta Piranti Sejahtera (*CPSSOFT*), yang berpusat di Jakarta. Pertama kali diluncurkan pada November 1999, dengan versi 1.0, aplikasi ini terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan aman serta peraturan IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Genap 16 tahun sejak pertama kali peluncurannya, *Accurate* telah mencapai versi 4.0. Aplikasi *Accurate* sendiri dibagi menjadi 3 varian yakni *Standart*, *Deluxe*, dan *Enterprise Version* yang perbedaan utamanya terletak pada modul yang tersedia”

Menurut Sulistiawan dalam jurnal (Rahmawati, 2015) “Program *Accurate* digunakan karena sangat ekonomis dan berdayaguna jika diaplikasikan dalam suatu badan usaha, dan jauh lebih ekonomis jika dibandingkan dengan *software* akuntansi *tailor made*, dan lebih berdayaguna lagi jika dibandingkan *software* akuntansi *impor*, dengan tersedianya menu berbahasa Indonesia, *Accurate* sangat cocok untuk perusahaan di Indonesia”.

Beberapa keunggulan *Accurate* versi 5:

- Menggunakan tipe *database clien/server*.
- Multi *User* dengan tingkat kewenangan yaitu *Create*, *Edit*, dan *Report*.
- ACCURATE* sudah terbukti handal dan sesuai untuk perusahaan di Indonesia, dikembangkan sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan Indonesia).

- User* yang menggunakan sistem.
- Prosedur dan intruksi** yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
- Data** mengenai organisasi dan aktifitas bisnisnya.
- Software** yang digunakan untuk memproses data.
- Infrastruktur teknologi informasi**, yang terdiri dari komputer, *peripheral device*, dan perangkat jaringan.
- Pengendalian internal** untuk menjaga keamanan data SIA.

- READY TO USE Install* dan langsung dapat diaplikasikan, *Form* dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, seperti *purchase order*, *invoice*, *delivery order*. dan lain sebagainya.
- Kemudahan modifikasi bentuk laporan.
- Perhitungan pajak yang telah disesuaikan dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
- Fasilitas *Job Costing* yaitu mengelompokan barang dalam satu kelompok barang baru dengan proses penggabungan dan nilai *cost*/biaya yang baru.
- Multi Curency* dengan menghitung realisasi & keuntungan / kerugian yang belum direalisasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Perusahaan

PT. Inti Nuansa Ciptavisi didirikan pada tahun 2006, resmi terdaftar pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah tercatat pada Nomor: 1233/24.1.0/21.74.00.0000/1.824.271/2015, PT. Inti Nuansa Ciptavisi (INC) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa *event organizer* dan *artist management*.

VISI:

- Menjadikan perusahaan yang unggul dan memiliki keunikan dalam kualitas, kreatif, daam penyajian.
- Menjadikan pilihan yang utama dari para mitra atau klien karna INC mampu menonjolkan keunikan klien.
- Memperhatikan keseimbangan faktor bisnis dan tanggungjawab sosial atas karya-karya nya.

MISI:

- Mengembangkan ide-ide *out of the box* dalam jasa yang diberikan.
- Menciptakan nilai tambah.
- Pelanggan yang ideal.

4. Tim ideal

2. Tinjauan Kasus

- a. Penginputan jurnal sering terjadi penggandaan atau dua kali input dengan nomor atau kode *voucher* yang sama dengan transaksi yang berbeda. Hal ini dapat berakibat pada tidak *balance*-nya buku besar dan laporan keuangan yang dibuat.
- b. Pencatatan hutang piutang *vendor customer*. Kita sudah membayar hutang ke *vendor*, akan tetapi karena pencatatannya masih manual, suatu saat datang surat tagihan pembayaran dari *vendor* yang menyatakan belum membayar atas sejumlah tagihan, dan tidak dapat mencarinya dengan cepat.
- c. Informasi waktu pembayaran, dengan apa pembayarannya, misal dengan giro atau cek, nomor berapa gironya, dan informasi lainnya.

3. Pemecahan Masalah dengan Aplikasi *Accurate* Versi 5.:

A. *Setup* Awal

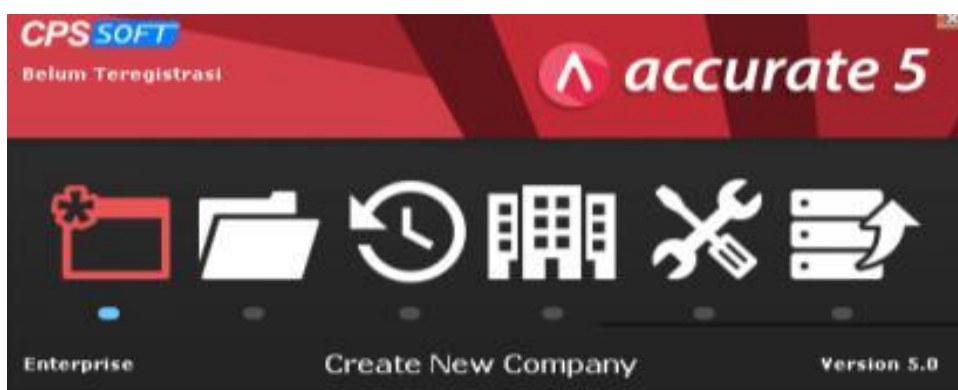
1. Membuat *Database* Perusahaan

Database baru dapat dibuat dengan dua cara yaitu dibuat di *Local* (di dalam *hard disk PC* sendiri) atau diletakkan di dalam *PC* orang lain atau *server* (*Remote*).

- a. Membuat *Database* Baru di Komputer Lokal
Sebelum membuat *database* di komputer lokal, pastikan *Firebird* dan program *ACCURATE* di komputer terinstal dengan baik.

Berikut Langkah-langkahnya :

- 1) Buka program *ACCURATE* dengan klik tombol *Start Programs/All Program-CPSSoft- ACCURATE V5*.
- 2) Atau klik icon *ACCURATE* yang terdapat pada *desktop* computer.
- 3) Pada tampilan *Welcome To ACCURATE*, klik tombol *Create New Company*.



Gambar 2. *Form* untuk membuat *Database* Lokal

- 4) Setelah anda mengklik tombol *Create New Company* yang terdapat pada tampilan *Welcome ACCURATE*, langkah selanjutnya yang dapat anda lakukan adalah meng-klik *check box Lokal* yang terdapat pada *form Create Database*. Langkah selanjutnya klik tombol *Ellipsis*

[...], lalu pilih folder tempat data akan diletakkan, kemudian ketikkan nama *file* dengan *ekstensi *.GDB*, lalu klik tombol *Create* dan *OK*. Tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan *database* selesai dilakukan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:



Gambar 3. Membuat *Database* Lokal

- 5) Setelah proses pembuatan database *ACCURATE* selesai dilakukan, langkah selanjutnya Anda dapat Login untuk masuk ke dalam *Database* tersebut *USER ID* dan *Password = SUPERVISOR* (*Password* tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar).
- Membuat *Database* Baru di Komputer Lain (*Remote*).
 - Jika Anda menjalankan *ACCURATE* dari komputer A dan ingin membuat *database* baru di komputer B (sebagai komputer *server*), Anda harus tahu beberapa nomor *IP Address* atau nama komputer (*Computer Name*) dari komputer B sebagai komputer *server*. Sebelum membuat *database* secara *remote* pastikan komputer *client* (komputer A) dan komputer *server* (komputer B) telah terhubung (terkoneksi) dengan baik. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat *Database* secara *remote*:
 - Buka program *ACCURATE* dengan cara Klik tombol *start – program/all program – CPSSoft – ACCURATE 5*.
 - Atau Klik *icon ACCURATE* yang terdapat pada *desktop* komputer anda.
 - Pada tampilan *welcome to ACCURATE, Create New Company*.
 - Setelah Anda mengklik tombol *Create New Company* yang terdapat pada tampilan *Welcome To ACCURATE*, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengklik *check box Remote* yang terdapat pada *form Create Database*, langkah selanjutnya isi:
- 6)



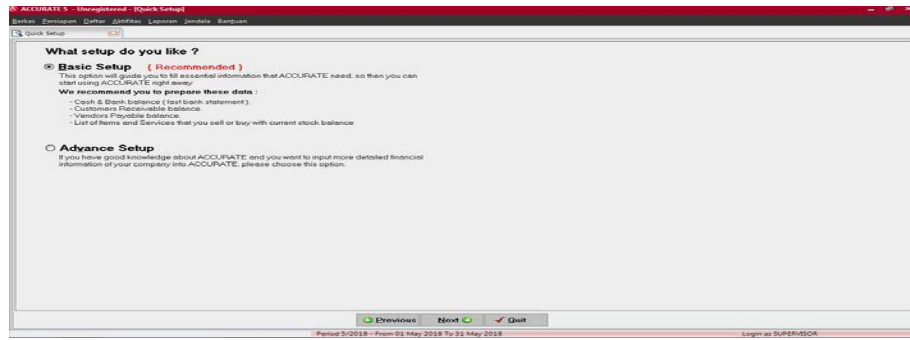
Gambar 4. Form Membuat *Database Remote*

- 7) Setelah proses pembuatan *database ACCURATE* selesai dilakukan, langkah selanjutnya Anda dapat Login untuk masuk ke dalam *Database* tersebut dengan *USER ID* dan *Password = SUPERVISOR* (*Password* tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar).
- Berikut data-data yang perlu disiapkan sebelum memulai transaksi:**
- Saldo Kas dan Bank
 - Buku Piutang
 - Buku Hutang
 - Daftar Barang/Jasa, dan Stok akhir jika ada
- Tahap Sebelum Transaksi:**
- Memilih bahasa yang akan digunakan



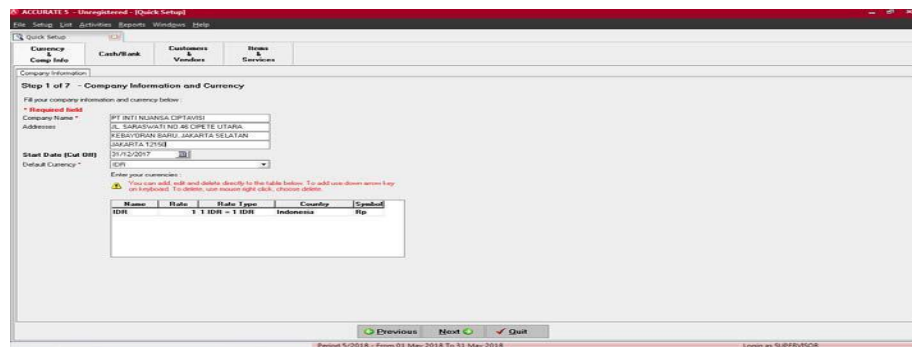
Gambar 5. Form *Setup Bahasa*

2) Memilih metode persiapan



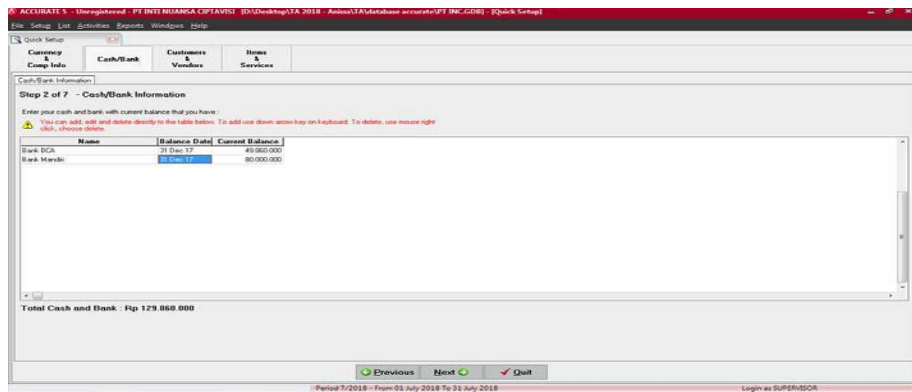
Gambar 6. Form Tipe Persiapan Standar Akuntansi

3) Memasukan data perusahaan dan memilih mata uang yang dipakai



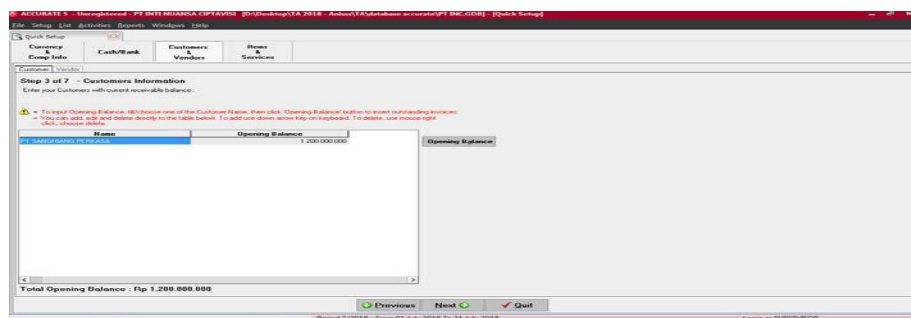
Gambar 7. Form Data Perusahaan

4) Memasukan saldo awal Kas/Bank



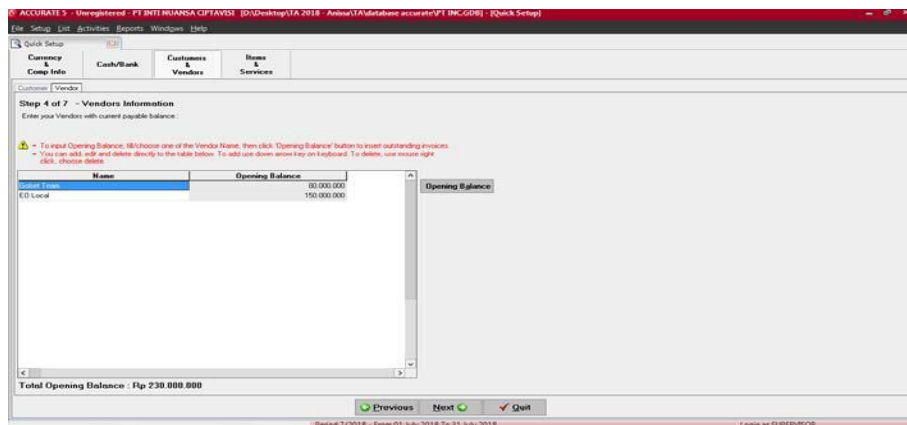
Gambar 8. Form Setup Saldo Awal Kas/Bank

5) Memasukan saldo awal Piutang (Customer)



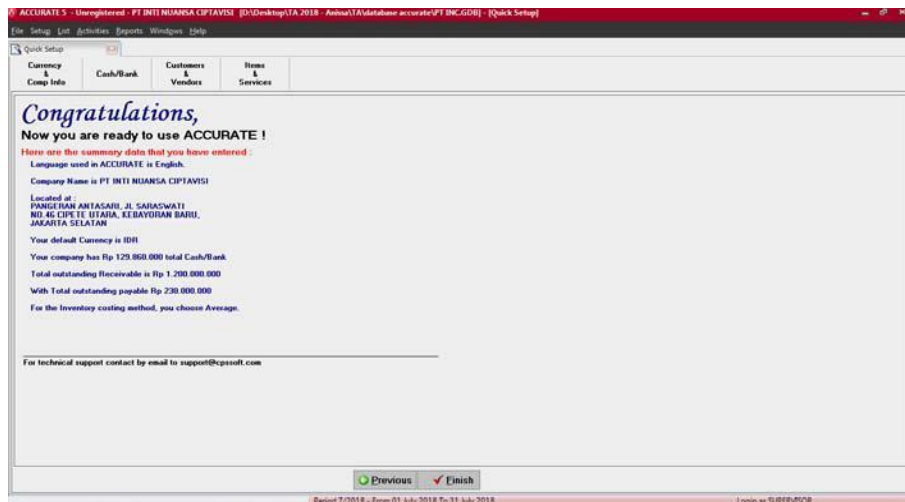
Gambar 9. Form Setup Saldo Awal Piutang

6) Memasukan saldo awal Hutang (Vendor)



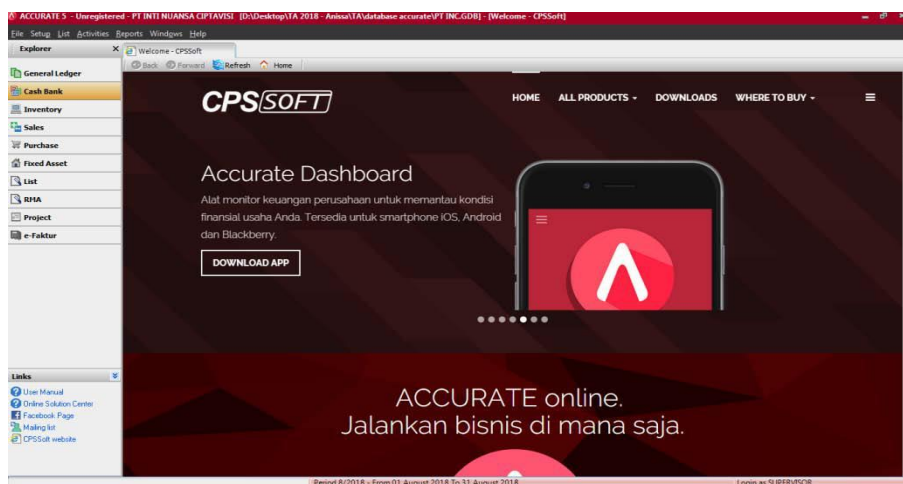
Gambar 10. Form Setup Saldo Awal Hutang

7) Pemberitahuan bahwa persiapan sudah selesai



Gambar 11. Form Pemberitahuan

8) Tampilan menu utama pada ACCURATE Versi 5



Gambar 12. Tampilan Menu

B. Laporan

Berikut beberapa laporan yang disajikan *Accurate* versi 5.

1. Laporan Laba/Rugi

inc.		PT INTI NUANSA CIPTAVISI	
		Profit & Loss (Standard)	
		From 01 Jan 2018 to 31 Jan 2018	
Description	◇	1-31 Jan 2018	◇
OPERATING REVENUE			
Pendapatan		1.144.638.750,00	
Pendapatan Event		1.144.638.750,00	
Total OPERATING REVENUE		1.144.638.750,00	
Cost of Goods Sold			
Beban Langsung Penjualan		840.655.000,00	
Total Cost of Goods Sold		840.655.000,00	
GROSS PROFIT		303.983.750,00	
Operating Expenses			
BIAYA OPERASIONAL, UMUM, & ADMINISTRASI		77.106.667,00	
Biaya Operasional		11.250.000,00	
Biaya Pemasaran		450.000,00	
Biaya Tenaga Ahli		10.800.000,00	
Gaji & Tunjangan Karyawan		44.000.000,00	
Biaya Gaji, Lembur & THR		44.000.000,00	
Biaya Umum & Administrasi		21.856.667,00	
Biaya Listrik		800.000,00	
Biaya Telekomunikasi		150.000,00	
Biaya Internet		500.000,00	
Biaya ATK		250.000,00	
Biaya Transportasi		330.000,00	
Biaya Perbaikan & Perawatan		1.110.000,00	
Biaya Rumah Tangga Kantor		1.250.000,00	
Biaya Restribusi & Sumbangan		200.000,00	
Biaya Sewa		15.000.000,00	
Biaya Penyusutan Kendaraan		1.666.667,00	
Biaya Penyusutan Peralatan		600.000,00	
Total Operating Expenses		77.106.667,00	
INCOME FROM OPERATION		226.877.083,00	
Other Income and Expenses			
Other Income			
Total Other Income		0,00	
Other Expenses			
Total Other Expenses		0,00	
Total Other Income and Expenses		0,00	
NET PROFIT/LOSS (Before Tax)		226.877.083,00	
NET PROFIT/LOSS (After Tax)		226.877.083,00	

ACCRATE Accounting System Report

Gambar 13. Laporan Laba/Rugi

2. Laporan Perubahan Modal

inc.		PT INTI NUANSA CIPTAVISI	
		Statement of Owner's Equity Changes	
		From 01 Jan 2018 to 31 Jan 2018	
Description	◇	Balance	◇
Owner's equity at beginning period			1.597.460.000,00
Net Income		226.877.083,00	
Investment on period		0,00	
Less Withdrawals		0,00	
Increase in Owner's Equity		226.877.083,00	
Owner's equity at end of period			1.824.337.083,00

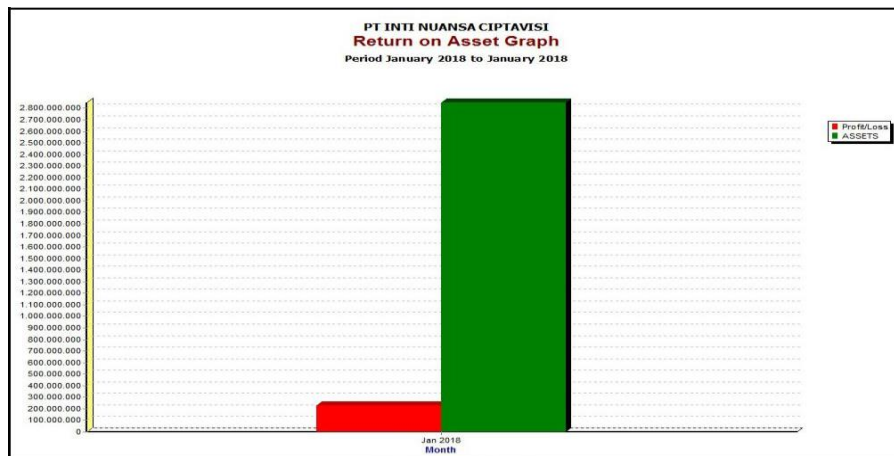
Gambar 14. Laporan Perubahan Modal

3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

PT INTI NUANSA CIPTAVISI Balance Sheet (Parent Scontro) As of 31 Jan 2018			
Description	Balance	Description	Balance
ASSETS		LIABILITIES and EQUITIES	
CURRENT ASSETS		LIABILITIES	
Cash and Bank		Current Liabilities	
Kas & Bank	926.981.000,00	Account Payables	
Total Cash and Bank	926.981.000,00	Hutang Lancar	575.255.000,00
Account Receivable		Total Account Payables	575.255.000,00
Piutang	1.259.102.625,00	Other Current Liabilities	
Total Account Receivable	1.259.102.625,00	Hutang Pajak	114.679.875,00
Inventory		Hutang Biaya	333.800.000,00
Total Inventory	0,00	Total Other Current Liabilities	448.479.875,00
Other Current Assets		Total Current Liabilities	1.023.734.875,00
Biaya dibayar dimuka	105.000.000,00	Long Term Liabilities	
Uang Muka Event	290.655.000,00	Total Long Term Liabilities	0,00
Total Other Current Assets	395.655.000,00	Total LIABILITIES	1.023.734.875,00
Total CURRENT A SSETS	2.581.738.625,00	EQUITIES	
FIXED A SSETS		OPENING BALANCE EQUITY	1.597.460.000,00
Historical Value		Current Earning of The Year	226.877.083,00
Aktiva Tetap	276.000.000,00	Total EQUITIES	1.824.337.083,00
Total Historical Value	276.000.000,00	Total LIABILITIES and EQUITIES	2.848.071.958,00
Accumulated Depreciation			
Akumulasi Depresiasi Fixed Asset	-9.666.667,00		
Total Accumulated Depreciation	-9.666.667,00		
Total FIXED A SSETS	266.333.333,00		
OTHER A SSETS			
Total OTHER ASSETS	0,00		
Total ASSETS	2.848.071.958,00		

Gambar 15. Laporan Neraca

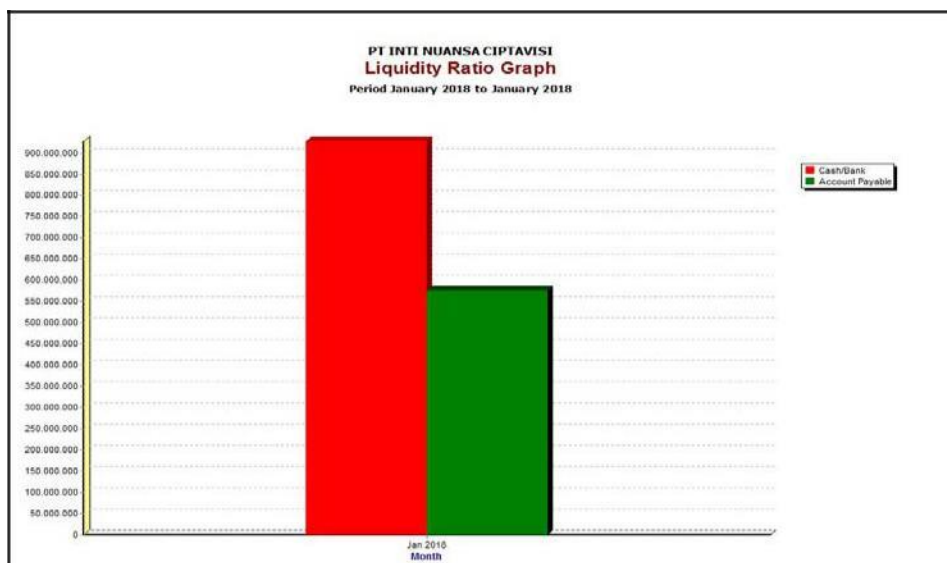
C. Analisis Laporan Keuangan



Gambar 16. Rasio Penjualan Bersih Terhadap Aktiva

Rasio Penjualan Bersih Terhadap Aktiva ini adalah untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Berdasarkan rasio ini, PT Inti Nuansa Ciptavisi sangat baik

dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Dengan rata-rata industri yang akan memberikan dasar yang baik untuk interpretasi kinerja keuangan.



Gambar 17. Rasio Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah suatu indikator untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang (kewajiban) jangka pendek. Berdasarkan rasio ini *cash ratio* PT. Inti Nuansa Ciptavisi sebesar 17% yang diperoleh dari perbandingan kas (bank) sebesar Rp. 926.891.000 dengan hutang lancar sebesar Rp. 534.679.875. Hal ini berarti setiap Rp. 1 hutang lancar dapat dijamin oleh *cash asset* sebesar Rp. 1,73.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari Sistem Informasi Akuntansi dengan penggunaan Aplikasi *Accurate* dapat:

1. Menjadi alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Mengkapi penentuan beban penyusutan dengan beragam metode, serta pembuatan jurnal penyusutannya dilakukan otomatis saat tutup buku bulanan.
3. Meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan akibat *human eror*.
4. Dalam hal pencarian data-data keuangan menjadi lebih mudah dan cepat karena dilengkapi dengan pengisian periode tanggal, bulan dan tahun data yang dicari.

Saran yang diperoleh dari Sistem Informasi Akuntansi dengan penggunaan Aplikasi *Accurate* ini adalah:

1. Diperlukan ketelitian dan kedisiplinan dari pemakai, terutama dalam hal *penginputan* data, hendaknya sesuai dengan ketentuan yang benar, sehingga secara otomatis keluaran yang dihasilkan akan akurat.

2. Sebaiknya menggunakan *software* akuntansi yang mudah digunakan, *Accurate* dapat digunakan meskipun tidak memahami teori akuntansi, namun akan lebih baik jika mempelajari prinsip-prinsip dasarnya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan para karyawan tentang pengolahan data akuntansi.
3. Sebaiknya diadakan pelatihan kepada karyawan mengenai cara penggunaan *software* akuntansi agar karyawan dapat menggunakan *software* akuntansi dengan baik dan maksimal.
4. Dari segi pengamanan data sebaiknya dalam menjalankan program aplikasi akuntansi dibuat *back-up* data untuk menghindari masalah-masalah yang timbul, seperti kehilangan file dan sebagainya.

REFERENSI

- Andi. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*. (TM Books, Ed.). Yogyakarta.
- Harahap, S. S. (2015). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hery. (2012). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rahmawati, M. (2015). Peran Aplikasi Komputer Berbasis Akuntansi Untuk Badan Usaha Dalam Perspektif Sistem Informasi. *Perspektif, XIII-No.2*, 172-183.
- Setiawan, P. I. (2015). Rancang Bangun Aplikasi Business Intelligence Berbasis Arsitektur Aplikasi Akuntansi *Accurate*. *I(2)*.

PROFIL PENULIS

Mari Rahmawati. Menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) di STMIK KUWERA-HARVEST, Program Studi: Sistem Informasi, lulus pada tahun 2007 dengan gelar S.Kom. Ia melanjutkan studi Pascasarjana Magister Ilmu Komputer STMIK Nusa Mandiri, Program Studi: Sistem Informasi, Konsentrasi: e-Business, lulus pada tahun 2011 dan memperoleh gelar M.Kom. Penulis bergabung di

Universitas Bina Sarana Informatika sejak tahun 2006-sekarang sebagai dosen tetap dan sudah memiliki Jabatan Fungsional Akademik: Lektor terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018.

E-mail: mari.mrw@bsi.ac.id

Annisa Martriani. Menyelesaikan Pendidikan di Universitas Bina Sarana Informatika, lulus pada tahun 2018 dengan predikat baik. E-mail: myanissa15@gmail.com

Strategi Satuan Pengawas Internal untuk Meminimalisasi Temuan (Studi kasus pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri A)

Helti Nur Aisyiah

IAIN Surakarta
e-mail: aisyah76@gmail.com

Abstract – *This study aims to find out how the internal auditor (SPI) in Islamic College (PTKIN) A works. This research chose SPI PTKIN A due to the achievement of SPI PTKIN A which succeeded in obtaining zero findings on examination object in 2016 previously audited by SPI. Based on the research result, SPI PTKIN A has initiated the concept of pre-audit, current-audit, and post-audit on every activity contained in the working plan and budget of the ministry and institution (RKAKL) of fiscal year 2016. With these three concepts make SPI successfully suppress fraud and minimize the findings.*

Keywords: *audit, internal control unit, fraud, findings*

(Aisyiah, 2019)

Aisyiah, H. N. (2019). Strategi Satuan Pengawas Internal untuk Meminimalisasi Temuan (Studi kasus pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri A). *Moneter*, 6(2), 11–16.

PENDAHULUAN

Sejak terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal (SPI) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), maka setiap PTKIN pun mulai membentuk dan mengoperasikan lembaga tersebut. Namun, pembentukan di lingkungan PTKIN bukanlah hal yang baru bagi beberapa PTKIN yang sudah memiliki SPI sebelumnya. Salah satunya adalah PTKIN A yang sudah memiliki SPI sejak tahun 2015. Selama tahun 2015 hingga 2017, SPI yang berada di PTKIN A ini, mulai memperlihatkan prestasinya. Adapun prestasi yang diperoleh selang dua tahun berdirinya SPI, yaitu pada saat kedatangan auditor eksternal pada tahun 2017 dalam rangkaian kegiatan audit objek pemeriksaan tahun 2016. Prestasi yang dimaksud adalah dengan adanya nol temuan pada objek pemeriksaan yang sebelumnya telah diaudit oleh SPI.

Prestasi yang diraih oleh PTKIN A membenarkan pernyataan (Sawyer, 2003) yang mengatakan bahwa audit internal yang efektif dapat membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian, dan saran mengenai kegiatan yang diperiksanya. Pernyataan tersebut tersirat dari serangkaian kinerja SPI selaku auditor internal. Menurut (Zamzami, Faiz; Faiz, 2016), auditor internal berperan penting dalam melakukan manajemen risiko yang meliputi proses mengidentifikasi dan mengukur risiko, serta menyusun strategi untuk mengelolanya. Adapun kesalahan pengelolaan risiko dapat berpengaruh kepada jumlah temuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana SPI di PTKIN A bekerja hingga mampu

mendapatkan nol temuan pada kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal. Untuk mendapatkan prestasi nol temuan, pasti ada strategi yang digunakan untuk mendapatkannya.

Apa yang dilakukan oleh SPI merupakan wujud kesungguhan pengelolaan negara yang tidak hanya mengutamakan serapan anggaran, melainkan juga kehati-hatian. Keberadaan SPI menjadi salah satu alat dalam melakukan pengawasan dalam menjamin tujuan dan aktivitas manajemen berjalan dengan baik dan bebas dari kecurangan (*fraud*). (Asy'ari, Prasetyono, & Hartadi, 2013) mengatakan bahwa

Fraud merupakan suatu istilah umum yang di dalamnya termasuk semua aneka sarana, kegiatan, dan kecerdikan yang dilakukan oleh seorang individu untuk mendapat keuntungan dari pihak lain, tetapi dengan representasi yang salah (Albrecht, Albrecht, & Zimbelman, 2012). Pada dasarnya, tidak ada definisi atau aturan pasti mengenai dalil umum dalam mendefinisikan *fraud*. Hal ini dikarenakan *fraud* meliputi tindakan yang mengejutkan, tak terduga, menipu, licik, dan cara-cara yang tidak adil lainnya di mana pihak lain tercurangi. Siapa pun dapat melakukan dan terlibat dalam *fraud* karena pelaku *fraud* biasanya tidak dapat dibedakan dari orang lain atas dasar demografi atau karakteristik psikologis.

Terdapat pola *fraud* yang menjadi temuan BPK, yaitu: perawatan kendaraan bermotor; cetak dan penggandaan; pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga; makanan dan minuman pegawai; makanan dan minuman tamu; makanan dan minuman rapat; Alat Tulis Kantor (ATK); Bahan Bakar Minyak (BBM); alat listrik; bahan atau material; dekorasi; dokumentasi; materai; pemeliharaan; pakaian; peralatan/ bahan kebersihan; sewa, barang/jasa

badan layanan umum daerah; pigura; *trophy*; dan makan minum kepala dan wakil kepala daerah. (Sholihah, Siti; Alim, M. Nizarul; Musyarofah, n.d.)

Kecenderungan oknum melakukan *fraud* mendorong pemerintah untuk membuat solusi untuk mencegah dan mengatasi penyakit tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan kewajiban membentuk SPI di lingkungan PTKIN. Solusi yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaiknya juga diikuti dengan solusi internal PTKIN. Hal ini mengingat betapa pentingnya SPI dalam mewujudkan tata kelola yang baik di PTKIN tersebut. Menurut (Zarkasyi, 2008), SPI bertanggung jawab kepada rektor dan seluruh unit kerja yang membawahi tugas pengawasan internal. SPI tersebut berfungsi dan bertugas membantu rektor dalam memastikan pencapaian tujuan dan misi universitas dengan: (1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program universitas; (2) Memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko; (3) Melakukan evaluasi kepatuhan universitas terhadap peraturan universitas dan perundang-undangan; (4) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Bowker, Bogdan, & Taylor, 2006). Data hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui jawaban atas realitas tertentu (Afrizal, 2016). Realitas yang ada pada tahap pra penelitian, peneliti menemukan bahwa PTKIN A berhasil mendapatkan nol temuan pada objek pemeriksaan tahun 2016 yang dilakukan oleh auditor eksternal.

Fenomena langka, nol temuan, membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Dengan demikian, peneliti memusatkan metode kualitatif pada strategi studi kasus deskriptif. Dalam penelitian studi kasus, pertanyaan penelitian difokuskan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” (Yin, 2010). Harapan peneliti menggunakan strategi ini agar jawaban atas penelitian dapat sesuai dengan tujuan awal, yakni mengetahui bagaimana kinerja SPI hingga mampu memperoleh nol temuan pada PTKIN A.

Objek yang dipilih peneliti adalah SPI pada PTKIN A karena berperan sebagai auditor internal pada perguruan tinggi tersebut. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara kepada sekretaris,

verifikator, dan auditor SPI yang telah dilakukan pada tanggal 23 Maret 2017 di kantor SPI PTKIN A. Adapun peneliti memilih objek wawancara tersebut karena dinilai yang paling menguasai informasi terkait kinerja SPI dalam meminimalisasi temuan. Untuk mendukung hasil wawancara, peneliti memperdalam informasi dengan telaah pustaka yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SPI di PTKIN A sudah mulai berdiri sejak awal tahun 2015 bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) rektor tentang pengangkatan kepala dan sekretaris SPI. Setelah terbit SK yang diikuti dengan pelantikan ketua dan sekretaris SPI dilantik, disusunlah konsep baru dalam dunia audit internal, yaitu dengan melakukan tiga kali, yaitu pra, proses, dan pasca kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah semua kegiatan yang tertulis di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL).

Ketiga konsep yang digagas oleh SPI PTKIN A memiliki karakteristik yang berbeda: (1) audit pra kegiatan (*pre-audit*) dilakukan dengan cara memeriksa proposal kegiatan; (2) audit proses kegiatan (*current-audit*) dilakukan dengan mengamati pelaksanaan kegiatan; (3) audit pasca kegiatan (*post-audit*) dilakukan dengan memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri bukti-bukti transaksi keuangan.

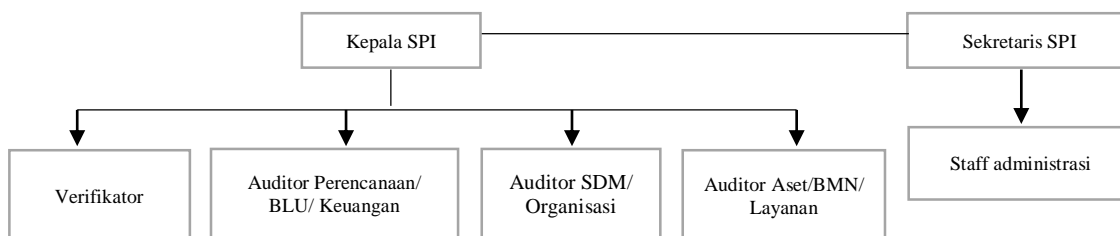
Pelaksanaan ketiga jenis audit tersebut dilakukan dengan spesialisasi kerja. Hal ini dilakukan agar masing-masing personel SPI dapat bekerja dengan maksimal dan terfokus pada satu bidang. Dengan demikian, SPI PTKIN A yang beranggotakan 10 orang membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian:

- a. 1 orang ketua;
- b. 1 orang sekretaris;
- c. 4 orang verifikator;
- d. 3 orang auditor;
- e. 1 orang staf administrasi.

Auditor yang terdiri dari 3 orang, masing-masing auditor memiliki satu tanggung jawab audit:

- a. keuangan;
- b. Barang Milik Negara (BMN);
- c. kinerja atau Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk mempermudah garis komando, maka SPI PTKIN mempunyai struktur organisasi seperti gambar 1 berikut.



Sumber: Buku Pedoman Satuan Pengawas Internal PTKIN A, 2016

Gambar 1. Struktur Organisasi PTKIN A

Penempatan posisi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan, kompetensi, dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan negara. Jabatan verifikator diduduki oleh tenaga kependidikan, sedangkan auditor oleh dosen yang sesuai dengan keilmuannya, yaitu lulusan di bidang akuntansi. Untuk mendukung kinerja SPI yang baru terbentuk, maka ada dua orang verifikator yang khusus didatangkan dari bagian keuangan pusat dan unit layanan pengadaan. Dengan dua orang verifikator yang berpengalaman dalam bidang keuangan dan pengadaan, SPI lebih mudah mengetahui risiko kecurangan yang telah terjadi bertahun-tahun di PTKIN A tersebut.

Berdasarkan struktur organisasi di atas, auditor terbagi menjadi tiga bagian: (1) perencanaan/ Badan Layanan Umum (BLU)/ keuangan; (2) Sumber Daya Manusia (SDM)/ organisasi; (3) aset/Barang Milik Negara (BMN)/layanan. Masing-masing posisi ditempati oleh satu orang, tetapi dalam pelaksanaan audit saling mendampingi. Jadi, yang bertanggung jawab atas posisi tersebut hanyalah satu orang, tetapi teknisnya dikerjakan secara bersama-sama.

Khusus pada kegiatan audit BMN, auditor bagian BMN menghadirkan pihak ketiga, yaitu tim Kantor Akuntan Publik (KAP). Hadirnya KAP diperlukan untuk mengaudit objek audit yang tidak dapat dijangkau oleh auditor internal karena keterbatasan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan BMN. Jadi, pada saat audit BMN, tim auditor SPI PTKIN bertugas mendampingi tim KAP selama proses

audit. KAP di sini juga sengaja didatangkan mengingat PTKIN A sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU).

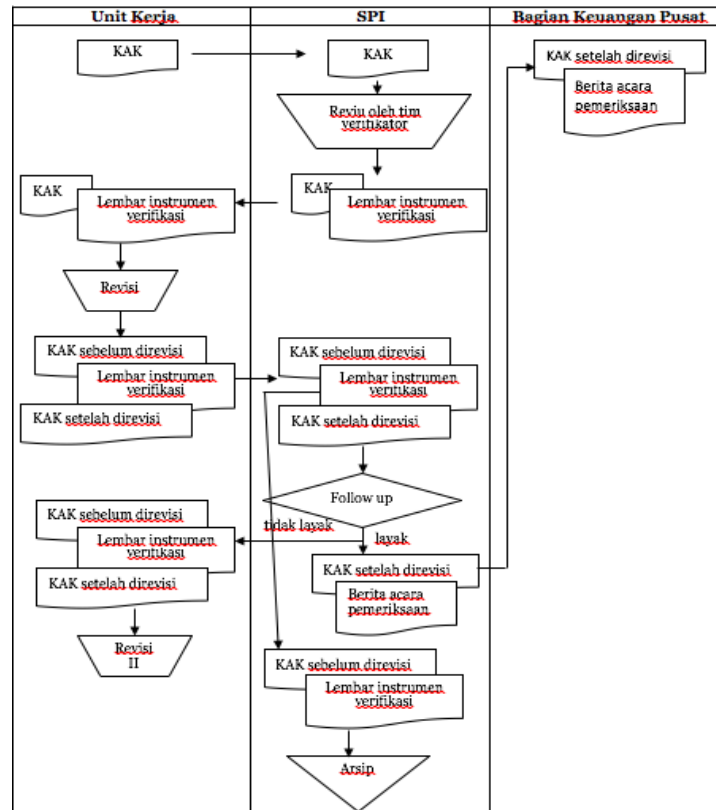
1. Proses Audit

Audit yang dilakukan oleh SPI PTKIN A memiliki cara yang berbeda-beda. Adapun perbedaan dari ketiga jenis audit tersebut adalah, sebagai berikut.

a. Pre-audit

Audit pada jenis ini dilakukan pada dokumen pra kegiatan, yaitu proposal. Dalam dunia keuangan sektor publik, proposal diistilahkan dengan Kerangka Acuan Kinerja (KAK). Setiap akan melakukan pencairan dana kegiatan, setiap unit kerja harus membuat KAK terlebih dahulu untuk mengetahui rencana apa saja yang akan dilakukan untuk mencairkan dana tersebut. Adapun acuan dalam penyusunan KAK berdasarkan data yang telah ada di RKAKL.

SPI PTKIN A tidak memberikan format pasti pada KAK, melainkan hanya mengaudit isi dari KAK tersebut. Berdasarkan konten atau isi yang ada dalam KAK, audit dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen, kewajaran harga, dan relevansi isi KAK terhadap jenis barang yang akan dibelanjakan. Adapun alur dari pemeriksaan pada KAK yang dilakukan SPI dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Gambar 2. Alur Pemeriksaan Kerangka Acuan Kerja

Berdasarkan bagan alir pada gambar 2, KAK yang sudah disusun oleh unit kerja, diserahkan ke SPI. Ada perbedaan pada sebelum dan sesudah adanya SPI. Sebelum ada SPI, KAK langsung diserahkan ke bagian keuangan pusat untuk kepentingan pencairan anggaran. Namun, semenjak adanya SPI, KAK harus masuk terlebih dahulu ke SPI untuk dilakukan *pre-audit*.

Proses detailnya, KAK yang masuk ke SPI diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikasi. KAK yang masuk diperiksa oleh tim verifikasi atau bersama auditor. Jadi, auditor baru akan memeriksa KAK jika ada yang perlu dikonsultasikan oleh tim verifikasi. Jika verifikasi bisa langsung menangani, maka bisa langsung dikembalikan ke unit untuk segera diperbaiki dengan menyertakan berita acara pemeriksaan.

Ada dua status yang dituliskan tim verifikasi dalam berita acara, layak dan tidak layak. Jika catatan tim verifikasi menunjukkan bahwa KAK sudah layak, maka tidak perlu kembali ke SPI lagi dan bisa langsung ke keuangan pusat untuk mengajukan pencarian anggaran. Namun, setelah berita acara pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh auditor. Jika tidak layak, maka unit perlu memperbaiki KAK dan kembali lagi ke SPI hingga keluar berita acara pemeriksaan dengan status layak.

Selain dokumen, tim verifikasi dan auditor juga melakukan audit faktual untuk memastikan kondisi

lapangan yang sebenarnya. Audit faktual diperlukan untuk mengantisipasi dan mencegah adanya kesalahan yang tidak disengaja (ketidaktahuan) maupun yang disengaja (kecurangan). Ada beberapa teknik yang dilakukan, yaitu dengan mencari sumber primer dan sekunder. Sumber primer dilakukan dengan langsung menemui rekanan kerja atau melalui media komunikasi, sedangkan sumber sekunder dilakukan dengan mencari informasi dari media cetak atau digital.

Dalam melakukan audit pra kegiatan, tim SPI berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun berjalan tentang standar biaya masukan. Namun, tidak semua akun termuat dalam PMK tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim SPI perlu menyusun sendiri daftar acuan belanja yang sering digunakan dalam kegiatan. Misalnya, tim SPI melakukan *survey* harga alat tulis kantor untuk menentukan batas harga maksimal barang yang dianggap wajar.

Proses *pre-audit* yang sedemikian rupa dilakukan untuk mencegah adanya *fraud* yang nantinya akan benar-benar dilaksanakan berdasarkan isi dari KAK tersebut. Menurut (Aisyiah & Ahzar, 2017), potensi *fraud* yang paling sering ditemukan pada KAK adalah: harga satuan melebihi standar biaya masukan; item belanja tidak rinci; ketidaksesuaian anggaran dengan *rundown* acara; penggunaan satuan. Harga melebihi satuan ditunjukkan dengan

adanya harga yang melebihi standar biaya pada masukan. Misalnya, makan seharusnya 30 ribu rupiah, di Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) melebihi dari nominal tersebut.

b. *Current-audit*

KAK yang dianggap layak belum tentu layak pada ranah proses berlangsungnya kegiatan yang termaktub dalam KAK tersebut. SPI yang mempunyai fungsi mengawasi pun tetap harus mengawasi berjalannya kegiatan. Audit proses dilakukan untuk memastikan informasi yang ada di KAK benar-benar terlaksana, tidak dikurangi dan tidak ditambahi.

Adapun teknik audit proses dilakukan dengan pengamatan langsung, dokumentasi, atau menghubungi orang yang bersangkutan media komunikasi. Pengamatan langsung dilakukan dengan tim SPI mengirimkan seorang yang ditugaskan untuk melihat kegiatan tersebut secara langsung yang kemudian hasil pengamatannya ditulis ke dalam berita acara.

Dalam pengamatan langsung, ada saatnya proses audit tersebut di luar kemampuan auditor internal, sehingga perlu mengundang KAP untuk melakukan audit fisik, terutama pada Barang Milik Negara (BMN). Untuk teknik dokumentasi, tim SPI yang bertugas meminta ketua pelaksana kegiatan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dan barang yang termuat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) di KAK. Hasil dokumentasi tersebut langsung dikirimkan ke anggota tim SPI yang bertugas melalui media komunikasi yang disepakati kedua belah pihak.

Selain kedua teknik tersebut, menghubungi orang yang bersangkutan dengan media komunikasi juga penting. Misalnya, anggota tim SPI yang ditugaskan sengaja menelepon narasumber kegiatan untuk memastikan apakah jumlah jam mengisi kegiatan (JPL) sudah sesuai dengan yang tercantum dalam KAK.

c. *Post-audit*

Proses audit pasca kegiatan sama dengan audit pra kegiatan, yaitu dokumen pasca kegiatan diaudit terlebih dahulu oleh SPI hingga dinyatakan layak untuk bisa disampaikan ke bagian keuangan pusat. Pada audit ini, tidak selama dan seketat audit pra kegiatan. Hal ini dikarenakan dokumen pasca kegiatan hanya menyalin dan menjabarkan isi KAK yang sudah disusun sebelumnya, sehingga tim verifikasi tinggal membandingkan isi KAK dengan dokumen pasca kegiatan dengan didukung data-data hasil *current-audit*. Adapun dokumen pasca kegiatan

berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)¹.

Kegiatan audit pasca kegiatan bisa dilakukan secara rutin sama seperti alur KAK masuk SPI atau juga bisa dilakukan secara langsung di unit kerja. Jika audit pasca dilakukan rutin, maka dokumen pasca kegiatan disampaikan ke SPI untuk diverifikasi.

2. Hambatan Audit

Hambatan pada awal berdirinya lembaga SPI adalah adanya beberapa orang atau lembaga yang merasa keberatan dengan pola kerja audit yang ditetapkan oleh SPI. Namun, dengan dukungan penuh dan komitmen dari Rektor PTKIN A, maka masalah tersebut dapat terpecahkan. Konflik yang sempat ada kembali harmonis setelah auditor eksternal mengumumkan hasil auditnya yang menekankan bahwa ada sebanyak nol temuan pada objek pemeriksaan yang sudah diperiksa oleh SPI. Dengan demikian, jelas ada efek baik dengan adanya SPI pada pengelolaan keuangan di PTKIN A.

KESIMPULAN

Proses audit yang terkonsep dan terlaksana dengan baik menjadikan SPI PTKIN A berhasil membuat prestasi yang maksimal. Objek nol temuan tersebut merupakan objek yang sebelumnya sudah diaudit oleh SPI. Dengan munculnya nol temuan, maka jelas ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dibentuknya SPI. Jumlah temuan setelah adanya SPI jelas lebih sedikit dari pada sebelum adanya SPI. Dengan demikian, benar adanya bahwa SPI mampu menekan *fraud* dan jumlah temuan. Apalagi, jika dilihat dari proses audit dari pra, proses, hingga pasca kegiatan yang sangat detail yang jelas menjadikannya tidak sia-sia menuju predikat nol temuan pada objek audit yang telah diaudit oleh SPI PTKIN A.

Dengan adanya artikel ini, diharapkan perguruan tinggi baik di bawah Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) dapat melakukan benchmark pada apa yang telah dilakukan oleh tim SPI PTKIN A. Dengan demikian, akan tercapai *good governance* dan *clean government* di dunia perguruan tinggi Indonesia.

REFERENSI

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Aisyiah, H. N. (2019). Strategi Satuan Pengawas Internal untuk Meminimalisasi Temuan (Studi kasus pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri A). *Moneter*, 6(2), 11–16.
- Aisyiah, H. N., & Ahzar, F. A. (2017). Ex Ante Audit Sebagai Upaya Pencegahan Fraud. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.26740/jaj.v9n1.p54-64>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination*. South-Western Cengage Learning. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Asy'ari, M. A., Prasetyono, & Hartadi, B. (2013). Peran dan Fungsi Pengawasan Intern dalam Pencegahan Fraud Pada Perguruan Tinggi X. *Jaffa*.
- Bowker, L. H., Bogdan, R., & Taylor, S. J. (2006). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. Teaching Sociology. <https://doi.org/10.2307/1317067>
- Sawyer, L. B. (2003). *Sawyer's Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing*. The Institute of Internal Auditors.
- Sholihah, Siti; Alim, M. Nizarul; Musyarofah, S. (n.d.). Memotret Pola Fraud pada Rincian Objek Belanja yang Menjadi Temuan BPK, 4(2), 101–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/jaffa.v4i2.2783>
- Yin, R. K. (2010). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Qualitative Research.
- Zamzami, Faiz; Faiz, I. A. M. (2016). *Audit Internal: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta.

Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KKP Pratama Sukabumi)

Dicki Prayudi¹, Anisa Sejati²

¹Universitas Bina Sarana Informatika
dicki.dcd@bsi.ac.id

²STIE PGRI Sukabumi
anisasejati1993@gmail.com

(Prayudi & Sejati, 2019)

Prayudi, D., & Sejati, A. (2019). Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KKP Pratama Sukabumi). *Moneter*, 6(2), 17–24.

Abstract - A Tax is the main source of state income in addition to various other income. Aside from being a source of state revenue, taxes also function as policy instruments used by the government to reduce consumption of public goods and services. Value Added Tax (VAT) is one type of tax that has a large income potential. This study aims to determine how much contribution is given by Value Added Tax to the total realization of tax revenue at the Sukabumi Tax Office. This study uses a horizontal and vertical analysis method with added literature from the literature study. That to suppress the instability of tax revenues, the Pratama Sukabumi Tax Service Office breaks down all revenue targets. Therefore, strategic steps need to be taken to keep achieving the specified targets. Among them is by disseminating new regulations, as well as guidance and ongoing consultation. It is expected that the tax target can be increased every year. As a result, Comparative Analysis of the Amount of Realization of Value Added Tax Revenues with Total Realization of Tax Revenues As a basis for Assessing Achievement for 5 years is 28.99%, which means that 28.99% of tax revenues are contributions or revenues from Value Added Tax.

Keywords: Tax, Value Added tax, Tax Revenue Ratio.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, Pemerintah perlu melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan utama, pembangunan ekonomi itu pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan nasional.

Kemampuan menggali dana baik domestik maupun luar negeri dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang perlu terus ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan upaya perwujudan kemandirian pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Potensi penerimaan pajak sangat berpengaruh dalam mensukseskan pembangunan nasional, menyadari hal ini sangat diperlukan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk turut mensukseskan peningkatan penerimaan pajak dengan cara menjalani kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu. Pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat (Anam & Andini, 2016).

Salah satu jenis pajak yang dipungut di Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup besar adalah Pajak pertambahan Nilai. Saat ini PPN memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan negara dari sektor perpajakan. PPN merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (Rambitan, 2019). Untuk mendukung kebijakan pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak dalam sektor pajak perlu adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat atas pajak serta program perpajakan seperti sosialisasi pajak, penegakan hukum serta sanksi perpajakan. Penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak sari sektor pajak pertambahan nilai selama beberapa tahun ini tidak mencapai target, realisasi penerimaan pajak

pertambahan nilai pun mengalami penurunan. Oleh karena itu pemerintah bersifat keras dan tegas dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Beberapa upaya dilakukan, salah satunya dengan menerbitkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Masalah kemudian timbul akibat penurunan jumlah penerimaan pajak dari sektor pertambahan nilai ini sehingga rasio terhadap total penerimaan pajak dinilai tidak memuaskan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi merupakan kantor pelayanan pajak yang bergerak di bidang penerimaan pajak. Sebagai instansi berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewengannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi berlokasi di Jalan Laksamana RE Martadinata No. 1 Sukabumi, pada awal terbentuknya merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sukabumi (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak STDD Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 167/PMK.01/2012).

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah Indonesia, 2007). Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yang digunakan sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus dalam hal ini wajib pajak bersifat final.

2. *Sell Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Menurut UU No. 42 tahun 2009, "pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi". Juga mengungkapkan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Menurut (Sukardji, 2014), Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut:

1. Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke Kas Negara.
3. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif. Yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang pada saat

timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya *taatbestand*, adapun yang dimaksud *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama Objek Pajak.

4. Multi Stage Levy (*Multy Stage Levy Tax*) merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*Manufacture*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk ataupun nama, sampai dengan tingkat pedagang eceran (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*. Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (*output tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak keluaran yang dikurangkan dengan Pajak Masukannya untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas Negara dinamakan *tax credit*. Atau PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN yang disetorkan ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimana harus ada bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak.
6. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri. Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, termasuk Barang Kena Pajak yang diimpor dari luar negeri. Tetapi untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
7. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral. Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) Faktor, yaitu:
 - a. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa
 - b. Pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi.

8. Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda. Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah dan PPN yang dibayar diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

Apabila dicermati, subjek PPN tersirat di balik ketentuan yang mengatur tentang objek pajak yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984. Dari saduran jurnal sebelumnya (Daud, 2018), ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu PKP dan non PKP. Masing-masing kelompok subjek pajak ini dapat diurai dari pasal-pasal yang terkait sebagai berikut :

1. PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Beberapa pasal yang menyiratkan bahwa subjek pajaknya adalah PKP:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c yang menentukan PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP
- b. Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h UU PPN 1984 dengan lugas menentukan bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP yang dilakukan oleh PKP.
- c. Pasal 16D UU PPN 1984 diawali dengan kalimat, PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP.

2. Non PKP

Sebutan “non PKP” mengandung pengertian tidak dipersyaratkan memiliki status PKP supaya dapat melaksanakan kewajiban PPN, seperti yang tersirat dalam:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf b menentukan bahwa PPN dikenakan atas impor BKP. Tidak disebut dengan tegas bahwa seseorang atau barang yang mengimpor BKP harus berstatus PKP supaya dapat membayar PPN yang terutang.
- b. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e menentukan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
- c. Pasal 16C dengan lugas menentukan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, baik oleh orang pribadi atau badan.

Saduran (Hasan, 2018) tentang pembayaran PPN menyebutkan tarif pajak pertambahan nilai adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)
 Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berada sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 % (nol persen). Tarif PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15 %.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada umumnya para fiskus menggunakan konsep perbandingan realisasi sebagai dasar untuk menentukan pendapatan. Karena dengan perbandingan realisasi akan terlihat penurunan atau kenaikan pada kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Penghitungan dengan cara perbandingan ini akan dapat menentukan dengan mudah ukuran presentase dalam sebuah nilai.

Pendapatan yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah pengakuan pendapatan dari penerimaan total penerimaan pajak pertambahan nilai dan total penerimaan pajak. Jadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi mencatat laporan keuangan yakni pembayaran pajak pertambahan nilai dari wajib pajak serta penerimaan total penerimaan pajak. Dengan demikian, maka peneliti ingin mengetahui seberapa besarkah kontribusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap total penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi akankah kontribusi Pajak Pertambahan Nilai naik atau turun dibandingkan dengan total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer berupa data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari kuartal 5 tahun dan Data Total penerimaan Pajak di kuartal tahun yang sama. Selain itu, Data Sekunder yang dilakukan adalah Observasi dan wawancara kepada pihak yang bertugas, terkait dengan paparan penerimaan pajak di kuartal tahun yang diteliti.

Dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumentasi, dimana jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang ada, khususnya mengenai penerimaan salah satu sub pajak. Metode analisis menggunakan analisis horizontal dan analisis vertical (Sugiyono, 2010). Kontribusi PPN terhadap Total penerimaan pajak di KPP Pratama sejauh ini terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini bukti jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sukabumi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tahun	Penerimaan Netto	Target Tahun	Pencapaian	selisih
2012	130,985,026,405	83,626,150,836	156,63	-
2013	175,968,860,919	150,472,082,863	116,94	34,34
2014	213,881,719,297	221,675,124,079	96,48	21,54
2015	297,014,047,335	337,007,226,139	88,13	38,86
2016	315,544,685,539	343,689,551,000	91,81	6,23

Sumber: Kantor KKP Pratama Sukabumi (2016)

Rumus yang digunakan untuk mengetahui selisih adalah sebagai berikut:

$$\Delta = \frac{X_2 - X_1}{X_1} \times 100\%$$

Sumber: Untung Sukardji (2014)

Rencana target penerimaan PPN tahun 2012 sebesar 83.626.150.836 dan realisasi penerimaan PPN sebesar 130.985.026.405 dengan pencapaian sebesar 156,63% dan pada tahun 2012 rencana penerimaan PPN dikatakan tercapai.

1. Rencana target penerimaan PPN tahun 2013 sebesar 150.472.082.863 dan realisasi penerimaan PPN sebesar 175.968.860.919 dengan pencapaian sebesar 116,94% selisih perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 34,34 % dan dikatakan Penerimaan PPN tercapai.
2. Rencana target penerimaan PPN tahun 2014 sebesar 221.675.124.079 dan realisasi penerimaan PPN sebesar 213.881.719.297 dengan pencapaian sebesar 96,48% selisih perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 21,54 % dan pada tahun 2014 rencana penerimaan mengalami penurunan sebesar 12,8% dan Penerimaan PPN dikatakan tidak tercapai.
3. Rencana target penerimaan PPN tahun 2015 sebesar 337.007.226.139 dan realisasi penerimaan PPN sebesar 297.014.047.335 dengan pencapaian sebesar 88,13% selisih perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 38,86 % dan pada tahun 2015 rencana penerimaan mengalami kenaikan meskipun tidak besar yaitu sebesar 17,32% dan Penerimaan PPN dikatakan tidak tercapai.
4. Rencana target penerimaan PPN tahun 2016 sebesar 343.689.551.000 dan realisasi penerimaan PPN sebesar 315.544.685.539 dengan pencapaian sebesar 91,81% selisih perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,23 % dan pada tahun 2015 rencana penerimaan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 32,63% dan Penerimaan PPN dikatakan tidak tercapai.

Berikut ini bukti total penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukabumi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Total Penerimaan Pajak KPP Pratama

Tahun	Total Penerimaan Pajak	Target Tahun	Pencapaian	Selisih
2012	563,258,963,882	537,565,060,796	104,78	-
2013	620,001,693,511	654,042,756,214	94,77	10,08
2014	734,686,063,202	759,255,037,545	96,77	18,50
2015	896,899,936,497	1,108,562,090,517	80,91	22,08
2016	1,015,703,291,664	1,278,782,929,000	79,43	13,25

Sumber: Kantor KKP Pratama Sukabumi (2016)

Rumus yang digunakan untuk mengetahui selisih adalah sebagai berikut :

$$\Delta = \frac{X_2 - X_1}{X_1} \times 100\%$$

Sumber: Untung Sukardji (2014)

1. Rencana target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar 537.565.060.796 dan realisasi penerimaan pajak sebesar 563.258.963.882 dengan pencapaian sebesar 104,78% dan pada tahun 2012 rencana penerimaan pajak dikatakan tercapai.
2. Rencana target penerimaan pajak tahun 2013 sebesar 654.042.756.214 dan realisasi penerimaan pajak sebesar 620.001.693.511 dengan pencapaian sebesar 94,77% selisih perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,08 % dan pada tahun 2013 rencana penerimaan pajak dikatakan tidak tercapai.
3. Rencana target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar 759.255.037.545 dan realisasi penerimaan pajak sebesar 734.686.063.202 dengan pencapaian sebesar 96,77% selisih perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,50 % rencana penerimaan mengalami kenaikan meskipun tidak besar yaitu sebesar 8,42% dan pada tahun 2014 rencana penerimaan pajak dikatakan tidak tercapai.
4. Rencana target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar 1.108.562.090.517 dan realisasi penerimaan pajak sebesar 896.899.936.497 dengan pencapaian sebesar 80,91% selisih perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 22,08 % rencana penerimaan mengalami kenaikan meskipun tidak besar yaitu sebesar 22,08 % dan pada tahun 2015 rencana penerimaan pajak dikatakan tidak tercapai.

Rencana target penerimaan pajak tahun 2016 sebesar 1.278.782.929.000 dan realisasi penerimaan pajak sebesar 1.015.703.291.664 dengan pencapaian sebesar 79,43% selisih perbandingan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu sebesar 13,25 % rencana penerimaan mengalami penurunan yaitu sebesar 8,83 % dan pada tahun 2016 rencana penerimaan pajak dikatakan tidak tercapai.

Berikut ini adalah perhitungan analisis perbandingan total penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukabumi selama lima tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KKP Pratama Sukabumi)

Tabel 3. Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Total penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi Tahun 2012 s.d. 2016

Tahun	Penerimaan Bruto PPN	Total Penerimaan Pajak	Ratio	Naik/Turun
2012	130.985.026.405	563.258.963.882	23,25	
2013	175.968.860.919	620.001.693.511	28,38	5,13
2014	213.881.719.297	734.686.062.202	29,11	0,73
2015	297.014.047.335	896.899.936.497	33,11	4,00
2016	315.544.685.539	1.015.703.291.664	31,06	-2,05

Sumber: Kantor KKP Pratama Sukabumi (2016)

Keterangan :

1. Analisis perbandingan ini menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun pembanding agar dapat diketahui perkembangan penerimaan pajak secara periodik dan perubahan-perubahan setiap periodenya akan terlihat jelas. Tahun pembanding/tahun sebelumnya diperhitungkan 100%.
2. Tahun awal pada periode yang dianalisis tidak mempunyai nilai persentase karena tidak mempunyai tahun pembanding dan tidak bisa diberikan nilai 100% karena analisa ini tidak menggunakan teknik analisa trend dengan menggunakan tahun dasar sebagai tahun pembanding.
3. Data diatas adalah analisa perbandingan yang dinyatakan dengan ratio antara Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Total Penerimaan Pajak di KPP Pratama Sukabumi.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai}}{\text{Total Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Untung Sukardji (2014)

Berikut adalah cara perhitungannya :

1. Analisis jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total realisasi penerimaan pajak tahun 2012

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Rp } 130.958.026.405}{\text{Rp } 563.258.963.882} \times 100\% = 23,25\%$$

- a. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 sebesar Rp. 130.958.026.405.
- b. Total Penerimaan Pajak Tahun 2012 sebesar Rp. 563.258.963.882.
- c. Kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai terhadap Total Penerimaan Pajak pada tahun 2012 adalah sebesar 23,25%.
- d. Belum dilakukan perhitungan naik/turun dari periode sebelumnya.

2. Analisis perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total realisasi penerimaan pajak tahun 2013

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Rp } 175.968.860.919}{\text{Rp } 620.001.693.511} \times 100\% = 28,38\%$$

- a. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2013 sebesar Rp. 175.968.860.919.
- b. Total Penerimaan Pajak Tahun 2013 sebesar Rp. 620.001.693.511.
- c. Kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total penerimaan Pajak pada tahun 2013 adalah sebesar 28,38 %.
- d. Periode tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 5,13% dari ratio periode pajak sebelumnya tahun 2012.

3. Analisis perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total realisasi penerimaan pajak tahun 2014

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Rp } 213.881.719.297}{\text{Rp } 734.686.062.202} \times 100\% = 29,11\%$$

- a. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 sebesar Rp. 213.881.719.297.
- b. Total Penerimaan Pajak Tahun 2014 sebesar Rp. 734.686.062.202.
- c. Kontribusi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total penerimaan Pajak pada tahun 2014 adalah sebesar 29,11 %.
- d. Periode tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0.73% dari ratio periode pajak sebelumnya tahun 2013.

4. Analisis perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total realisasi penerimaan pajak tahun 2015

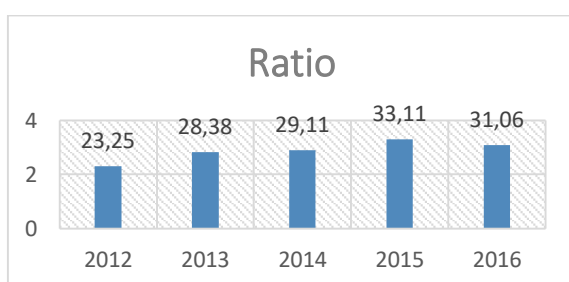
$$\text{Ratio} = \frac{\text{Rp } 297.014.047.335}{\text{Rp } 896.899.936.497} \times 100\% = 33,11\%$$

- a. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 sebesar Rp. 297.014.047.335.
 - b. Total Penerimaan Pajak Tahun 2015 sebesar Rp. 896.899.936.497.
 - c. Kontribusi pajak pertambahan nilai terhadap Total Penerimaan Pajak pada tahun 2015 adalah sebesar 33,11 %.
 - d. Periode tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4% dari ratio periode pajak sebelumnya tahun 2014.
5. Analisis jumlah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total realisasi penerimaan pajak tahun 2016.

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Rp } 315.544.685.539}{\text{Rp } 1.015.703.291.664} \times 100\% = 31,06\%$$

- a. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016 sebesar Rp. 315.544.685.539.
- b. Total Penerimaan Pajak Tahun 2016 sebesar Rp. 1.015.703.291.664.
- c. Kontribusi pajak pertambahan nilai terhadap Total penerimaan Pajak pada tahun 2016 adalah sebesar 31,06%.
- d. Periode tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,05% dari ratio periode pajak sebelumnya tahun 2015.

Gambar 1. Ratio Kontribusi PPN terhadap Total Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sukabumi



Sumber: Kantor KKP Pratama Sukabumi (2016)

Analisis perbandingan total penerimaan pajak pertambahan nilai dengan total penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukabumi. Terdapat rasio perbandingan antara penerimaan PPN dengan total penerimaan pajak. Dimana rasio yang diberikan sudah stagnan dari waktu ke waktu dan kisaran rasio tersebut harus tetap dipertahankan. Karena rasio ini didapat dari pencapaian target yang telah diberikan. Maka agar rasio tersebut tercapai, kiranya perlu penggalian potensi perpajakan dengan lebih mendalam dan obyektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di muka, peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan. Diantaranya adalah :

1. Realisasi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Sukabumi selama 5 Tahun jika dirata-ratakan penerimaan PPN selama 5 Tahun adalah sebesar 109,99%.
2. Realisasi Total Penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukabumi selama 5 tahun jika dirata-ratakan total penerimaan selama 5 tahun adalah sebesar 91,34%.
3. Analisis Perbandingan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Total Realisasi Penerimaan Pajak Sebagai dasar dalam Menilai Pencapaian selama 5 tahun adalah sebesar 28,99% yang artinya bahwa 28,99% dari penerimaan pajak merupakan kontribusi atau penerimaan dari pajak pertambahan nilai.

Dengan menelaah hasil dari kesimpulan penelitian di atas, kiranya peneliti perlu memberikan beberapa saran sebagai masukan dimasa yang akan datang bagi objek penelitian, diantaranya adalah:

1. Penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sukabumi untuk 5 tahun terakhir sejauh ini sudah baik, namun masih harus mencari solusi bagaimana cara meningkatkan lagi target penerimaan PPN setiap tahunnya, bisa dari kegiatan konsultasi secara berkelanjutan dan kegiatan jemput bola, yaitu mendatangi Wajib Pajak yang sekiranya memiliki potensi pajak bernilai tinggi.
2. Total penerimaan pajak pada KPP Pratama Sukabumi untuk 5 tahun terakhir ini masih belum mencapai target. perlu ditingkatkan lagi dan dicarikan solusi apabila terjadi penurunan untuk total penerimaan pajak. Peningkatan dari pencapaian target bisa dilakukan dengan mensosialisasikan aturan-aturan baru perpajakan, serta melakukan kegiatan bimbingan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan lebih menyeluruh dan merata.

REFERENSI

- Anam, M. C., & Andini, R. (2016). Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variable Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Accounting*.
- Daud, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 78-87.
- Hasan, W. A. (2018). Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi

- Mitra Buton Abadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 1(November), 27–34.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Perpajakan, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prayudi, D., & Sejati, A. (2019). Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada KKP Pratama Sukabumi). *Moneter*, 6(2), 17–24.
- Rambitan, C. (2019). Analysis Of The Application Of Income Tax Article 21 And Value Added Tax On PT . Emigas Sejahtera. *Jurnal EMBA*, 7(2).
- Sugiyono. (2010). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, U. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT RajaGravindo Persada.

PROFIL PENULIS

Dicki Prayudi. Penulis merupakan lulusan pascasarjana Universitas Pasundan Bandung tahun 2016 jurusan Manajemen Pemasaran. Selama tiga tahun penulis bekerja di Bank Rakyat Indonesia sebagai Account Officer sampai tahun 2014. Penulis pun masih aktif mengajar di kampus Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Sukabumi dari tahun 2015. Selain mengajar, penulis juga aktif menjadi pembicara public speaking di event resmi

dan grouping, seperti pengembangan public speaking Dinas Pariwisata Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dan lainnya.

Anisa Sejati. penulis merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Kota Sukabumi lulusan tahun 2017 jurusan Akuntansi. Selama menempuh dunia perkuliahan, penulis bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi sebagai administrasi officer. Tahun 2017 pun penulis memilih menjadi consultant pajak secara independen dan berstatus ibu rumah tangga.

Lemahnya Pengendalian Internal Berdampak Terjadi *Mark Up* Biaya Pengawasan PT ALRSY

Andi Martias

Universitas Bina Sarana Informatika

Email: andi.aim@bsi.ac.id

Abstract -Internal audit can be interpreted as an audit and assessment activity in a company as a whole, which aims to help all levels of management in carrying out their responsibilities effectively through the provision of useful advice to improve performance at each level of management. The method of this research is a qualitative approach. To ensure the independence, objectivity and quality of the process, an internal auditor is needed as a facilitator in the process which will also independently report the results to the company's management and also as a basis for control. As a logistics company, companies often receive orders to ship items for project needs such as heavy equipment, spare parts, etc., to ensure that there are no disturbances on the road, the company usually requests police escort services. From the police there is no official tariff to be paid because of its assistance. Because there is no official tariff, it causes irregularities in practice. This study analyzes the weaknesses that occur due to a lack of internal controls. . From the description and analysis discussed earlier, conclusions can be taken that must be considered to avoid the occurrence of fraud cases again is the nature of prudence (overconfidence in colleagues, communication systems that have not been effective, low honesty, integrity and loyalty of employees).

Keywords: Internal Control, Internal Auditing, Fraud

Martias, A. (2019). Lemahnya Pengendalian Internal Berdampak Terjadi *Mark Up* Biaya Pengawasan PT ALRSY. *Moneter*, 6(2), 25–38.

PENDAHULUAN

Audit Internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif melalui pemberian saran yang berguna untuk memperbaiki kinerja disetiap tingkatan manajemen. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berdasarkan *historical experience* dan observasi.

Evolusi profesi internal auditing, saat ini menunjukkan dinamika yang mengarah pada perkembangan melaju sangat cepat seiring dengan perkembangan jaman pada era globalisasi (Hiro Tugiman, 2014) Dengan kondisi seperti ini evolusi membuat auditor internal turut berperan dalam implementasi *Good Corporate Government* (GCG) di perusahaan maupun di pemerintahan. Dalam perkembangannya penekanan dan mekanisme internal audit telah bergeser (berubah). Pada masa lalu fokus utama peran internal auditor adalah sebagai '*watchdog*' dalam perusahaan, sedangkan pada masa kini dan mendatang proses internal auditing modern telah bergeser menjadi 'konsultan intern' (*internal consultant*) yang memberi masukan berupa pikiran-pikiran untuk perbaikan (*improvement*) atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalis (*catalyst*). Fungsi internal auditor sebagai '*watchdog*' membuat perannya

"kurang disukai" kehadirannya oleh unit organisasi lain. Hal ini mungkin merupakan konsekuensi logis dari profesi internal auditor yang tugasnya memang tidak dapat dilepaskan dari fungsi audit (pemeriksaan), bahwa antara pemeriksa (*auditor*) dan pihak yang diperiksa (*auditee*) berada pada posisi yang saling berhadapan (Hogan, 2014).

Meningkatnya persaingan usaha dalam era globalisasi sekarang ini menuntut perusahaan agar dalam pelaksanaan usahanya dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan bisnisnya, setiap perusahaan memiliki resiko kerugian keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi bisnisnya karena menjadikan unsur biaya menjadi tinggi. Biaya tinggi akan membuat perusahaan sulit bersaing karena saat ini orang menjadi semakin pemilih dimana selalu berusaha mencari produk atau jasa yang bagus dengan harga yang murah (Blanchhard, 2013).

Di sinilah peran Pengendalian Internal atau Internal Auditor dibutuhkan karena tugasnya adalah membantu manajemen dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menilai efisiensi dan efektivitas kinerja manajemen
2. Memberikan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja
3. Memonitor kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan transaksi keuangan.

Keterlibatan internal auditor dalam aktivitas operasional sehari-hari termasuk dalam proses pelaporan transaksi keuangan dan sistem pengendalian intern memberi kesempatan internal auditor untuk melakukan penilaian secara berkala dan menyeluruh atas aspek-aspek operasional perusahaan yang memiliki risiko tinggi (Martias, 2017).

Standar Profesi Audit Internal (1210.2) menyatakan bahwa internal audit harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. SIAS No. 3 menyatakan bahwa internal audit diwajibkan untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya ketidakwajaran penyajian, kesalahan, penyimpangan, kecurangan, *inefficiency*, konflik kepentingan dan ketidakefektifan pada suatu aktivitas perusahaan. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas diketahui pada PT.ALARSY masih terdapat kelemahan akan kesadaran atas semua faktor penting yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sehingga memungkinkan manajemen dari semua tingkat melakukan penyesuaian-penyesuaian (menciptakan kontrol) yang dibutuhkan.

Lemahnya pengendalian internal akan berdampak pada risiko operasional perusahaan dimana akan berpengaruh terhadap seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Hal inilah yang menjadi rumusan masalah untuk melakukan penelitian "*Lemahnya Pengendalian Internal Berdampak Terjadi Mark Up Biaya Pengawasan PT ALRSY*". PT.ALARSY adalah perusahaan bergerak dalam bidang logistik dimana untuk area Kalimantan berpusat di Balikpapan dan mempunyai kantor perwakilan di: Samarinda, Batu Kajang, Tarakan, Tanjung Redep, Sangatta, Banjarmasin, Batu Licin, Tanjung Adaro, Satui, Senakin, Pontianak dan Pangkalan Bun. Dengan melihat semua aspek fungsi di *internal control*, penulis ingin mengamati lebih mendalam mengenai sejauh mana kemajuan lembaga ini dalam menjalankan fungsinya sehingga dapat berpartisipasi secara maksimal pada pembangunan perusahaan demi mewujudkan tujuan perusahaan yaitu kemakmuran dan kesejahteraan hidup karyawan. Penulis ingin mengetahui sejauhmana peran pengawasan internal atau internal auditor dalam melaksanakan fungsinya yang merupakan bagaian dari unit kerja perusahaan. Bila lemahnya fungsi pengendalian akan berakibat berbagai risiko yang akan berpengaruh terhadap aktivitas dan tujuan manajemen atau perusahaan tidak bisa tercapai.

1. Internal Audit

Perkembangan profesi internal auditing, dewasa ini melaju sangat cepat seiring dengan perkembangan jaman pada era globalisasi. Definisi / pengertian internal auditing juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

a. Pengertian Menurut Sawyer (*The Practice of Modern Internal Auditing*), The Institute of

Internal Auditors, 2010) "*Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to organization*"

- b. (*Internal audit* adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi).
- c. Pengertian Menurut Institute of internal Auditor (IIA, 2012) "*Internal auditing is an independent , objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process*".
- d. *Internal audit* adalah suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal auditing membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi).

Committee of Sponsoring Organization (COSO) dalam (Moeller, 2012) memberikan definisi mengenai pengendalian internal sebagai berikut: "*Internal control is a process, affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

- a. *Effectiveness and efficiency of operations.*
- b. *Reliability of financial reporting.*
- c. *Compliance with applicable laws and regulations.* "

Pengendalian internal dipengaruhi atau dilaksanakan oleh semua karyawan baik direktur maupun karyawan dengan level terendah sekalipun dalam sebuah perusahaan. Dengan pengendalian internal yang baik maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki efektivitas dan efisiensi dalam operasional, memiliki laporan keuangan yang handal dan menjamin bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku (Sawyre, 2006).

2. Paradigma Baru Internal Audit

Internal Audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan

pemerintah (regulator) misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, asuransi, perindustrian, investasi dan lain-lain. Karena yang melakukan internal audit (disebut *internal auditor*) adalah pegawai perusahaan sendiri (orang dalam perusahaan), maka banyak pihak yang menganggap bahwa internal auditor tidak independen (Efendy, 2014). Fungsi konsultan bagi internal auditor merupakan peran yang relatif baru. Peran konsultan membawa internal auditor untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan suatu masalah. Kemampuan untuk merekomendasikan pemecahan suatu masalah (*problem solver*) bagi internal auditor dapat diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi di perusahaan (Handoko, 2009).

Pada saat ini, konsultasi internal merupakan aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh manajemen yang perlu dilakukan oleh internal auditor. Selain sebagai konsultan, internal auditor harus mampu berperan sebagai katalisator. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut reaksi. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional di perusahaan. Ruang lingkup (*scope*) kegiatan audit semakin luas, pada saat ini tidak sekedar audit keuangan (*financial audit*) dan audit ketaatan (*compliance audit*), tetapi perhatian lebih ditujukan pada semua aspek yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan pengendalian manajemen serta memperhatikan aspek resiko bisnis/manajemen. Perubahan orientasi audit dari teknik-teknik pengendalian intern ke arah pengendalian bisnis perusahaan yang didasarkan atas resiko bisnis (*business risk*) atau manajemen resiko (*risk management*) ini akan terus berjalan seiring dengan kebutuhan perusahaan yang semakin kompleks di masa mendatang. Oleh karena itu saat ini berkembang pendekatan teknik audit dalam internal auditing yang berbasis risiko (*risk based internal auditing*) (Reksohadiprojo, 2010).

3. Pengertian Fraud

Dalam lingkungan Auditor istilah Fraud adalah kata yang sudah tidak asing lagi. Fraud dapat didefinisikan sebagai "suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Fraud dapat dicegah dengan melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang baik. Akan tetapi semua system, aturan dan prosedur yang dibuat akan sangat dipengaruhi oleh manusia yang menjalankannya (Ningrat, 2010).

The Institute of Internal Auditor (IIA) menyebutkan kecurangan adalah meliputi serangkaian tindakan-

tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan individu atau kerugian organisasi.

Dalam kaitan dengan mengidentifikasi kecurangan yang dapat terjadi maka auditor harus mampu melakukan hal-hal seperti berikut ini:

- a. Mengkaji system pengendalian intern untuk menilai kekuatan dan kelemahannya
- b. Mengidentifikasi potensi kecurangan berdasarkan kelemahan yang ada pada system pengendalian intern.
- c. Mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi-transaksi diluar kewajaran
- d. Membedakan faktor kelemahan dan kelalaian manusia dari kesalahan yang bersifat fraud.
- e. Berhati-hati terhadap prosedur, praktik dan kebijakan manajemen

4. Jenis dan pelaku fraud

- a. Employee embezzlement (*occupational fraud*). Kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam organisasi, biasanya untuk keuntungan pribadi. Misalnya: membuat transaksi fiktif, membuat/merubah dokumen untuk keuntungan pribadi
- b. Management fraud, Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bisa untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan. Misal: merekayasa laporan keuangan, membuat kontrak fiktif.
- c. Pihak luar, Kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan atau pemasok, misalnya membuat penagihan ganda, menjual barang dengan harga tinggi dibanding kualitas barang.

5. Faktor yang memicu fraud

Dalam melakukan pendeteksian terhadap kecurangan tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya fraud. Hal-hal yang menjadi pendorong seseorang atau kelompok orang melakukan kecurangan dipengaruhi 3 (tiga) unsur pendukung yang juga biasa disebut Fraud Triangle adalah:

- a. Adanya Tekanan (*perceive pressure*)
Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan antara lain:
 - 1) Masalah keuangan, seperti tamak, hidup melebihi kemampuan, banyak hutang, kebutuhan tak terduga
 - 2) Sifat buruk, seperti penjudi, peminum, pecandu narkoba
 - 3) Hubungan dengan pekerjaan, seperti kurang mendapat perhatian, kondisi kerja yang buruk
 - 4) Lain-lain, seperti tekanan dari keluarga
- b. Adanya kesempatan (*perceive opportunity*)
Faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang seseorang berbuat kecurangan antara lain:

- 1) Sistem pengendalian intern yang lemah
 - 2) Tidak mampu menilai kualitas kerja
 - 3) Kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi
 - 4) Gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku kecurangan
 - 5) Lalai, apatis
 - 6) Kurang atau tidak adanya audit trail
- c. Adanya alasan pembenaran (*rationalization*)
- Faktor-faktor yang mendorong seseorang mencari pembenaran atas tindakannya melakukan kecurangan, antara lain:
- 1) Mencontoh atasan atau teman sekerja
 - 2) Merasa sudah berbuat banyak kepada perusahaan
 - 3) Menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa
 - 4) Dianggap meminjam, pada waktunya akan dikembalikan

Dengan bertitik tolak dari tiga elemen (*fraud triangle*) mengapa seseorang melakukan kecurangan, dapat disimpulkan ada dua unsur yang menentukan terjadinya kecurangan, yaitu manusia dan sistem pengendalian dalam organisasi (Yayasan Pendidikan Internal Audit, 2008).

6. GONE Theory

Merupakan singkatan *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan) dimana faktor *greed* dan *need* berhubungan dengan individu (pelaku kecurangan) sedangkan *opportunity* dan *exposure* berhubungan dengan organisasi (korban perbuatan kecurangan).

Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam faktor generik dan faktor individu.

7. Faktor Generik

Faktor ini berada dalam pengendalian organisasi (perusahaan) yang mencakup:

- a. Kesempatan (*opportunity*)
- b. Kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap obyek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan. Usaha untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kecurangan secara keseluruhan menjadi tidak ekonomis dan tidak produktif selama perusahaan tersebut masih memiliki aset, dimana aset tersebut diperdagangkan, mengalir dan ada dalam pengendalian pihak lain seperti karyawan, pembeli dan penjual.
- c. Kemungkinan bahwa kecurangan akan dapat diketahui dan diungkapkan (*exposure*)
- d. Kondisi saat ini ada kecenderungan makin tipisnya kepekaan seseorang/sekelompok orang terhadap kecurangan yang terjadi disekelilingnya. Hal ini mungkin dipicu oleh

kekhawatiran mereka khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengungkapkan terjadinya kecurangan tersebut. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka secara logika kecurangan makin merajalela, karena pelaku kecurangan tersebut merasa bahwa kecurangan apapun yang mereka lakukan tidak ada pihak lain yang berani mengungkapkannya,

- e. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku jika tertangkap dan perbuatannya terungkap (*exposure*)

Terungkapnya kecurangan belum cukup untuk mencegah terulang kembalinya kejadian tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu harus ada sanksi atas perbuatan tersebut yang jelas. Tegas dan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Suatu perusahaan yang ingin melindungi assetnya harus memiliki kebijakan (*policy*) yang jelas mengenai sifat dan besarnya sanksi terhadap pelaku kecurangan seperti:

- a. Siapapun yang terlibat kecurangan akan dipecat
- b. Semua kecurangan akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang

8. Faktor Individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang yang melakukan kecurangan. Secara umum faktor ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a. Moral yang berhubungan dengan keserakahan (*greed*).
- b. Keserakahan berhubungan dengan atribut seseorang. Sebagaimana dengan atribut lainnya yang ada dalam diri manusia seperti kejujuran, integritas, loyalitas dan sebagainya adalah sulit untuk mengetahui apakah seseorang memiliki atribut serakah ini atau tidak.
- c. Motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan (*need*).

Salah satu yang menjadi penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan kecurangan adalah berhubungan dengan kebutuhan ekonomi. Disamping itu kecurangan juga dapat disebabkan oleh adanya perasaan ketidakpuasan atas kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen, balas dendam dan tantangan.

9. Sawyer Theory

Menurutnya faktor pemicu fraud ada tiga yang bersifat kolektif dan dapat terjadi dengan tingkatannya yang berbeda-beda yaitu:

- a. Situasi akan kebutuhan
- b. Disebabkan oleh alasan keuangan karena pengeluaran atau kerugian uang yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut. Misalnya: keluarga sakit, suka berjudi, perselingkuhan, kerugian usaha atau investasi, kecelakaan.

- c. Lingkungan yang mengundang terjadinya penggelapan
- d. Hal ini biasanya merupakan situasi dimana lemah nya atau tidak adanya kontrol atau dimana terdapat kontrol tetapi tidak berfungsi. Seringkali kondisi ini terungkap melalui situasi yang tidfak disengaja ketika seseorang karena suatu kesalahan menyadari bahwa ia telah menerima uang secara tidak benar, meskipun uang tersebut ia peroleh secara tidak sengaja dan bahwa kontrol yang seharusnya mencegah kejadian tersebut tidak ada atau tidak berfungsi.
- e. Karakteristik perilaku seseorang
- f. Kedua kondisi diatas dapat terjadi namun jika individu tersebut memiliki sifat jujur yang tinggi, kecurangan tidak akan dilakukan. Jika unsur pertama ditambah unsur kedua terjadi dapat pula merubah perilaku dasar seseorang untuk menjauhi hal-hal seperti itu dan membuka pintu terjadinya penyelewangan.

Auditor Internal harus selalu mengingat faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud dan menyadari bahwa fraud dapat terjadi dari tingkatan rendah hingga tingkatan tinggi.

10. Mencegah terjadinya fraud

Dengan bertitik tolak pada penyebab mengapa seseorang melakukan kecurangan, dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur yang menentukan terjadinya kecurangan yaitu manusia dan sistem pengendalian internal.

Hal diatas dapat dilakukan dengan:

- a. Membangun budaya jujur, terbuka dan pemberian bantuan
Untuk melakukannya dapat dimulai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan karyawan yang jujur
 - 2) Menciptakan lingkungan/suasana kerja yang positif
 - 3) Penerapan kode etik dan aturan perilaku
 - 4) Pemberian program bantuan bagi karyawan yang membutuhkan
- b. Membangun sistem pengendalian intern yang efisien dan efektif
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) menetapkan 5 (lima) komponen struktur pengendalian intern yang harus dilaksanakan, yaitu:
 - 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*)
Adalah tindakan, kebijakan dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap dari top manajemen sampai karyawan terbawah terhadap nilai-nilai integritas, kejujuran, kesetiaan, kedisiplinan, dedikasi dan loyalitas.
 - 2) Penilaian resiko (*risk assessment*)
Perusahaan harus menetapkan tujuan dengan memperhatikan aspek keuangan serta kegiatan lainnya agar beroperasi

secara terkoordinasi dengan mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola risiko yang diperkirakan akan terjadi.

- 3) Aktivitas pengendalian (*control activities*)
Adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Aktivitas pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas, sistim otorisasi, pengecekan independen, pengamanan fisik dan pendokumentasian dan pencatatan yang cukup.
- 4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
Ketentuan-ketentuan dan peraturan serta kode etik mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan karyawan harus dikomunikasikan ke seluruh jajaran dalam perusahaan.. Komunikasi harus secara konsisten dilakukan dalam berbagai forum seperti pelatihan, diskusi, rapat dan lain-lain.
- 5) Pemantauan (*monitoring*)
Pemantauan kegiatan pengendalian internal secara periodik harus dipantau oleh manajemen yang meliputi penilaian dari kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan.

Dalam meminimalkan risiko yang akan timbul perusahaan harus memastikan fungsi system pengendalian internal sangat diperlukan beserta jajaran manajemen sehingga apa yang menjadi tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Untuk mewujudkan tujuan ini melalui program yang di jalankan oleh Divisi Pengendalian Internal yang tidak laian adalah Internal Auditor, maka unit kerja tersbut membutuhkan pula sumber daya manusia yang handal, berkualitas guna menjalankan segala bentuk aktivitas yang ada dalam perusahaan ini.

Banyak kendala-kendala yang masih dihadapi oleh manusia sebagai sumber daya dalam proses pembangunan di perusahaan. Masalah-masalah terrsebut dapat diidentifikasi sebagai berikut; politik, budaya, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan kepegawaian yang merupakan salah satu hambatan besar bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis di sini adalah sejauhmana peranan pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas di PT ALARSY. Lemahnya pengendalian akan berdampak berbagai risiko yang akan timbul yang mengakibatkan aktivitas dan tujuan manajemen atau perusahaan tidak bisa tercapai.

Dengan menganalisa peran pengawasan internal dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan manajemen yang diharapkan, diharapkan bisa bermanfaat untuk manajemen perusahaan sebagai

dasar penentuan *corrective action* dalam proses aktivitas perbaikan kinerja. Dengan berorientasi pada meminimalkan risiko-risiko yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu juga dengan mengetahui cara proses pengawasan yang baik dan pendekatan fungsi pengawasan internal yang maksimal diharapkan tidak ada kekhawatiran pada *auditee* yang merupakan entitas yang akan diaudit untuk tidak menjadi momok ketakutan namun berfungsi sebagai konsultan dalam menilai sejauh mana risiko harus di mitigasi dalam prosesnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara observasi di kantor pusat kedalam proses di PT. ALARSY dan sampel data Area Kalimantan. PT ALARSY merupakan perusahaan Perusahaan bergerak dalam bidang logistik dimana untuk area Kalimantan berpusat di Balikpapan dan mempunyai kantor perwakilan di: Samarinda, Batu Kajang, Tarakan, Tanjung Redep, Sangatta, Banjarmasin, Batu Licin, Tanjung Adaro, Satui, Senakin, Pontianak dan Pangkalan Bun. Penelitian ini merupakan studi peristiwa pada perusahaan *logistic* yaitu melihat proses pengendalian internal terhadap proses pengelolaan system pada perusahaan PT ALRSY. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat pengaruh tujuan perusahaan maupun manajemen. Studi peristiwa dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kualitatif berdasarkan hasil audit internal dan survey observasi.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pengawasan internal atau internal auditor dituntut untuk selalu menjaga dan mencapai tujuan audit. Dalam mencapai hal tersebut auditor memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam tugasnya. Pada PT ALARSY fungsi pengendalian internal sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsinya namun masih terdapat beberapa proses yang tidak ter-*capture* sehingga berdampak pada beberapa proses yang bisa menimbulkan kerugian secara finansial bagi perusahaan.. Hal ini terlihat dari beberapa proses *Mark Up* di PT ALARSY. Hal ini timbul karena belum maksimalnya aktivitas yang dijalankan oleh pengendalian internal secara *contro fuctionl*. Merupakan komunikasi formal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan operasional. Adapun tugas dan tanggung jawab secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager

Bertanggung jawab serta memastikan semua fungsi keuangan, operasional, marketing dan HRD berjalan dengan baik.

2. Finance Accounting (FA) Manager

Bertanggung jawab atas semua aktivitas keuangan agar dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan termasuk melakukan proses pengeluaran uang, melakukan penagihan

kepada pelanggan sekaligus melakukan monitoring terhadap saldo piutang usaha.

3. Human Resources and General Affair (HRGA) Manager

Mempunyai tanggung jawab atas proses kepegawaian seperti rekrutmen, training, kesehatan juga pengurusan perjalanan dinas karyawan seperti pemesanan tiket dan hotel, memastikan semua kebutuhan karyawan akan kebutuhan pekerjaan bisa terpenuhi.

4. Marketing Manager

Bertanggung jawab terhadap kegiatan sales dan marketing di area Kalimantan, menjaga hubungan dengan pelanggan.

5. Operasional Manager

Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional agar dapat berjalan lancar.

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, Operasional Manager membagi dalam tiga aktivitas yaitu:

1. *Air Freight (sky express)* untuk semua kegiatan pengiriman barang melalui udara. Dengan menawarkan pengiriman sehari di berbagai kota di Indonesia untuk dokumen, paket dan kargo. Adapun pengiriman ekspres melalui jalur udara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a. *Same Day Service* adalah Kiriman hari ini diterima di kota tujuan pada hari yang sama (sebelum jam 24.00). *Same Day Service* sudah termasuk asuransi kerusakan dan kehilangan barang sampai dengan Rp 4 juta dan pemberian proof of delivery kepada Pengirim. Eka Sari Lorena memberikan jaminan uang kembali.

Hari layanan : Senin – Jumat Batas waktu terima barang (*Cut of Time*) : Jam 11.00. Jangkauan : Hanya kota-kota yang terdaftar di *price list*, perlunya koordinasi (*Pre Alert*) dengan kota tujuan.

b. *Over Night Service* adalah pengiriman hari ini diterima keesokan harinya sebelum jam 18.00. *Over Night Service* sudah termasuk Asuransi kerusakan dan kehilangan barang maksimum Rp 2 juta. Kami memberikan jaminan uang kembali. Hari layanan : Senin – Jumat Batas waktu terima barang (*Cut of Time*) adalah Jam 12.00. Jangkauan hanya kota-kota yang terdaftar di *price list*. Perlunya koordinasi (*Pre Alert*) dengan Kota tujuan.

c. *Reguler Service Premium* adalah Pengiriman 2 - 5 hari ke kota-kota besar atau kota satelit di seluruh Indonesia. Pengiriman Barang berharga dapat dilindungi dari resiko rusak atau hilang dengan Memanfaatkan jasa Asuransi (menambah biaya Asuransi). Hari Layanan : Senin – Minggu Batas waktu terima barang (*Cut of Time*) adalah Jam 20.00.

Jangkauan hanya kota-kota yang terdaftar di *price list*. Perlunya koordinasi (*Pre Alert*) dengan Kota tujuan. *Pre Alert* digunakan untuk barang yang butuh penanganan khusus, maka harus ada pemberitahuan awal (*pre alert*) kepada kantor cabang atau agen atau perwakilan kota tujuan.

Ketentuan Pengiriman untuk pengiriman via udara adalah sebagai berikut : Berat minimal : 1 Kg Ketentuan Kg : 0.1 – 1.00 = 1 kg 1.1 – 2.00 = 2 kg 2.1 – 3.00 = 3 kg, dst
Wajib Asuransi : Bila barang yang dikirim nilainya melebihi dari nilai asuransi yang ditetapkan. SDS .> 4 Juta ONS > 2 Juta RSP > 1 Juta.

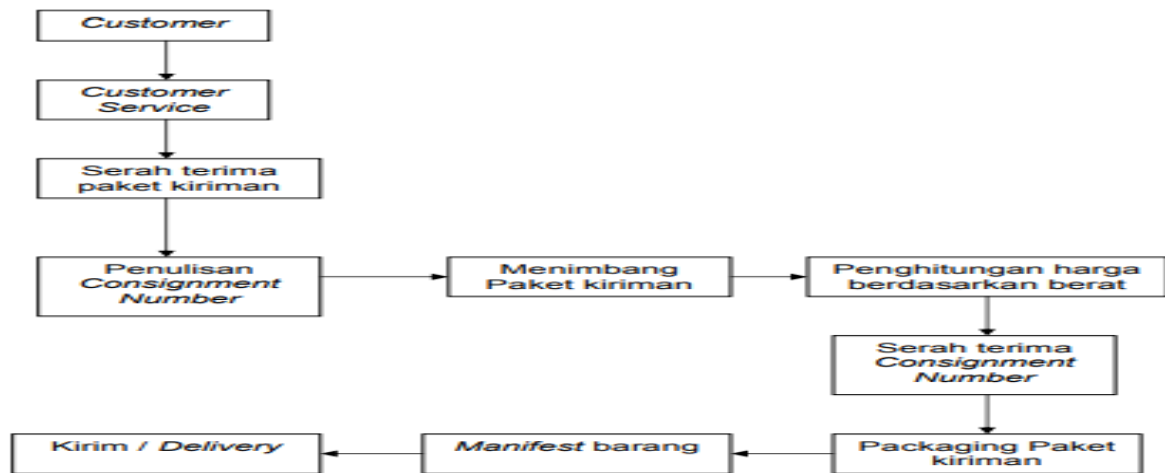
2. *Warehouse* yang berfungsi sebagai tempat transit barang sebelum dikirimkan ke pelanggan. Dalam proses perhitungan biaya peroleha dibayar dimuka ditentukan dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO).
3. *Fleet (road express)* untuk melakukan seluruh proses pengiriman barang melalui jalur darat. Proses pengiriman ekspres melalui jalur darat terbagi menjadi 3 bagian:
 - a. *Reguler Express* adalah Layanan cepat melalui transportasi darat dengan harga kompetitif dan ekonomis untuk pengiriman dengan jangka waktu yang tidak terlalu ketat (*Less Time Sensitive*) dengan minimal berat paket 2 kg. *Regular Express* terdiri dari pelayanan

pengiriman Dokumen, Paket, dan Kargo, yang diperhitungkan sesuai berat pengirimannya. Cara penggunaan tarif Reguler Ekspres adalah : Tentukan jenis pelayanan pengiriman yang akan dipergunakan sesuai dengan berat pengirimannya. Tarif dokumen (1 kg), tarif paket (2 s/d 99 kg), tarif kargo (³ 100 kg)

- b. *Trucking Express* adalah melalui transportasi darat dengan pelayanan cepat dan harga yang ekonomis dengan menggunakan 1 (satu) armada khusus atau tersendiri dan ditujukan pada pelanggan yang memiliki barang pengiriman dalam jumlah besar atau banyak maupun pelanggan yang menginginkan pengiriman dalam 1 (satu) angkutan.
- c. *Vehicle Express* adalah melalui transportasi darat dengan pelayanan cepat dan harga yang kompetitif untuk pengiriman berbagai jenis kendaraan bermotor seperti : sepeda motor, jet ski, gokart, sepeda maupun ATV Motor. Tarif pengiriman ini diperhitungkan dengan berat sebagai berikut : sepeda motor kecil (< 250 cc atau setara dengan 110 kg), sepeda motor besar (³ 250 cc atau setara dengan 300 kg), Jet Ski (setara dengan 300 kg), Gokart (setara dengan 110 kg), sepeda (setara dengan 40 kg), ATV Motor (setara dengan 200 kg).

Untuk pengiriman alat-alat berat (bulldozer, excavator dll) maka sesuai ketentuan daerah yang berlaku wajib menggunakan pengawalan dalam hal ini polisi setempat.

Adapun alur proses Logistik adalah



Gambar 1. Alur Proses Logistik

Tabel 1. Penjelasan Aktivitas Operasional.

KETERANGAN	
TUJUAN JABATAN	Membuat perencanaan, pengelolaan dan monitoring operasional yang berhubungan dengan kegiatan operasional area.
TANGGUNG JAWAB UTAMA	RENCANA
	1. Membuat perencanaan tahunan di area yang meliputi program kerja, anggaran keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas.
	2. Menyusun strategi operasional yang meliputi pelayanan pengiriman, penerimaan barang, pembayaran, administrasi lain terkait pengiriman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses operasional di area.
	PELAKSANAAN
	1. Mengelola aktivitas pengiriman, penerimaan barang, administrasi pengiriman, pembayaran untuk memastikan kegiatan pengiriman yang dilakukan dapat memuaskan customer dan sesuai dengan standar pelayanan,
	2. Mengelola aktivitas pengiriman dengan wilayah lain sehingga barang bisa tiba dan diterima sesuai dengan pesanan.
	3. Menjalin hubungan baik dengan pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan operasional.
	KONTROL
	Memonitor pelaksanaan aktivitas operasional di are untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai serta merencanakan tindakan korektif dan preventif terhadap hal-hal yang menyimpang dari perencanaan,
	RELASI KERJA
	INTERNAL PERUSAHAAN
	1. Senior Manger: koordinasi fungsi keuangan, operasional, marketing dan HRD
	2. Finance Accounting Manager: koordinasi aktivitas keuangan agar dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan termasuk melakukan proses pengeluaran uang, melakukan penagihan kepada pelanggan sekaligus melakukan monitoring terhadap saldo piutang usaha.
	3. Human Resources and General Affair (HRGA) Manager: koordinasi atas proses kepegawaian seperti rekrutmen, training, kesehatan juga pengurusan perjalanan dinas karyawan seperti pemesanan tiket dan hotel, memastikan semua kebutuhan karyawan akan kebutuhan pekerjaan bisa terpenuhi.
	4. Marketing Manager: koordinasi kegiatan sales dan marketing di area Kalimantan, menjaga hubungan dengan pelanggan.
5. Operasional Manager: koordinasi kegiatan operasional agar dapat berjalan lancar.	
EKSTERNAL PERUSAHAAN	
Pihak Ketiga/Customer: penerimaan barang, pengiriman barang, administrasi pengiriman dan keuangan.	
MASALAH DAN TANTANGAN	1. Transaksi dalam jumlah besar baik pengiriman dalam kota maupun luar kota harus tetap di monitoring dengan baik. Hal ini bertujuan untuk tetap mendapat customer untuk pengiriman barang di are.
	2. Kondisi area yang relatif berjauhan antar wilayah memberikan tantangan untuk tetap dapat berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga kegiatan operasional tetap dapat berjalan lancar.
	3. Kondisi area yang berjauhan membutuhkan strategi tersendiri untuk memonitor seluruh.
	4. Mengenai anak buah dalam jumlah relatif besar dan karakteristik yang berdeda-beda, mulai dari <i>back office</i> sampai lapangan. Hal ini membutuhkan skill interpersonal, komunikasi dan pendekatan dalam proses operasional.
	5. Menangani komplain yang cukup berat di limitnya sehingga membutuhkan kesabaran, empati, namun sekaligus aset untuk dapat membantu customer mengatasi permasalahan yang di hadapi.
WEWENANG	1. Memberikan penilaian, teguran serta surat peringatan terhadap bawah.
	2. Memiliki limit authorized approval setiap unit
	3. Menyetujui pengeluaran uang yang menjadi limitnya.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Adapun hasil obeservasi adalah
1.Penerimaan Barang

Tabel 2. Penerimaan Barang

PENERIMAAN BARANG (2018)								
BULAN	FLEET : PAKET EXSPRESS							TOTAL (Rp)
	PIC	REGULER		TRUCKING		VEHICLE		
		Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	
2017								
Januari	ADM	368	4,232,000.00	625	10,937,500.00	259	6,604,500.00	21,774,000.00
Februari	ADM	310	3,565,000.00	789	13,807,500.00	315	8,032,500.00	25,405,000.00
Maret	ADM	370	4,255,000.00	854	14,945,000.00	289	7,369,500.00	26,569,500.00
April	ADM	375	4,312,500.00	763	13,352,500.00	291	7,420,500.00	25,085,500.00
Mei	ADM	391	4,496,500.00	696	12,180,000.00	295	7,522,500.00	24,199,000.00
Juni	ADM	389	4,473,500.00	839	14,682,500.00	298	7,599,000.00	26,755,000.00
Juli	ADM	297	3,415,500.00	887	15,522,500.00	295	7,522,500.00	26,460,500.00
Agustus	ADM	401	4,611,500.00	831	14,542,500.00	294	7,497,000.00	26,651,000.00
September	ADM	425	4,887,500.00	932	16,310,000.00	292	7,446,000.00	28,643,500.00
Oktober	ADM	398	4,577,000.00	795	13,912,500.00	302	7,701,000.00	26,190,500.00
November	ADM	395	4,542,500.00	789	13,807,500.00	307	7,828,500.00	26,178,500.00
Desember	ADM	527	6,060,500.00	813	14,227,500.00	205	5,227,500.00	25,515,500.00
2018								
Januari	ADM	329	3,783,500.00	732	12,810,000.00	213	5,431,500.00	22,025,000.00
Februari	ADM	325	3,737,500.00	763	13,352,500.00	215	5,482,500.00	22,572,500.00
Maret	ADM	301	3,461,500.00	781	13,667,500.00	225	5,737,500.00	22,866,500.00
April	ADM	297	3,415,500.00	785	13,737,500.00	289	7,369,500.00	24,522,500.00
Mei	ADM	267	3,070,500.00	783	13,702,500.00	277	7,063,500.00	23,836,500.00
Juni	ADM	293	3,369,500.00	908	15,890,000.00	276	7,038,000.00	26,297,500.00
Juli	ADM	309	3,553,500.00	866	15,155,000.00	251	6,400,500.00	25,109,000.00
Agustus	ADM	321	3,691,500.00	872	15,260,000.00	310	7,905,000.00	26,856,500.00
September	ADM	318	3,657,000.00	879	15,382,500.00	298	7,599,000.00	26,638,500.00
Oktober	ADM	341	3,921,500.00	752	13,160,000.00	283	7,216,500.00	24,298,000.00
November	ADM	329	3,783,500.00	821	14,367,500.00	292	7,446,000.00	25,597,000.00
Desember	ADM	294	3,381,000.00	839	14,682,500.00	307	7,828,500.00	25,892,000.00

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

2. Pengiriman dan Penerimaan Uang

Tabel 3. Pengiriman dan Penerimaan Uang

BULAN	PROSES PENGIRIMAN BARANG						PERMINTAAN UANG		
	CHECKER			PENENTUAN GUARD			PIC	DIKETAHUI I	DISETUJU I
	PIC	DIKETAHUI I	DISETUJU I	PIC	DIKETAHUI I	DISETUJU I			
2017									
Januari	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Februari	SPV	-	-	SPV	V	-	SPV	V	V
Maret	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
April	SPV	-	-	SPV	V	-	SPV	V	V
Mei	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Juni	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Juli	SPV	-	-	SPV	V	-	SPV	V	V
Agustus	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V
September	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Oktober	SPV	-	-	SPV	V	-	SPV	V	V
November	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Desember	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V
2018									
Januari	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Februari	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Maret	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
April	SPV	V	-	SPV	V	-	SPV	V	V
Mei	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Juni	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Juli	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Agustus	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V
September	SPV	V	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Oktober	SPV	-	-	SPV	V	-	SPV	V	V
November	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V
Desember	SPV	-	-	SPV	-	-	SPV	V	V

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan hasil monitoring selama observasi yang dilakukan diketahui terdapat beberapa catatan dari eksternal auditor group yang menjadi *action plan* tahun berjalan.

Tabel 4. *Action Plan* Tahun Berjalan

NO	UNIT	CATATAN AUDIT
1	KEUANGAN	Berdasarkan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan diketahui masih terdapat pembayaran yang tidak terdapat bukti voucher pembayaran. Hal ini terlihat dari 10 dari 24 sampel berkas transaksi keuangan.
2	PENGIRIMAN	Masih terdapat kelemahan kontrol terhadap proses pengiriman barang. Dimana terdapat kesalahan lokasi dalam pengiriman sebanyak 18 dari 29 sampel berkas pengiriman
3	WAREHOUSE	Untuk unit ini sudah berjalan dengan baik dimana pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang menggunakan prinsip FIFO (first in first out)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Identifikasi Masalah

Kasus yang terjadi adalah dibagian Fleet dimana prosedur yang berjalan sebagai berikut:

1. Bagian administrasi Fleet menerima pesanan pengiriman barang dari pelanggan.
2. Fleet Supervisor memeriksa jenis barang/unit apakah memerlukan pengawalan polisi atau tidak
3. Jika pengiriman barang/unit yang memerlukan pengawalan polisi maka Fleet Supervisor segera menyiapkan personil polisi.
4. Fleet Supervisor mengajukan permintaan uang muka kebagian Finance (Kasir) dengan mengisi form Cash Advance yang disetujui oleh Manager Operasional.
5. Kasir dengan persetujuan FA Manager akan mengeluarkan uang.

Indikasi kecurangan (Fraud)

1. Pembayaran secara tunai langsung kepada Fleet Supervisor

Praktek yang berjalan selama ini semua pembayaran diatas Rp 1 juta maka pembayaran akan ditransfer langsung kepada yang berhak tanpa melalui perantara.

Untuk pembayaran dibawah Rp 1 juta maka yang bersangkutan mengambil langsung kepada kasir, tidak diperkenankan melalui perantara kecuali dalam kondisi dan situasi tertentu dan ada persetujuan Senior Manager juga surat kuasa.

2. Muncul keluhan dari pelanggan melalui pihak Marketing bahwa biaya pengawalan Yang dibebankan perusahaan lebih besar dibanding perusahaan lain

3. Adanya informasi lewat sms gelap bahwa biaya tersebut di mark up oleh Fleet Supervisor.
4. FA Manager sudah beberapa menyampaikan kepada Operasional Manager bahwa prosedur tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, akan tetapi dengan alasan bahwa kegiatan operasional harus tetap berjalan maka pengeluaran uang tetap dilakukan.
5. Perubahan gaya hidup Fleet Supervisor
Dari karyawan lain didapat informasi bahwa yang bersangkutan mempunyai gaya hidup diluar profile dan penghasilan yang didapat. Ybs selalu menggunakan barang-barang ber-merk dan mempunyai 3 (tiga) buah mobil (Honda Freed, Honda City dan Mitsubshi Colt Diesel)

Kasus diatas terungkap jelas pada saat dilakukan klarifikasi dengan petugas polisi bersangkutan yang mengaku bahwa jumlah yang diterima hanya setengah (50%) dari yang dibayarkan perusahaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil laporan audit eksternal yang dilakukan, penulis melakukan analisa sederhana dengan membandingkan hasil observasi lapangan yang ada dengan *table* aktivitas operasional berdasarkan kasus yang terjadi. Data hanya berdasarkan unit yang ada di operation serta keuangan yang dijadikan dasar perbandingan hanya unit yang terkait.

Berdasarkan analisa yang dilakukan maka hasilnya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 5. Data Hasil Presentase Perbandingan

Presentase Proses Pengiriman Barang										
No	Keterangan	CHECKER		GUARD		Presentase Selisih		Presentase Actual		LEVEL
		Standar	Actual	Standar	Actual	CHECKER	GUARD	CHECKER	GUARD	
1	2017	24	4	24	4	83%	83%	17%	17%	🟢
2	2018	24	6	24	2	75%	92%	25%	8%	🟢

Presentase Permintaan Uang										
No	Keterangan	CHECKER		GUARD		Presentase Selisih		Presentase Actual		LEVEL
		Standar	Actual	Standar	Actual	CHECKER	GUARD	CHECKER	GUARD	
1	2017	24	24	24	24	100%	100%	100%	100%	🟢
2	2018	24	24	24	24	100%	100%	100%	100%	🟢

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa proses pengiriman barang baik pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan proses control yang terjadi sangat rendah hal ini terlihat secara persentase actual 2017 sebesar 17% dan 2018 sebesar 8%. Namun bila

dilihat dari jumlah persentase actual 2017 lebih baik dibanding 2018.

Bila ditinjau pada proses pengiriman barang persentase actual 100% baik tahun 2017 dan tahun 2018.

Pada hal kecurangan/ *fraud* yang mungkin terjadi karena masih terdapat beberapa control yang lemah pada prosesnya, terutama pada proses pengiriman barang karena persentase actual proses control

menunjukkan angka yang rendah. Risiko yang timbul bersifat *reputation risk* dan *financial risk*. Risiko kan berpengaruh terhadap nama baik dan jumlah keuangan perusahaan berpotensi terdapat

penambahan namun uang yang seharusnya disetorkan ke perusahaan namun disalah gunakan untuk kepentingan sendiri atau *lapping*.

Tabel 6. Data *Control Level*

Indentifikasi Masalah vs Presentase Actual						
No	Keterangan	Pengiriman Barang		Permintaan Uang		LEVEL
		CHECKER	GUARD	CHECKER	GUARD	
TAHUN 2017						
1	Administrasi Fleet	0.3%	0.3%	0.2%	0.4%	HIGH
2	Fleet Supervisor	0.2%	17%	0.3%	0.3%	HIGH
3	Personil Polisi	17%	17%	100%	100%	LOW
4	Cash Advance	1%	1%	100%	100%	MEDIUM
5	Payment	1%	0.3%	100%	100%	MEDIUM
TAHUN 2018						
1	Administrasi Fleet	0.3%	0.3%	0.2%	0.4%	HIGH
2	Fleet Supervisor	0.2%	8%	0.3%	0.3%	HIGH
3	Personil Polisi	25%	8%	100%	100%	LOW
4	Cash Advance	1%	1%	100%	100%	MEDIUM
5	Payment	1%	0.3%	100%	100%	MEDIUM

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan hasil pengolahan data control berdasarkan bagian dan pada tahun 2017 serta 2018 diketahui terdapat control level yang sangat rendah sehingga memiliki risiko yang cukup tinggi, hal ini bisa terlihat pada unit administasi *fleet* dan *fleet supervisor*. Untuk penentuan *guard* yang menggunakan jasa personel kepolisian dilihat control yang dilakukan sudah baik sehingga risiko penyalahgunaan atau ketidaksesuain menjadi rendah. Untuk *cash advance* dan *payment* control masih bersifat moderat dan risiko penyalahgunaan dan ketidaksesuain juga kemungkinan masih ada. Dengan demikian maka kemungkinan terjadi kecurangan/*fraud* masih mungkin terjadi karena fungsi control masih belum maksimal secara rata-rata. Bila dihubungkan dengan indikasi kecurangan/*fraud* yang sudah atau akan terjadi kemungkinan besar pasti benar. Dan hal ini dibenarkan dengan paparan yang telah dijelaskan diatas. Dimana *fleet supervisor* memiliki unsur-unsur yang mengindikasikan terjadinya kecurangan/*fraud*.

Relevansi teori dengan contoh kasus kecurangan yang terjadi

Teori-teori mengenai kecurangan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II merupakan jawaban apa dan mengapa kecurangan dilakukan.

Baik teori Sawyer dan Gone teori dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan, dengan gaya hidup yang melebihi kemampuan membuat si pelaku mencari cara agar dapat tetap memenuhi kebutuhannya.
2. Kesempatan ,dengan wewenang yang dimiliki dan kedekatan dengan Operasional manajer menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh pelaku,
3. Pengungkapan ,dari kejadian-kejadian kecurangan yang pernah terjadi di perusahaan, ada pelaku yang dikeluarkan tetapi ada juga oleh perusahaan si pelaku di mutasi ke daerah lain. Hal ini membuat pelaku berani mengambil resiko bahwa jika terungkap ada kemungkinan bahwa si pelaku tidak dikeluarkan tetapi hanya dipindahkan.

Menjelaskan kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dalam bentuk algoritma, Pseudocode atau lainnya), bagaimana untuk menguji dan akuisisi data. Deskripsi dari program penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan tersebut dapat diterima secara ilmiah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan masalah serta analisis kasus maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran untuk menghindari terjadinya kembali kasus fraud tersebut.

Kesimpulan

1. Terlalu percaya kepada rekan sekerja.,operasional Manager terlalu percaya kepada Fleet Supervisor sehingga selalu memberikan persetujuan tanpa melakukan cross check informasi lagi sehingga dimamfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kecurangan.
2. Sistem komunikasi belum berjalan secara baik ,dari interview awal didapat informasi dari FA Manager bahwa ybs sudah beberapa kali mengingatkan Operation Manager mengenai adanya prosedur yang salah dalam proses pengeluaran biaya ini. Hal ini akan jauh lebih baik jika melibatkan senior manager sebagai pimpinan tertinggi di tempat tersebut.
3. Tidak adanya kejujuran, integritas dan loyalitas dari karyawan

Sistem yang paling baik sekalipun tidak dapat berjalan bilamana mental dan moral karyawan tidak baik

Saran yang dapat disampaikan dari penulis

1. Sosialisasi kembali SOP yang berlaku, FA Manager melakukan sosialisasi kembali mengenai prosedur pembayaran atau pengeluaran uang sesuai ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Transparan biaya pengawalan ,membuat tarif yang diketahui oleh semua bagian (keuangan, marketing dan operasional) sehingga meminimalisasi terjadinya mark up biaya
3. Pemberian sanksi yang jelas dan tegas, perusahaan belum memiliki sanksi yang mengatur secara jelas bagaimana menindak lanjuti kecurangan yang berlaku. Pada karyawan tertentu ada di keluarkan tetapi ada juga yang hanya di mutasi ke daerah lain.
4. Secara rutin setiap manajer melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk bertemu dengan bawahan nya, dengan melakukan kunjungan maka akan terjalin kedekatan karena karyawan merasa diperhatikan sehingga diharapkan bisa terjalin keakraban. Hal ini bisa mendorong karyawan untuk mau berbicara ke atasan masing-masing jika menemukan masalah baik mengenai urusan perusahaan maupun masalah lain.
5. Pemberian bantuan bagi karyawan yang membutuhkan,saat ini perusahaan tidak mempunyai peraturan mengenai pinjaman kepada karyawan. Mengingat masing-masing area mempunyai kas operasional masing-masing maka hal ini rawan terjadi kecurangan karena dalam keadaan terdesak seperti keluarga sakit, biaya anak sekolah akan meningkatkan tekanan bagi karyawan sehingga sangat mungkin akan melakukan kecurangan.

REFERENSI

- Andi Martias. (2017). Interaksi pengalaman, indenpendensi, kompetensi, etika auditor dan insentif moneter terhadap hasil pemeriksaan. *Konfrensi Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi, 1*, 5–10. Retrieved from <http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/UnivB SI/issue/view/1/showToc>
- Blanchhard, G. . & F. (2013). *System Engineering And Analysis*. (Prentice Hall, Ed.) (4th edisio). New Jaersy: Prentice Hall.
- Hiro Tugiman. (2013). Auditor Internal Wajib Bersertifikat. *Audit Internal YPAIA, 03*(.), 23–27.
- Hogan, W. . (2014). How To Apply TQM To The Internal Audit Fuction. *Internal Auditing, 9*(Winter No.3), 3–14.
- Lawrence B. Sawyer, JD, CIA, PA;
Mortimer A. Dittenhofer, Ph.D.,CIA;
James H. Scheiner, Ph.D., Sawyer's
Internal Auditing, Salemba Empat,
Jakarta 2006
- Martias, A. (2017). Meningkatkan Kualitas Fungsi Audit Internal Melalui Total Quality Management. *Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 1*, B 12-18. Retrieved from <http://seminar.bsi.ac.id/simnasiptek/index.php/simnasiptek-2017/article/view/151>
- Martias, A. (2018). Analisa Dampak Lemahnya Pengendalian Internal Sentra Kas PT . ALKHA atas Pilot Project Pengelolaan CDM Potensi Fraud. *Seminar Nasional Inovasi Dan Tren (SNIT) 2108, 1*, 1–8. Retrieved from <http://seminar.bsi.ac.id/snit/index.php/snit-2018/article/view/19>
- Onong Ichjana Efendy. (2014). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. (CV. Remaja Karya Bandung, Ed.) (1st ed.). Jakarta, Indonesia: CV. Remaja Karya Bandung.
- Soewarno Handaya Ningrat. (2010). *Pengantar Ilmu Studi dan Manajemen*. (CV Haji Masagung, Ed.) (Edisi 1). Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Sukanto Reksohadiprojo. (1986). *Organisasi Perusahaan*. (BPFE Yogyakarta, Ed.) (Edisi 11). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- T Hani Handoko. (1986). *Ilmu Manajemen*. (BPFE Yogyakarta, Ed.) (Edisi 5). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Wruck, H.K. and Jensen, M. . (2013). Science, Specific Knowledge, and Total Quality Management. *Journal of Accounting and Economics, 18*(3), pp.247-87, pp.73–79.
- Yayasan Pendidikan Internal Audit (2008), *Fraud Auditing*
- Yayasan Pendidikan Internal Audit (2008), *Standar Profesi Audit Internal*

PROFIL PENULIS

Andi Martias SE, M.Si, Ak, QIA lahir Palembang, Sumatera Selatan, menyelesaikan SI di Universitas Islam Indonesia di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, S2 di Megister Sience Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM), Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Sriwijaya Palembang (UNSRI) dan Qualified Internal Audit

(QIA) di Yayasan Pendidikan Internal Audit Jakarta (YPIA). Aktif sebagai dosen di Universitas Bina Sarana Informatika, praktisi di perusahaan dan aktif sebagai anggota Internal Auditor di YPIA Jakarta.

Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus?

Arif Farida

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
arif.farida.07@gmail.com

Farida, A. (2019). Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? *Moneter*, 6(2), 39 sd 43.

Abstract - *The purpose of this study is to determine changes in tax compliance in carrying out its tax obligations with an increase in the services of the Directorate General of Taxes (DGT) through the use of technological developments. The research method used in this study is qualitative with a literature study approach. The number of libraries used is 6 articles that discuss the development of technology and tax compliance. The technological developments in question are the e-filing system, e-registration, e-billing, e-payment, and e-SPT. The results of this study indicate that technological advancements utilized by the Directorate General of Taxes (DGT) have had a positive influence on improving tax compliance. Through the DGT e-filing system, it improves services for taxpayers to register, make e-billing, pay, deposit, and report their tax obligations. The e-filing system provides several systems or applications including: e-registration, e-billing, e-payment, and e-SPT. The application provided is proven to have provided increased taxpayer compliance, to be more efficient and on time wherever and whenever.*

Keywords: *Technology Development, Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,9% dari tahun 2017 yakni sebesar 145,4 triliun (Direktorat Penyusunan APBN, 2018) atau sebesar 85,46% pendapatan negara ditopang oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dikutip dari Direktorat Penyusunan APBN (2018), Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Undang-undang Perpajakan tahun 2018 diperkuat terkait keterbukaan akses dan informasi data. Sejak tahun 1980 Indonesia telah merubah sistem perpajakan yang awalnya *official assessment system* menjadi *self assessment system* (SAS). SAS memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk bisa melakukan sendiri yakni: mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Team, 2016). Itu artinya wajib pajak memiliki kewenangan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keinginan wajib pajak. SAS dapat sukses jika wajib pajak sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan adalah masalah perilaku kompleks (Wardiyanto, 2009). Artinya, perlakuan setiap negara akan berbeda karena dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, kebijakan, dan lainnya. Maka Pemerintah hendaknya menumbuhkan kepatuhan *taxpayer* sesuai dengan budaya negaranya (Farida, 2018).

Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang sudah lama (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998),

bahkan permasalahan mengenai penghindaran pajak ada karena adanya kewajiban perpajakan itu sendiri (Alabede, Ariffin, & Idris, 2011), sehingga apabila kebijakan diperbaiki semakin bertambah motif penghindaran pajak, apabila kebijakan tersebut tidak ada pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi yang efektif bagi wajib pajak yang tidak patuh. Misalnya pemberlakuan sanksi pajak yang tinggi, pemerintah berharap wajib pajak akan patuh dengan adanya sanksi pajak yang tinggi namun wajib pajak memandang sanksi tersebut memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dimasa lalu karena takut adanya pemeriksaan dan akan menimbulkan sanksi pajak. Sehingga untuk mengurangi kekawatiran dibuatlah kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Terdapat 2 bentuk penghindaran pajak yakni *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan bentuk penghindaran pajak dengan cara yang tidak menyalahi aturan perpajakan, contohnya *tax plan*. *Tax evasion* yakni bentuk penghindaran pajak yang menyalahi aturan atau melakukan penggelapan pajak. Contoh dari *tax avasion* manipulasi laba perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam pajak. Skema penghindaran pajak adalah urutan transaksi di mana setiap transaksi secara individual patuh namun jika dikumpulkan atau ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan tujuan

penhindaran pajak menurut Hemberg, Rosen, Warner, Wijesinghe, and O'Reilly (2015).

Seiring berkembangnya teknologi Pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penghitungan, penyetoran, sampai dengan pelaporan melalui sistem *e-filing*. Penggunaan *e-filing* atau *electronic Filing System* dalam melaporkan kewajiban perpajakan diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Pengertian *e-filing* adalah sistem yang dibuat oleh DJP kepada wajib pajak (WP) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT yang dilakukan secara elektronik berdasarkan *online* sistem dengan waktu yang sebenarnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan jasa aplikasi di Indonesia yang diutus oleh Dirjen Pajak (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Adanya *e-filing* akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya tanpa harus menunggu lama di DJP, wajib pajak dapat mengisi dimanapun wajib pajak berada dengan waktu yang sebenarnya bahkan pada hari libur.

Selain *e-filing* DJP juga menyediakan sistem *e-registration*, *e-billing*, *e-payment*, dan *e-SPT* (Zulvia, 2018). *E-registration* merupakan aplikasi yang disediakan DJP untuk melakukan pendaftaran, *e-billing* merupakan sistem pengganti SSP, *e-payment* merupakan sistem yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan kode *billing* kepada pihak Bank, dan *e-SPT* adalah sistem yang disediakan oleh DJP kepada WP untuk menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (Virgiawan, Ernawati, & Djajanto, 2019). Perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh DJP untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan WP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP pajak baik kepatuhan formal maupun kepatuhan materiil. Selain sistem pemerintah juga menetapkan kebijakan melalui subjek dan objek pajak untuk memperjelas siapa yang perlu membayar pajak dan transaksi apa yang terhutang pajak.

Selanjutnya pada tahun Pada tahun 2018 Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tahun 2018 Pelaporan SPT melalui *e-filing* meningkat cukup signifikan dikutip dalam berita kementerian keuangan Berita Menteri Keuangan (2018). Ketua menteri keuangan juga menyampaikan bahwa menambahkan untuk tahun ini juga telah terjadi pergeseran dari pengisian SPT Tahunan secara manual ke elektronik atau *e-filing*. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya maka muncul pertanyaan, apakah perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh DJP untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan wajib pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan

kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya peningkatan pelayanan DJP melalui pemanfaatan perkembangan teknologi.

Teori keputusan yang telah disampaikan oleh Hanson dalam Afifah (2013) mengemukakan bahwa teori keputusan adalah mengenai cara manusia dalam keadaan tertentu memilih di antara pilihan yang tersedia secara acak, untuk mencapai tujuan yang hendak diraih. Seperti yang telah disampaikan oleh Hasson dalam Puspitaningtyas (2013) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam pengaruh situasi yang kompleks. Sehingga keputusan merupakan sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan dari berbagai alternatif, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi dua golongan besar, yakni model pembuatan keputusan secara runtut dan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (Puspitaningtyas, 2013). Model pembuatan keputusan secara runtut (*sequential model*) mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan terjadi secara runtut dan linear, sedangkan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (*non-sequential model*) mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linear tetapi sirkuler.

Selanjutnya dalam keputusan mengenai kepatuhan pajak terkait kewajiban kenegaraan. Keputusan kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai keputusan wajib pajak (WP) untuk patuh dalam melaporkan jumlah penghasilan yang sebenarnya dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak (Puspitasari, Susilowati, Nurhayati, & Badjuri, 2016). Ketidakepatuhan pajak diartikan sebagai tindakan WP yang tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, karena disengaja maupun tidak disengaja. Keputusan kepatuhan pajak merupakan sebuah proses yang kompleks (Chan, Troutman, & O'Bryan, 2000). Keputusan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, demografis, perilaku, bahkan variabel kultur. Variabel-variabel tersebut saling berpengaruh dan berinteraksi dalam menentukan bagaimana taxpayers (WP) membuat keputusan kepatuhan pajaknya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dalam pengumpulan data. Metode kualitatif menurut Hanurawan (2016) adalah langkah-langkah

sistematik yang disepakati oleh suatu kelompok ilmiah untuk menyampaikan suatu makna subjektif (*search for meaning*) informan penelitian tentang suatu kejadian yang menjadi objek kajian penelitian bidang ilmu. Studi pustaka menurut Wedhasmara and Efendi (2016) adalah dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku, internet, yang erat kaitannya dengan objek permasalahan.

Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dengan adanya fasilitas teknologi diantaranya sistem *e-registration*, *e-billing*, *e-payment*, dan *e-SPT* yang disediakan Pemerintah (DJP) untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan, dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pemungutan pajak.

Terdapat 7 studi pustaka yang dipilih oleh peneliti yakni;

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak,
2. Pengaruh Penerapan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e- Payment* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang),
3. Pengaruh Penerapan *E-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Menggunakan Pendekatan Tam (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu),
4. Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016),
5. Penguasaan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi Kecenderungan Wajib Pajak Menggunakan *E-Filing*,
6. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaporkan SPT di KP2KP Lumajang,
7. Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Pemahaman Internet dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pemahaman internet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis (Awaloedin & Maulana, 2018). Hal ini disebabkan, karena wajib pajak sudah banyak yang mengetahui

tentang pemahaman dan sosialisasi untuk pemahaman internet mudah di akses dan dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Salah satu perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah adanya sistem *e-filing*.

Hasil penelitian dari Umami (2018) dan Dewi and Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa WP memahami tentang penerapan sistem *e-filing*. Awaloedin and Maulana (2018) juga mengatkan dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan system *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan bagus penerapan system *e-filing*, maka kepatuhan wajib pajak pun akan tinggi. *E-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya, sehingga semakin tinggi kemudahan yang diberikan dengan adanya sistem *e-filing* bagi WPOP, juga menyebabkan peningkatan kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Hal ini juga didukung hasilnya oleh Zulvia (2018) yang menyatakan bahwa *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e- Payment* juga akan memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak. *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e- Payment* merupakan metode pendaftaran, pelaporan, pembayaran (dengan membuat *e-billing* terlebih dahulu) yang ada di Sistem *e-filing*. Bisa dikatakan bahwa *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e- Payment* adalah aplikasi yang ada dalam sistem *e-filing*.

Chusaeni and Oktaviani (2018) menyatakan tentang Penguasaan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi Kecenderungan Wajib Pajak Menggunakan *E-Filing* menunjukkan bahwa ada 3 persepsi wajib pajak yang dapat menunjang keberhasilan system *e-filing* sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertama persepsi kemanfaatan, persepsi ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kecenderungan menggunakan *e-filing*. Hal ini menunjukkan semakin baik persepsi kemanfaatan yang dirasakan maka suatu teknologi semakin dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi yang menggunakannya. Kedua persepsi kemudahan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan menggunakan *e-filing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih mempunyai berminat terhadap sebuah sistem yang mudah digunakan karena tidak membutuhkan waktu lama untuk mempelajari sehingga individu memiliki kesempatan untuk mengerjakan sesuatu berkaitan dengan efektifitas kerja. Ketiga, persepsi penguasaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan menggunakan *e-*

filing. Penguasaan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemanfaatan, kegunaan, dan penguasaan teknologi informasi oleh wajib pajak sangat menunjang keberhasilan system *e-filing*. Keberhasilan system *e-filing* akan pengembangan pemahaman tingkat kepatuhan wajib pajak terutama terkait dengan dampak yang ditimbulkan akan penguasaan teknologi informasi wajib pajak akan produk layanan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem elektronik untuk wajib pajak.

Hasil temuan dari Anton, Agusti, and Anggraini (2018) membuktikan bahwa variabel teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*taxevasion*). Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa adanya kebijakan perpajakan mengenai perbaikan pelayanan tidak mengurangi tindakan wajib pajak dalam melakukan penggelapan. Temuan ini tidak selaras dengan harapan DPJ yakni memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penggelapan pajak dapat dikurangi.

Pernyataan dari Chusaeni and Oktaviani (2018) didukung oleh hasil temuan dari Virgiawan et al. (2019) menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap memiliki pengaruh besar dan pada umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Tujuan utama dari (TAM) sesungguhnya adalah untuk memberikan dasar langkah dari dampak suatu faktor eksternal pada kepercayaan intern (*internal beliefs*), sikap (*attitude*) dan niat (*intention*). TAM mempunyai tujuan menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Model TAM menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pengguna dengan empat variabel yaitu perspektif tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), perspektif kegunaan (*perceived usefulness*), sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*), dan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*).

Berdasarkan penjelasan teori model TAM Virgiawan et al. (2019) maka dibuatlah penelitian mengenai Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Menggunakan Pendekatan TAM (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Pertama, variabel perspektif tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, hal ini membuktikan jika responden akan memanfaatkan sistem aplikasi *e-SPT* dalam pelaporan pajak apabila responden merasa mudah dalam memahami cara pengoperasiannya. Kedua, variabel perspektif kegunaan (*perceived usefulness*) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT artinya responden mempercayai bahwa jika mereka menggunakan *e-SPT* dalam pelaporan pajak akan membantu meningkatkan kinerjanya. Ketiga, variabel perspektif sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, artinya responden merasa terbantu dengan adanya sistem informasi *e-SPT* untuk pelaporan pajak. Keempat, variabel perspektif kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, artinya responden menyatakan ketertarikan dan minat dalam menggunakan sistem informasi *e-SPT* untuk pelaporan pajak.

Pada pengujian simultan yang telah dilakukan yakni di dalam uji F, diperoleh hasil perspektif tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), perspektif kegunaan (*perceived usefulness*), perspektif sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*), dan perspektif kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain, secara tidak langsung teori pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT melalui penggunaan *e-SPT*

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dimuka, peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan. Diantaranya adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memberikan pengaruh positif untuk peningkatan kepatuhan pajak. Melalui sistem *e-filing* DJP meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak untuk mendaftar, membuat *e-billing*, membayar, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-filing* memberikan beberapa sistem atau aplikasi didalamnya diantaranya: *e-registration*, *e-billing*, *e-payment*, serta *e-SPT*. Aplikasi yang disediakan terbukti telah memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak, supaya lebih efisien dan *on time* dimanapun dan kapanpun.

Dengan menelaah hasil dari kesimpulan penelitian di atas, kiranya peneliti perlu memberikan saran sebagai masukan dimasa yang akan datang bagi objek

penelitian, diantaranya adalah: Penelitian selanjutnya hendaknya menyusun jadwal penelitian yang lebih detail untuk mendapatkan data yang lebih banyak untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (WP Badan)..

REFERENSI

- Afifah, N. Y. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Tetap Bekerja di Sektor Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Pujon)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2(2).
- Alabede, J. O., Ariffin, Z. Z., & Idris, K. M. (2011). *Individual taxpayers attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference*. Journal of accounting and taxation, 3(3), 91-104.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). *Tax compliance*. Journal of economic literature, 36(2), 818-860.
- Anton, A., Agusti, R., & Anggraini, L. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Empiris Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 4(1), 1-14.
- Awaloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis)*. Rekayasa Informasi, 7(2).
- Berita Menteri Keuangan. (2018). *Menkeu: Tahun 2018 Pelaporan SPT Melalui E-Filing Meningkatkan Cukup Signifikan*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tahun-2018-pelaporan-spt-melalui-e-filing-meningkat-cukup-signifikan/> website:
- Chan, C. W., Troutman, C. S., & O'Bryan, D. (2000). *An expanded model of taxpayer compliance: Empirical evidence from the United States and Hong Kong*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 9(2), 83-103.
- Chusaeni, B. F., & Oktaviani, R. M. (2018). *Penguasaan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi Kecenderungan Wajib Pajak Menggunakan E-Filing*. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(1), 16-27.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 1626-1655.
- Direktorat Penyusunan APBN, D. J. A. (2018). *Informasi APBD 2018: Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan*. Jakarta.
- Farida, A. (2018). *Misteri Kepatuhan Pajak*. AKUNTABEL, 14(2), 122-128.
- Hanurawan, F. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hemberg, E., Rosen, J., Warner, G., Wijesinghe, S., & O'Reilly, U.-M. (2015). *Tax non-compliance detection using co-evolution of tax evasion risk and audit likelihood*. Paper presented at the Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law.
- Puspitaningtyas, Z. (2013). *Perilaku Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal*.
- Puspitasari, E., Susilowati, Y., Nurhayati, I., & Badjuri, A. (2016). *Postur Motivasi, Pengetahuan dan Perilaku Pelaporan Peer Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Team, M. Z. A. A. R. (2016). *Konsultan Pajak = Pencuri Pajak* Surabaya: Artha Raya.
- Umami, R. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaporkan SPT Di KP2KP Lumajang*. Paper presented at the Proceedings Progress Conference.
- Virgiawan, A. T., Ernawati, W. D., & Djajanto, L. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Menggunakan Pendekatan Tam (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, dan Keuangan.
- Wardiyanto, B. (2009). *Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007)*.
- Wedhasmara, A., & Efendi, R. (2016). *Implementasi Metode Weighted Product Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)*. Jurnal Sistem Informasi, 8(1).
- Zulvia, D. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Spt Dan E-Payment Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Pada Kator Pelayanan Pajak Pratama Padang)*. Farida, A. (2019). Studi Pustaka tentang Perkembangan

Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak:
Apakah Berbanding Lurus? *Moneter*, 6(2), 39
sd 43.

PROFIL PENULIS

Arif Farida, SE.,MA Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, Jurusan Akuntansi. S2 di Universitas Airlangga Surabaya Jurusan Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Perpajakan. Aktif sebagai dosen Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta).

Analisis Kinerja Keuangan Industri Gas Yang Terdaftar di BEJ (Studi Kasus PT. Aneka Gas Industri Tbk)

Dian Indah Sari¹, Slamet Maryoso²

¹ Universitas BSI Jakarta
e-mail: dian.dhr@bsi.ac.id

² Universitas BSI Jakarta
e-mail: slamet.sey@bsi.ac.id

(Sari & Maryoso, 2019)

Sari, D. I., & Maryoso, S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Industri Gas Yang Terdaftar di BEJ (Studi Kasus PT. Aneka Gas Industri Tbk). *Moneter*, 6(2), 45 sd 52.

Abstract - To find out the financial performance of PT. Aneka Gas Industri Tbk uses liquidity ratios, solvency ratios and profitability ratios for the period of 2016-2018 the purpose of this study. The research design used in this study is descriptive quantitative, namely data obtained from the sample population of the study and analyzed according to the statistical method used and then interpreted. From the discussion above it can be concluded that PT. Aneka Gas Industri Tbk The company requires ratio analysis such as liquidity ratios, solvency ratios and profitability ratios to provide an overview of the company's ability to pay debts, the ability to pay debts guaranteed by assets owned and the ability to obtain profits. Based on the calculation of the liquidity ratio, it can be said that the cash held by PT. Aneka Gas Industri Tbk has not been able to pay short-term debt. From the results of calculations using solvability ratios it can be said that companies are able to pay debts guaranteed by assets owned. The results of calculations with profitability ratios can be said that the company has not been able to obtain profits. Based on the calculation results, it can be concluded that the financial performance of PT. Aneka Gas Industri Tbk does not mean that the company has not been able to manage finances well. This can be seen from the liquidity ratio that has decreased, the solvency ratio has increased and the profitability ratio has decreased.

Keywords: Ratio, Analysis, Performance, Finance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia termasuk ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan yang pesat.

Indonesia mempunyai beberapa perusahaan industri terutama perusahaan yang bergerak di bidang gas. Didunia industri terutama perusahaan yang bergerak di bidang gas terjadi persaingan pesat. Perusahaan yang mampu bertahan yaitu perusahaan yang mampu memperoleh laba dan mampu membayar hutang. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik mampu memperoleh keuntungan dan mampu membayar hutang tetapi tidak semua perusahaan mampu memperoleh laba dan mampu membayar hutang. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak mampu mengelola aktiva yang dimiliki dengan baik

dan perusahaan tidak mampu meningkatkan penjualan.

PT. Aneka Gas Industri Tbk adalah perusahaan industri gas pertama di Indonesia. Bisnis utama perusahaan yaitu memasok gas industri seperti gas udara (oksigen, nitrogen, argon), gas sintetis. PT. Aneka Gas Industri Tbk mempunyai laporan keuangan yang cukup baik tetapi manajemen perusahaan tidak memiliki alat analisis untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek, untuk menilai kemampuan membayar utang dan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Alat analisis tersebut yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang segera jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Aneka Gas Industri Tbk menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas periode 2016-2018.

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah proses akuntansi yang mana dicatat, digolongkan dan diringkas dari peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian itu bersifat keuangan atau yang berhubungan dengan uang. laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2014)

Tujuan umum laporan keuangan menurut (Sadeli, Lili, 2014) antara lain :

- Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan, kewajiban.
- Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai yang dapat menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
- Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevan dengan keperluan para pemakainya.

Menurut (Kasmir, 2010) Analisis laporan keuangan perlu dilakukan agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dimengerti oleh berbagai pihak. Hasil dari analisis laporan keuangan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan menurut (Kasmir, 2010) adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini.

2. Analisis Laporan Keuangan

Sedangkan menurut (Kasmir, 2010) “analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.” Dan menurut

(Murhadi, 2015) “analisa rasio digunakan dengan cara membandingkan suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akun lainnya”.

3. Kinerja Keuangan

Menurut (Fahmi, 2013) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle) dan lainnya.

4. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*) berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan) menurut (Kasmir, 2010).

Tujuan dan manfaat hasil dari rasio likuiditas menurut (Kasmir, 2010) antara lain :

- Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
- Untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
- Untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
- Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari komponen aktiva lancar dan utang lancar.
- Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.

Jenis-jenis Rasio Likuiditas menurut (Kasmir, 2010) yaitu :

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*Current Ratio*) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (utang lancar). Menurut (Kasmir, 2010) Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory). (Kasmir, 2010)

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. (Kasmir, 2010)

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}}$$

d. Rasio Perputaran Kas (Cash Turn Over)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya – biaya yang berkaitan dengan penjualan. (Kasmir, 2010)

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

e. Rasio Persediaan Terhadap Modal Kerja (Inventory to Net Working Capital).

Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan aktiva lancar dengan utang lancar menurut (Kasmir, 2010).

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Harta Lancar} - \text{Hutang}}$$

Tabel 1. Hasil Pengukuran Rasio Likuiditas

No	Jenis Rasio	Standard Industri
1	Current Ratio	2 kali (200 %)
2	Quick Ratio	1,5 kali (150 %)
3	Cash Ratio	50%
4	Cash turn over	10%
5	Inventory to net working capital	12%

Sumber: Kasmir (2014)

f. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang menurut (Kasmir, 2010).

Jenis-jenis Rasio Solvabilitas menurut (Kasmir, 2010) yaitu :

1) Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)

Merupakan ratio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva menurut (Kasmir, 2010).

$$\text{Debt to Asset ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aktiva}}$$

2) Debt to Equity Ratio

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas pemilik menurut (Kasmir, 2014). Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan menurut (Kasmir, 2010).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Ekuitas}}$$

3) Long Term Debt to equity Ratio (LTDtER)

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan menurut (Kasmir, 2010).

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total utang jangka panjang}}{\text{Total Equity}}$$

4) Times Interest Earned

Times Interest Earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga menurut (Kasmir, 2010).

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{(EBIT)}}{\text{Biaya Bunga}}$$

Tabel 2. Hasil Pengukuran Rasio Solvabilitas

No	Jenis Rasio	Standard Industri
1	Debt to asset ratio	35%
2	Debt to equity	90%
3	Long term debt to equity ratio (LTDtER)	10 kali
4	Times interes earned	10 kali
5	Fixed charge coverage	10 kali

Sumber: Kasmir (2014)

g. Rasio Profitabilitas

Lebih lanjut menurut (Kasmir, 2010) mengatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Jenis-jenis Rasio Profitabilitas menurut (Kasmir, 2010) yaitu :

1) Profit Margin on Sales

Profit margin on sales atau ratio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan menurut (Kasmir, 2010). Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin , yaitu sebagai berikut :

a) Gross Profit Margin dengan rumus :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Sales}}$$

Gross Profit margin merupakan margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dengan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan menurut (Fahmi, 2013)

b) Net Profit Margin dengan rumus :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{(EAIT)}}{\text{Sales}}$$

Net Profit margin merupakan salah satu rasio

yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan menurut (Fahmi, 2013). Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih menurut (Fahmi, 2013).

2) Return On Investment (ROI)

Menurut (Munawir, 2014) adalah teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

$$ROI = \frac{\text{Laba setelah pajak} \times 100\%}{\text{Total Assets}}$$

3) Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang membandingkan antar laba bersih (net profit) perusahaan dengan aset bersihnya (ekuitas atau modal) menurut (Kasmir, 2010).

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

4) Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock)

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham menurut (Kasmir, 2010).

$$\text{Laba/lbr Shm} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Tabel 3
Hasil Pengukuran Kinerja Rasio Profitabilitas

No	Jenis Rasio	Standard Industri
1	Net Profit margin	20%
2	Return on investment	30%
3	Return on Equity	40%
4	Fixed asset turn over	5 kali
5	Total asset turn over	2 kali

Sumber: Kasmir (2014)

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan mengintrestasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka yaitu memperoleh data yang berhubungan dengan judul penelitian melalui laporan keuangan PT Aneka Gas Industri Tbk seperti neraca, laporan laba rugi serta buku dan jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan keuangan PT Aneka Gas Industri Tbk periode 2016-2019 di www.idx.co.id.

3. Metode dan Teknik Analisis

Metode dan Teknik Analisis digunakan dalam penelitian adalah analisis laporan keuangan yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi (Hery, 2016). Analisis laporan keuangan yang digunakan yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rasio Likuiditas

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

Tabel 4. Rasio Lancar (Current Ratio)

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Rasio Lancar (%)
	(1)	(2)	(3) = (1) : (2)
2016	1.479.828	1.312.711	1,13 kali
2017	1.526.964	1.014.745	1,50 kali
2018	1.585.943	1.297.840	1,22 kali

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan, PT Aneka Gas Industri Tbk memiliki rasio lancar cukup baik karena mengalami peningkatan walaupun mengalami penurunan kembali. Rasio lancar tahun 2016 sebesar 1,13 kali, tahun 2017 sebesar 1,50 kali dan tahun 2018 sebesar 1,22 kali. Tahun 2016 setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan Rp 1,13 aktiva lancar. Tahun 2017 setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan Rp 1,50 aktiva lancar. Tahun 2018 sebesar Rp 1,50 dan tahun 2018 sebesar Rp 1,22.

2. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory).

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Tabel 5. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Ta Hun	Aktiva Lancar (Rp)	Perse diaan (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Rasio Cepat (Rp)
--------	--------------------	------------------	--------------------	------------------

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)- (2)/(3)
2016	1.479.828	295.680	1.312.711	0,90 kali
2017	1.526.964	384.607	1.014.745	1,13 kali
2018	1.585.943	455.625	1.297.840	0,87 kali

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan, PT Aneka Gas Industri Tbk memiliki rasio cepat cukup baik karena mengalami peningkatan walaupun mengalami penurunan kembali. Rasio cepat tahun 2016 sebesar 0,90 kali, tahun 2017 sebesar 1,13 kali dan tahun 2018 sebesar 0,87 kali. Tahun 2016 setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan Rp 0,90 aktiva. Tahun 2017 setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan Rp 1,13 aktiva dan tahun 2018 Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan Rp 0,87 aktiva.

3. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Tabel 6. Rasio Kas (Cash Ratio)

Ta Hun	Kas (Rp) (1)	Bank (Rp) (2)	Hutang Lancar (Rp) (3)	Rasio Kas (Rp) (4) = (1)+(2)/(3)
2016	390.381	80.025	1.312.711	0,36 kali
2017	344.351	80.025	1.014.745	0,42 kali
2018	284.472	80.025	1.297.840	0,28 kali

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan, PT. Aneka Gas Industri Tbk mempunyai rasio kas kurang baik karena untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan harus menjual sebagian aktiva lancar. Rasio kas tahun 2016 sebesar 0,36 kali, tahun 2017 sebesar 0,42 kali dan tahun 2018 sebesar 0,28 kali. Tahun 2016 setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan kas sebesar Rp 0,36. Tahun 2017 setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan kas sebesar Rp 0,42. Tahun 2018 setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan kas sebesar Rp 0,28.

4. Rasio Perputaran Kas (Cash Turn Over)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya – biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

Tabel 7. Rasio Perputaran Kas

(Cash Turn Over)				
Tahun	Penjualan Bersih (Rp) (1)	Modal Kerja Bersih (Rp) (2)	Rasio Perputaran Kas (%)Rasio (3) = (1) : (2)	Lancar
2016	1.651.136	1.312.711	0,60 kali	
2017	1.838.417	1.014.745	0,55 kali	
2018	2.073.258	1.297.840	0,66 kali	

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Dari hasil perhitungan, PT. Aneka Gas Industri Tbk mempunyai rasio perputaran kas cukup baik karena mengalami peningkatan setiap tahun. Rasio Perputaran kas 2016 sebesar 0,60 kali, tahun 2017 sebesar 0,55 kali, tahun 2018 sebesar 0,66 kali. Tahun 2016 setiap Rp 1 modal kerja dijamin oleh Rp 0,60 penjualan bersih. Tahun 2017 setiap Rp 1 modal kerja dijamin oleh Rp 0,60 penjualan bersih. Tahun 2018 setiap Rp 1 modal kerja dijamin oleh Rp 0,66 penjualan bersih.

5. Rasio Persediaan Terhadap Modal Kerja (Inventory to Net Working Capital).

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Harta Lancar} - \text{Hutang}}$$

Tabel 8. Rasio Persediaan Terhadap Modal Kerja (Inventory to Net Working Capital)

Ta Hun	Perse diaan (Rp) (1)	Harta Lancar (Rp) (2)	Hutang (Rp) (3)	Rasio Cepat (Rp) (4) = (1)- (2)/(3)
2016	295.680	1.479.828	1.312.711	1,77 kali
2017	384.607	1.526.964	1.014.745	0,75 kali
2018	455.625	1.585.943	1.297.840	1,58 kali

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Dari hasil perhitungan, PT. Aneka Gas Industri Tbk mempunyai rasio perputaran persediaan yang mengalami penurunan dan peningkatan. Rasio perputaran persediaan cukup baik. Rasio perputaran persediaan tahun 2016 sebesar 1,77 kali, tahun 2017 sebesar 0,75 kali dan tahun 2018 sebesar 1,58 kali. Tahun 2017 rasio perputaran persediaan mengalami penurunan sebesar 0,02 kali. Tahun 2018 rasio persediaan mengalami peningkatan sebesar 0,83 kali.

B. Rasio Solvabilitas

1. Debt to Asset Ratio

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Tabel 9. Debt to Asset Ratio

Tahun	Total Hutang	Total Aktiva (Rp)	Hasil Debt To Asset Rasio
-------	--------------	----------------------	---------------------------

	(Rp) (1)	(2)	(%) (3) = (1) : (2)
2016	1.312.711	5.847.722	0,22
2017	1.014.745	6.403.543	0,16
2018	1.297.840	6.647.755	0,20

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan Debt to Asset Ratio selama tiga tahun dari tahun 2016 sebesar 22 %, tahun 2017 sebesar 16 % dan tahun 2018 sebesar 20 %. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aktiva perusahaan mampu untuk menutupi utang perusahaan. Artinya utang perusahaan dapat dibiayai oleh aktiva perusahaan.

2. Debt to Equity Ratio

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Tabel 10. Debt to Equity Ratio

Tahun	Total Hutang (Rp) (1)	Modal Sendiri (Rp) (2)	Hasil Debt To Equity Ratio (%) (3) = (1) : (2)
2016	1.312.711	2.760.840	0,48
2017	1.014.745	3.358.010	0,30
2018	1.297.840	3.147.792	0,41

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Hasil dari perhitungan Debt to Equity Ratio dari tahun 2016 sebesar 48 %, tahun 2017 sebesar 30 % dan tahun 2018 sebesar 41 %. Dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun perusahaan mampu membayar utang yang dibiayai dengan modal sendiri. Artinya modal yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk melunasi utang yang dimiliki perusahaan.

3. Long Term to Equity Ratio

$$\text{Long Term to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

Tabel 11. Hasil Long Term to Equity Ratio

Tahun	Hutang Jangka Panjang (Rp) (1)	Ekuitas (Rp) (2)	Hasil Debt To Equity Ratio (%) (3) = (1) : (2)
2016	1.774.171	2.760.840	0,64
2017	2.030.788	3.358.010	0,60
2018	2.202.123	3.147.792	0,70

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Dari perhitungan Long Term to Equity Ratio diperoleh tahun 2016 sebesar 64 % , tahu 2017 sebesar 60 %, tahun 2018 sebesar 70 %. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu membayar utang jangka panjang dengan jaminan modal sendiri. Artinya modal yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk melunasi hutang jangka panjang.

C. Rasio Profitabilitas

1. Profit Margin on Sales

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}}$$

Tabel 12. Profit Margin on Sales

Ta Hun	Penjualan Bersih (Rp) (1)	Harga Pokok Penjualan (Rp) (2)	Penjualan (Rp) (3)	Hasil Profit Margin on Sales (Rp) (4) = (1)-(2)/(3)
2016	1.651.136	887.573	1.651.136	0,46
2017	1.838.417	996.821	1.838.417	0,46
2018	2.073.258	1.133.400	2.073.258	0,45

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan Profit Margin on Sales selama tiga tahun cenderung stabil, tahun 2016 sebesar 46 %, tahun 2017 sebesar 46 %, tahun 2018 sebesar 45 %. Dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun penjualan yang dimiliki perusahaan sebanding dengan harga pokok penjualan. Hal ini dapat dilihat bahwa margin yang dimiliki perusahaan yang berada diatas standar industri. Artinya bahwa Profit Margin on Sales dapat dikatakan baik.

2. Net profit Margin

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Tabel 13. Net profit Margin

Ta Hun	Laba Bersih Setelah Pajak (Rp) (1)	Penjualan Bersih (Rp) (3)	Hasil Net profit Margin (Rp) (4) = (1)+(2)/(3)
2016	72.744	1.651.136	0,04
2017	594.670	1.838.417	0,32
2018	118.462	2.073.258	0,06

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Dari perhitungan Net Profit Margin selama tiga tahun mengalami pasang surut, tahun 2016 sebesar 4 % , tahun 2017 sebesar 32 %, tahun 2018 sebesar 6 %. Tahun 2016 nilai rasio Net Profit Margin perusahaan belum memenuhi standar industri, tahun 2017 memenuhi standar industri dan tahun 2018 nilai rasio belum memenuhi standar industri. Tahun 2016 dan tahun 2018 perusahaan belum dapat menghasilkan laba bersih yang baik. Dapat disimpulkan bahwa PT. Aneka Gas Industri Tbk cukup baik dalam menghasilkan keuntungan.

3. Return on Equity

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

Tabel 14. Return on Equity

Tahun	Laba Bersih Setelah Pajak (Rp) (1)	Total Ekuitas (Rp) (2)	Hasil Return on Equity (%) (3) = (1) : (2)
2016	72.744	2.760.840	0,03

2017	594.670	3.358.010	0.11
2018	118.462	3.147.792	0.04

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Dari perhitungan Net Profit Margin selama tiga tahun mengalami pasang surut, tahun 2016 sebesar 3 %, tahun 2017 sebesar 11 %, tahun 2018 sebesar 4 %. Dapat disimpulkan bahwa rasio Net Profit Margin PT. Aneka Gas Industri Tbk kurang baik karena berada dibawah standar industri.

Tabel 15. Kondisi dan Posisi Perusahaan

JENIS RASIO	2016	2017	2018	STANDAR INDUSTRI
RASIO LIKUIDITAS				
Current Ratio	1,13 kali	1,50 kali	1,22 kali	2 kali
Quick Ratio	0,90 kali	1,13 kali	0,87 Kali	1,5 kali
Cash Ratio	36%	42%	28%	50 %
Cash Turn Over	60%	55%	66%	10 %
Inventory to NWC	177%	75%	158%	12 %
RASIO SOLVABILITAS				
Debt to Asset Ratio	22 %	16 %	20 %	35 %
Debt to Equity Ratio	48 %	30 %	41 %	80 %
Long Term to Equity Ratio	64 %	60 %	70 %	-
RASIO RENTABILITAS				
Profit Margin on Sales	46 %	46 %	45 %	30 %
Net profit Margin	4 %	32 %	6 %	20 %
Return on Equity	3 %	11 %	4 %	40 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 16. Kondisi dan Posisi Perusahaan

JENIS RASIO	2016	2017	2018
RASIO LIKUIDITAS			
Current Ratio	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik
Quick Ratio	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik
Cash Ratio	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik
Cash Turn Over	Baik	Baik	Baik
Inventory to NWC	Baik	Baik	Baik
RASIO SOLVABILITAS			
Debt to Asset Ratio	Baik	Baik	Baik

Debt to Equity Ratio	Baik	Baik	Baik
Long Term to Equity Ratio	Baik	Baik	Baik
RASIO RENTABILITAS			
Profit Margin on Sales	Baik	Baik	Baik
Net profit Margin	Kurang Baik	Baik	Kurang Baik
Return on Equity	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas menunjukkan bahwa PT. Aneka Gas Industri Tbk belum baik dalam meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan.

Dari Hasil perhitungan rasio likuiditas perusahaan selama tiga tahun berada dibawah standar industri. Current Ratio 2016 sebesar 1,13 kali, 2017 sebesar 1,50 kali, 2018 sebesar 1,22 kali. Artinya perusahaan tidak dapat melunasi hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki, dapat dikatakan Current Ratio perusahaan kurang baik. Quick Ratio 2016 sebesar 0,90 kali, 2017 sebesar 1,13 kali, 2018 sebesar 0,87 Kali. Perusahaan mampu melunasi kewajibannya dengan menggunakan aktiva yang sudah dikurangi persediaan, jadi Quick Ratio perusahaan kurang baik. Cash Ratio 2016 sebesar 36 %, 2017 sebesar 42%, 2018 sebesar 28%, Artinya perusahaan tidak dapat melunasi hutang jangka pendek dengan menggunakan kas dan bank yang dimiliki, jadi Cash Ratio perusahaan kurang baik. Cash Turn Over 2016 sebesar 60%, 2017 sebesar 55%, 2018 sebesar 66%. Artinya perusahaan dapat membayar utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan, dapat dikatakan bahwa Cash Turn Over baik. Inventory to NWC 2016 sebesar 177% 2017 sebesar 75%, 2018 sebesar 158%, Artinya modal kerja yang dimiliki perusahaan mampu dibiayai dengan persediaan yang dimiliki, jadi untuk Inventory to NWC perusahaan baik.

Hasil perhitungan menggunakan rasio solvabilitas perusahaan selama tiga tahun berada diatas standar industri. Debt to Asset Ratio 2016 sebesar 22 %, 2017 sebesar 16 %, 2018 sebesar 20 % . Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa total aktiva lebih besar daripada total utang sehingga Debt to Asset Ratio perusahaan baik. Debt to Equity Ratio 2016 sebesar 48 %, 2017 sebesar 30 %, 2018 sebesar 41 % . Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa modal lebih besar daripada total utang jadi Debt to Equity Ratio perusahaan baik. Long Term to Equity Ratio 2016 sebesar 64 %, 2017 sebesar 60 %, 2018 sebesar 70 % . Dari perhitungan diperoleh bahwa modal yang dimiliki perusahaan dapat menjamin utang jangka panjang sehingga Long Term to Equity Ratio perusahaan baik.

Hasil perhitungan rasio rentabilitas perusahaan selama tiga tahun berada dibawah standar industri. Profit Margin on Sales 2016 sebesar 46 %, 2017 sebesar 46

%, 2018 sebesar 45 %. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa perusahaan mampu memperoleh laba jadi untuk Profit Margin on Sales perusahaan baik. Net profit Margin 2016 sebesar 4 %, 2017 sebesar 32 %, 2018 sebesar 6 %. Dari hasil perhitungan selama tiga tahun perusahaan nilai Net profit Margin perusahaan berada dibawah standar industry sehingga Net profit Margin perusahaan kurang baik. Return on Equity 2016 sebesar 3 %, 2017 sebesar 11 %, 2018 sebesar 4 %. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai Return on Equity berada dibawah standar industry sehingga untuk Return on Equity perusahaan kurang baik.

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sipahelut.C.R, 2017) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode 2014-2016) bahwa Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode 2014-2016 bervariasi ada yang diatas rata-rata industri sejenis dan dibawah rata-rata industri sejenis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kaunang, 2013) Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Cipta Daya Nusantara Manado. Jurnal EMBA Vol 1 No.4 Desember, pp 1993-2003 3 bahwa Kinerja keuangan dari perusahaan PT. Cipta Daya Nusantara belum berjalan dengan baik, karena berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, banyak mengalami penurunan hal ini disebabkan pengelolaan keuangan perusahaan belum baik.

KESIMPULAN

1. PT. Aneka Gas Industri Tbk Perusahaan membutuhkan analisa rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas untuk memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam membayar utang, kemampuan dalam membayar utang yang dijamin dengan aktiva yang dimiliki dan kemampuan dalam memperoleh laba.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio likuiditas dapat dikatakan bahwa kas yang dimiliki PT. Aneka Gas Industri Tbk belum mampu membayar utang jangka pendek. Dari hasil perhitungan menggunakan rasio solvabilitas dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu membayar utang yang dijamin dengan aktiva yang dimiliki. Hasil perhitungan dengan rasio rentabilitas dapat dikatakan bahwa perusahaan belum mampu dalam memperoleh laba.
3. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT. Aneka Gas Industri Tbk belum baik artinya

perusahaan belum mampu mengelola keuangan dengan baik. Hal ini terlihat dari rasio likuiditas yang mengalami penurunan, rasio solvabilitas yang mengalami peningkatan dan rasio rentabilitas yang mengalami penurunan.

4. Disarankan agar PT. Aneka Gas Industri Tbk dapat menerapkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas dalam menjalankan operasional perusahaan supaya dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.
5. Disarankan untuk peneliti selanjutnya jika akan menganalisis kinerja keuangan perusahaan agar dapat menambahkan jumlah perusahaan yang diteliti supaya dapat membandingkan diantara beberapa perusahaan yang sejenis.

REFERENSI

- Fahmi, I. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaunang. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Cipta Daya Nusantara Manado. *Jurnal EMBA, Vol 1 No.4*, 1993–2003. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3407/2950>
- Munawir, S. (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Murhadi, W. R. (2015). *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba.
- Sadeli, Lili, M. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sipahelut.C.R, S. M. dan R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di BEI periode 2014-2016). *Jurnal EMBA, Vol 3 No.3*, 4424–4434. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/18641/18160>

PROFIL PENULIS

DIAN INDAH SARI, SE.AK,MM Memperoleh gelar SE.AK dari (UNSRI) Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, lulus tahun 2000. Memperoleh gelas MM dari Pascasarjana Jurusan Manajemen Universitas BSI Bandung, lulus tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Universitas BSI Jakarta.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta

Dedi Suharyadi¹, Rini Martiwi², Eulin Karlina³

¹ Universitas Bina Sarana Informatika
dedi.dsi@bsi.ac.id

² Universitas Bina Sarana Informatika
rini.ntw@bsi.ac.id

³ Universitas Bina Sarana Informatika
eulin.eka@bsi.ac.id

(Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2019)

Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Moneter*, 6(2), 53–60.

Abstract- Motor vehicle tax is still the second largest contributor in regional tax revenue after the Transfer of Motor Vehicle Title Fee (BBN-KB) in the DKI Jakarta area. Therefore PKB needs to be optimized because of its large contribution to tax revenue, given the increasingly rapid growth of motorized vehicles in DKI Jakarta. The purpose of this study was to determine how the influence of Motor Vehicle Tax Against Regional Tax Revenue in BPRD DKI Jakarta. The method used in this study is a quantitative method with a simple linear regression statistical analysis. The results showed that there was a significant influence between motor vehicle tax with local tax revenue of 0,933 or 93,3% while the remaining 0,067 or 6,7% explained other independent variables not included in this study. Based on the correlation test shows a very strong relationship between motor vehicle tax with local taxes of 0,966. Positive correlation shows that if the motor vehicle tax revenue gets bigger then the local tax revenue will increase. The formed regression equation is $\hat{Y} = 2,266 + 0,841X_1$ illustrated that Constants (a) = 2,266 show constant values, where if the variable Motor Vehicle Tax (X1) equals zero (0) then the Local Tax (\hat{Y}) = 2,266. Motor Vehicle Tax (X1) regression coefficient of 0,841 means that if other independent variables have a fixed value and the Motor Vehicle Tax has increased by 1% then the Regional Tax (Y) will have an increase of 0,841.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Local Tax.

PENDAHULUAN

Pajak masih menjadi sumber pendapatan yang paling besar untuk membiayai belanja daerah. Terlebih sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diberlakukannya otonomi daerah membuat setiap daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam

mengatur dan mengelola semua urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018).

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani menyebutkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2013).

Menurut (Mardiasmo, 2011) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis sesuai dengan pembagian administrasi daerah yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah masing-masing dan tidak diserahkan kepada pemerintah pusat. Salah satu bagian pajak daerah yang merupakan hak bagi pemerintah daerah Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar kedua dalam penerimaan pajak daerah setelah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di wilayah DKI Jakarta. Oleh karenanya PKB perlu dioptimalkan karena kontribusinya yang besar terhadap penerimaan pajak, mengingat semakin pesatnya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Salah satu sumber keuangan daerah yang mendapatkan perhatian yang serius untuk terus dikelola dan dimanfaatkan secara intensif oleh pemerintah daerah adalah penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu andalan utama dalam penerimaan pendapatan daerah (Ruma & Jamal, 2013). Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik dan terus memenuhi target sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Muchtar, Abdullah, & Susilowati, 2017).

Menurut (Resmi, 2015), faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukkan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain:

1. Kejelasan dan kepastian
2. Tingkat intelektualitas masyarakat
3. Kulaitas fiskus (Petugas pajak)
4. Sistem Administrasi perpajakan yang tepat

Berikut data jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penerimaan Pajak Daerah di wilayah DKI Jakarta.

Tabel 1. Target dan Realisasi PKB

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2012	4.150.000.000.000	4.106.968.370.530	98,96
2013	4.400.000.000.000	4.605.206.082.027	104,66
2014	5.150.000.000.000	4.979.110.607.650	96,68
2015	6.050.000.000.000	6.090.200.500.774	100,66
2016	7.050.000.000.000	7.143.530.355.999	101,33
2017	7.900.000.000.000	8.005.898.498.574	101,34
2018	8.000.000.000.000	8.552.500.495.393	106,91

Sumber: BPRD DKI Jakarta (2019)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian realisasi dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagian besar telah mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya kecuali di tahun 2012 yang hanya mencapai 98,96 % dan tahun 2014 yang hanya mencapai 96,68 %.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2012	16.525.000.000.000	17.721.493.016.509	107,24
2013	22.618.000.000.000	23.370.213.237.450	103,33
2014	32.500.000.000.000	27.050.949.023.587	83,23
2015	32.581.650.000.000	29.076.926.598.506	89,24
2016	33.100.000.000.000	31.613.197.634.662	95,51
2017	35.230.000.000.000	36.500.782.266.176	103,61
2018	38.125.000.000.000	37.552.701.941.025	98,50

Sumber: BPRD DKI Jakarta (2019)

Sedangkan tingkat capaian penerimaan pajak daerah sebagian tidak mencapai target yang telah ditentukan karena dari beberapa unsur pajak daerah diantaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Hiburan yang tidak memenuhi target.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD DKI Jakarta.

A. Pajak Kendaran Bermotor

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor

yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Adapun arti penting Pajak Kendaraan Bermotor secara umum menurut UU No. 34 tahun 2000 adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan secara khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga negara menyangkut keberadaan hak milik kendaraan bermotor tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, objek pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
 - a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan

Bermotor.

3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (7), dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (9), ditinjau kembali setiap tahun.

Tarif pajak kendaraan bermotor:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
 - d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
 - f. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - g. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
 - h. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
 - i. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
 - j. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
 - k. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
 - l. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - m. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
 - n. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
 - o. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
 - p. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen);
 - q. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
 - a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 - b. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - c. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

Menurut (Siahaan, 2005), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah provinsi. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi tempat pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pembagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi, dengan pertimbangan adalah:

1. 70% menjadi bagian provinsi
2. 30% diserahkan kepada kabupaten/kota

B. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2011) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut ini.

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada jenis pajak daerah memegang peranan penting. Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah. Tarif pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
3. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
4. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
5. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
6. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
7. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

Dan tarif pajak yang dipungut oleh provinsi adalah:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan paling tinggi 5%.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ditetapkan paling tinggi 10%.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%.

Walaupun ditetapkan batasan tarif paling tinggi, terdapat peraturan yang berbeda tentang penerapan tarif pajak daerah kota atau kabupaten. Penetapan tarif pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah kota atau kabupaten, tarif pajak kota atau kabupaten ditetapkan tidak seragam. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak kota atau kabupaten tidak akan mempengaruhi pilihan wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenai pajak.

Penetapan tarif yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penerapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif yang paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya. Termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Dan dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi atau penggolongan tarif berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objek pajak.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
2. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran
3. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
4. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar oleh penyelenggara hiburan
5. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
6. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual harga listrik
7. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual pengambilan bahan galian golongan C
8. Pajak parkir dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir

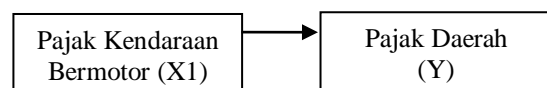
Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Siahaan, 2005):

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \dots\dots\dots (1)$$

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik regresi linear sederhana dengan menggunakan alat bantu IBM SPSS Statistics 21. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sampai dengan 2018.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan variabel bebas (X1) yang diukur berdasarkan besarnya realisasi penerimaannya dan penerimaan pajak daerah sebagai variabel terikat (Y) yang diukur berdasarkan realisasi penerimaannya. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah maka harus dibarengi dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah (2019)

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

1. Analisis Regresi Sederhana

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penganalisaan data-data tersebut adalah analisis regensi. Analisis regresi bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel. Analisis regresi menurut (Sugiyono, 2010) digunakan dengan rumus:

$$Y' = a + bX \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

Y' = Subjek dalam variabel devenden yang diprediksikan

a = Harga Y bila X=0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai sifat tertentu.

2. Koefisien determinasi (R²)

Menurut (Sugiyono, 2010) Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi, dalam *output* SPSS terletak pada tabel *Model Summary* dan tertulis *R square* berkisar nol sampai satu. Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya suatu hubungan, maka dapat digunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 3. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Pajak Daerah adalah sangat kuat karena angka R di atas 0,99. Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pajak Daerah dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 99% sedangkan sisanya 1% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Panjaitan & Simarmata, 2005). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Ruma & Jamal, 2013) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan daerah searah. Artinya, jika pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin besar maka pendapatan daerah akan meningkat. Pajak

terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor roda dua produk Jepang terhadap pendapatan daerah.

1. Hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pajak Daerah.

Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel yang ada yaitu pajak kendaraan bermotor dengan pajak daerah, maka digunakan analisis koefisien korelasi. Hipotesis yang dibuat yaitu:

Ho : Tidak terdapat hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pajak Daerah.

Ha : Terdapat hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pajak Daerah.

Berikut hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu olah data IBM SPSS Statistics 21:

Tabel 4. Korelasi

		PD	PKB
Pearson Correlation	PD	1,000	,966
	PKB	,966	1,000
Sig. (1-tailed)	PD	.	,000
	PKB	,000	.
N	PD	7	7
	PKB	7	7

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel koefisien korelasi di atas didapatkan nilai korelasi antara pajak kendaraan bermotor dengan pajak daerah sebesar 0,966 yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa jika pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin besar maka penerimaan pajak daerah akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Simarmata, 2005) dan (Ruma & Jamal, 2013).

2. Pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Untuk menganalisa pengaruh variabel X terhadap Y maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Ho :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Ha :Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R
1	,966 ^a	,933	,920	

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai R Square atau R² sama dengan 0,933 atau 93,3%

artinya perubahan Pajak Daerah dapat dijelaskan melalui Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan sisanya 0,067 atau 6,7% dijelaskan variabel bebas lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Simarmata, 2005) dan (Ruma & Jamal, 2013).

3. Persamaan Regresi Linear Sederhana yang Terbentuk antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pajak Daerah.

Untuk analisis regresi linear dapat dilihat berdasarkan tabel koefisien berikut:

Tabel 6. Koefisien

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	Sig
1 (Constant)	2,266	1,482		,187
PKB	,841	,100	,966	,000

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel koefisien di atas, untuk perhitungan regresi linear lihat pada hasil *output coefficients* di kolom B yang menunjukkan *constant* = 2,266 dan $X = 0,841$, maka persamaan garis regresinya adalah $\hat{Y} = 2,266 + 0,841X_1$ digambarkan bahwa Konstanta (a) = 2,266 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) sama dengan nol (0) maka Pajak Daerah (\hat{Y}) = 2,266. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) sebesar 0,841 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pajak Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,841.

Nilai Sig. $0,00 < 0,05$, maka model regresi adalah linier dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara pajak kendaraan bermotor dengan pajak daerah sebesar 0,966. Korelasi positif menunjukkan bahwa jika pendapatan pajak kendaraan bermotor semakin besar maka penerimaan pajak daerah akan meningkat.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 0,933 atau 93,3% sedangkan sisanya 0,067 atau 6,7% dijelaskan variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Persamaan regresi yang terbentuk adalah $\hat{Y} = 2,266 + 0,841X_1$ digambarkan bahwa Konstanta (a) = 2,266 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1)

sama dengan nol (0) maka Pajak Daerah (\hat{Y}) = 2,266. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) sebesar 0,841 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pajak Daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,841.

Pemerintah Provinsi DKI diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam penerimaan daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor mengingat terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

REFERENSI

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten barito utara, *1*, 385–399.
- Panjaitan, N. J., & Simarmata, H. M. P. (2005). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah 1), 1–11.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Salemba 4.
- Ruma, Z., & Jamal, A. D. (2013). PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KOTA MAKASSAR. *Economix, 1*.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter, 5(2)*, 7–12.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Moneter, 6(2)*, 53–60.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

PROFIL PENULIS

Dedi Suharyadi, SE, MM. Lahir di Curup dan menyelesaikan study S2 di tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Mulai bergabung di Bina Sarana Informatika dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Artikel Ilmiah yang pernah ditulis adalah Analisis Hubungan Kualitas Produk Dan Persepsi Harga Dengan Kepuasan Konsumen *Product Bundling* Nexian yang terbit pada Jurnal Widya Cipta, Vol. VII, No.1 Maret 2015, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Toko Yoehan Wanaherang Bogor terbit di Jurnal JITK Nusa Mandiri Vol 3 No. 2, Februari 2018, dan Liberal Feminism's Aspect In Katy Perry's Songs yang terbit di Jurnal Progressive Vol. V. No. I September 2017 dan Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sekolah (Studi Kasus Pada SDN 1 Karang Sari Waled Cirebon) pada E-Journal BSI Widya Cipta, Vol. II No. I, Maret 2018, Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor yang terbit pada jurnal Moneter Vol .5 No. 2 Oktober 2018, serta analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit di jurnal Moneter Vol .6 No. 1 April 2019.

Rini Martiwi, SS, MM. Lahir di Jakarta dan saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Bina Sarana Informatika.. Selain mengajar juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) sejak tahun 2017. Menulis artikel pada beberapa jurnal menjadi kegiatan yang rutin dilakukan di setiap semesternya sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan

Tinggi. Beberapa tulisan yang sudah di publikasi antara lain "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sekolah (Studi Kasus Pada SDN 1 Karang Sari Waled Cirebon)" yang terbit pada jurnal Widya cipta Volume II No. 1 Maret 2017 dan "Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor" yang terbit pada jurnal Moneter Vol .5 No. 2 Oktober 2018.

Eulin Karlina, S.Pd, MM, lahir di Cirebon, menyelesaikan S1 tahun 2006 dengan program pendidikan Akuntansi pada Universitas Swadata Gunung Jati Cirebon. Menyelesaikan S2 tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Bekerja di Bina Sarana Informatika dari tahun 2010 sampai sekarang. Selain itu juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) sejak tahun 2017. Artikel Ilmiah yang pernah ditulis adalah Hubungan Locus of Control dan Gaya Kepemimpinan dengan Kepuasan Kerja di Instansi Badan Kepegawaian Negara pada jurnal Perspektif Vol. XII No. 1 Maret 2014 dan Strategi Menghadapi Persaingan Bisnis Melalui Implementasi Strategic Manajemen pada jurnal Widya Cipta Vol. VI No. 2 September 2014, Liberal feminism's Aspect in Katy Perry's Songs pada E-Jurnal Nusa Mandiri, Progressive, Vol. V. No. I September 2017 ISSN 1979-4975, dan Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sekolah (Studi Kasus Pada SDN 1 Karang Sari Waled Cirebon) pada E-Journal BSI Widya Cipta, Vol. II No. I Maret 2018 E-ISSN 2550-0791, dan Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor yang terbit pada jurnal Moneter Vol .5 No. 2 Oktober 2018

Evaluasi Penerapan Tata Kelola Bank Pada PT BPR Eka Bumi Artha

Wangsit Supeno¹, Vina Islami²

¹Universitas Bina Sarana Informatika,
wangsit.wss@bsi.ac.id

²Universitas Bina Sarana Informatika,
vina.vii@bsi.ac.id

(Supeno & Islami, 2019)

Supeno, W., & Islami, V. (2019). Evaluasi Penerapan Tata Kelola Bank Pada PT BPR Eka Bumi Artha. *Moneter*, 6(2), 157–166.

Abstract -The application of good governance of the Rural Bank or BPR banks is an obligation that must be implemented on an ongoing basis. A number of BPR closed operations due to experiencing problems in governance. The increase in the business volume of BPR is increasing the risks involved, thereby encouraging the need for the implementation of governance by BPR. With respect to the issue of the BPR and in order to create a healthy and robust BPR industry, and improve the performance of BPR, protect stakeholders, and improve compliance with legislation, as well as of ethical values that are generally applicable to banking. BPR as a bank financial institution need to implement governance immediately. Financial Services Authority as a regulator in the year 2015 has issued regulation of the Financial Services Authority No. 4/POJK. 03/2015 concerning the implementation of governance for the Rural Bank. The research object for implementing governance in accordance with the Financial Services Authority regulation is BPR Eka Bumi Artha. The research method was done qualitatively with the source of the report on BPR governance of Eka Bumi Artha in 2018 that has been published. The results showed BPR Eka Bumi Artha has implemented the good word, by applying the principles of transparency, accountability, responsibility, Independence, and fairness. From the results of the evaluation as a whole based on the data governance in 2018, BPR Eka Bumi Artha has carried out the governance pursuant to Article 2 regulation of the Financial Services Authority No. 4/POJK. 03/2015 concerning the implementation of governance for the Rural Bank.

Keywords: Evaluation, Application, Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Permasalahan Tata kelola yang baik telah terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia, karena tata kelola yang buruk telah menjadi alasan sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia ditutup. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Deputy Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara yang mengemukakan alasan penutupan BPR dikarenakan BPR berkinerja buruk yang disebabkan oleh kelalaian dalam mengelola BPR dan kasus penipuan (*Fraud*). (Nurdin, 2015).

Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian tata kelola perusahaan yang baik ini penting untuk dilakukan, khususnya di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada saat ini menghadapi persaingan yang ketat dan risiko usaha yang semakin besar. Penelitian ini berhubungan dengan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Peraturan tersebut diterbitkan dengan

mempertimbangkan pada semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin meningkat pula risiko Bank Perkreditan Rakyat sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memperhatikan pada permasalahan BPR serta dalam rangka untuk menciptakan industri BPR yang sehat dan kuat. Selain itu juga, tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola.

Hasil penelitian (Sundari, 2014) atas evaluasi penerapan GCG pada Bank PD BPR Sarimadu, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Sejak pertama kali menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sampai

saat ini berhasil menekan tingkat resiko kredit dengan *trend* semakin menurun.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian (Sawitri & Ramantha, 2018), diperoleh hasil bahwa Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. Hal ini terjadi karena GCG membantu pengelola BPR untuk mengatur bagaimana perusahaan dioperasikan dan dijalankan dengan baik. GCG ini juga adalah sebagai sarana interaksi yang mengatur antar struktur dan mekanisme yang menjamin adanya kontrol, namun tetap mendorong efisiensi dan kinerja pada BPR.

Studi Miswan Gumanti dan Desi Handayani dalam (Dharmawan & Kurniawan, 2018) mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas GCG diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas manajemen bank agar praktik perbankan yang tidak sehat dapat diminimalisir. Apabila bank tidak memiliki manajemen yang baik, dapat menimbulkan risiko operasional baik pada sistem, prosedur maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan pada uraian di atas dan didukung dengan penelitian yang pernah dilakukan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji sejauh mana penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) dalam operasional PT BPR Eka Bumi Artha berdasarkan pada laporan Tata Kelola BPR Eka yang telah dipublikasikan pada tahun 2018.

PT BPR Eka Bumi Artha adalah sebuah lembaga keuangan bank terbesar di Indonesia dan sejak tahun 2011 selalu menerima penghargaan sebagai BPR terbaik. BPR Eka Bumi Artha memiliki kantor pusat di Jl. Ahmad Yani Metro Lampung. Sejak tahun 2017 sampai dengan 2018, sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PT BPR Eka Bumi Artha selalu mempublikasikan laporan penerapan tata kelola perusahaan di *website* PT BPR Eka Bumi Artha yang dapat diakses oleh masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana BPR Eka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang sehat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan perlunya BPR Eka menindak lanjuti aspek-aspek negatif jika ditemukan dalam penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola yang selama ini dilakukan sebab bisa berdampak pada kinerja BPR di masa yang akan datang.

Ruang lingkup penelitian adalah membahas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pada BPR Eka Bumi Artha, dibatasi hanya yang telah terlaksana pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauhmana PT BPR Eka Bumi Artha sebagai BPR

yang memiliki volume usaha sangat besar dan setiap tahun menerima penghargaan atas kinerjanya, telah menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan pada Laporan Tata Kelola PT BPR Eka Bumi Artha tahun 2018.

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebuah lembaga keuangan bank yang operasionalnya diatur dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Supeno, 2019).

Menurut Triandanu dalam (Supeno, 2017) kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun.

Dalam penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparan kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR. Menurut Tjiptono dalam (Riyanto, 2018) definisi kualitas pelayanan berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen.

Menurut Suryani & Sartika dalam (Kurniasari, 2019) Pelayanan pelanggan merupakan penunjang dalam memasarkan produk barang atau jasa yang menitik beratkan kepada upaya pendekatan, keyakinan dan kepuasan konsumen. Dengan pelayanan perusahaan dapat menciptakan kekhususan dalam menjalankan kegiatan usaha dari para pesaing

2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*Independency*), dan juga kewajaran (*fairness*). (Wijayanti & Hutapea, 2019).

Menurut Tjager dalam (Sawitri & Ramantha, 2018), Penerapan *good corporate governance* merupakan suatu kumpulan pemikiran yang bertumpu pada hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu, sehingga tidak memandang perusahaan *public* maupun *non public* tetap harus menganggap bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) bukan hanya sebagai hiasan

tetapi juga sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.

Menurut (Fajri, 2017), dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus mencerminkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan yang diangkat setelah melalui *fit and proper test*, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, dan berhasil maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
- d. Independensi (*Independency*), yaitu suatu keadaan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporas yang sehat.
- e. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan berlaku.

3. Prinsip dan Regulasi Tata Kelola BPR

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Otoritas Jasa Keuangan, 2015), Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan Pasal 2 POJK No. 4/POJK.03 / 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) berbunyi:

- a. BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk:
 - 1). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - 2). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris;

- 3). Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- 4). Penanganan benturan kepentingan;
- 5). Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- 6). Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- 7). Batas maksimum pemberian kredit;
- 8). Rencana bisnis BPR;
- 9). Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 76 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) BPR memiliki kewajiban terkait laporan tata kelola BPR sebagai berikut:

- a. BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada:
 - 1). Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2). Asosiasi BPR di Indonesia; dan
 - 3). 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
- b. Bagi BPR yang telah memiliki situs *web* wajib menginformasikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman (*homepage*) BPR paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember.

Menurut Nganga, Jain and Artivor dalam (Mudashiru, Bakare, Babatunde, & Ishmael, 2014) menyebutkan, "*strengthen corporate governance beyond the distribution of rights and responsibilities of different stakeholders with vested interest in corporate organisations to consider the importance of protection of stakeholders, particularly in relation to how well corporate organisations are managed*". Menurut (Fajri, 2017) diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam sistem manajemen Bank BPR sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Sudah menjadi keharusan bagi manajemen bank untuk menyuarkan *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* sebagaimana prinsip-prinsip GCG yang ada dalam proses manajemen perusahaan yang di akomodasi dari peraturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eka Bumi Artha yang memiliki kantor pusat operasional di Metro Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder bersumber dari *website* BPR Eka Bumi Artha di mana sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR Eka berkewajiban untuk mempublikasikan Laporan

Tata Kelola BPR setiap tahun, laporan Keuangan Publikasi setiap tri wulan, serta informasi terkait lainnya yang bisa diakses. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pelaksanaan tata kelola BPR Eka pada tahun 2018.

Menurut Moleong dalam (Supeno, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Bank

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR Eka sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penelitian ini Penulis meneliti sejauh mana PT BPR Eka menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berdasarkan pada laporan Tata Kelola tahun 2018 yang dipublikasikan pada *website* BPR Eka.

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang telah diterapkan BPR Eka pada tahun 2018 sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Penelitian dilakukan berdasarkan laporan Tata Kelola BPR tahun 2018 terkait transparansi, menunjukkan bahwa BPR Eka telah memiliki Direksi dan Dewan Komisaris beserta tugas dan tanggung jawabnya secara lengkap. Dalam rapat-rapat Direksi secara keseluruhan hadir yang menunjukkan adanya kepatuhan.

BPR Eka membuat laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku secara tepat waktu dan telah mempublikasikannya, baik untuk laporan keuangan triwulanan maupun laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk BPR, dan diaudit oleh kantor akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk laporan keuangan publikasi disajikan dan ditanda tangani oleh Direksi. Dalam hal laporan non keuangan bank, BPR Eka telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas, informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti, penjelasan langsung dari petugas terkait, *banner*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di seluruh kantor.

BPR Eka transparan dalam menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaduan nasabah. Dalam laporan tata kelola BPR Eka selama tahun 2018, terdapat pengaduan 100 nasabah yang telah diselesaikan keseluruhannya. Penerapan transparansi dalam kaitannya dengan

pemegang saham, Direksi selalu mengungkapkan seluruh Kepemilikan Saham BPR Eka. Diungkapkan juga kepemilikan saham para Direksi baik di BPR Eka atau di perusahaan lain. Laporan tata kelola ini juga mengungkapkan hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR Eka. BPR Eka melakukan rapat Direksi dengan Komisaris, menyampaikan RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan telah mendapatkan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris BPR Eka. Dalam laporan tata kelola bank, BPR Eka juga mengungkapkan transparansi mengenai Remunerasi dan fasilitas lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta rasio gaji tertinggi dan terendah Direksi, Komisaris dan Pegawai.

BPR Eka telah menyusun Rencana Bisnis baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang secara transparan, dan selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, BPR Eka dalam usahanya dinilai telah menerapkan prinsip Keterbukaan (*Transparency*) sebagai bagian dalam tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat kepada BPR Eka. Masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui tata kelola BPR Eka, termasuk dapat mengakses kinerja BPR melalui *website* BPR Eka, yang selama ini sudah dikenal baik dan setiap tahun mendapat penghargaan *Infobank Award* sejak tahun 2011.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ BPR sehingga pengelolaan usaha berjalan secara efektif.

Berdasarkan penilaian pada laporan tatakelola Akuntabilitas BPR Eka, dijelaskan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, selaras dengan visi dan misi perusahaan. Jumlah Anggota Direksi BPR Eka berjumlah 3 (tiga) orang dan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015 yang menetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris jumlahnya tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Penugasan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR Eka telah didasarkan pada: Sertifikasi kelulusan profesi BPR (*Certif*); Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan adanya pencatatan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-163/ KO.0741/ 2017 tanggal 13 Juli 2017.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas,

menunjukkan bahwa BPR Eka telah memiliki kejelasan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan didukung pada proses penugasan yang jelas dimulai dari kewajiban mengikuti sertifikasi, *fit and proper* dan pencatatan administrasi sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berupa Akuntabilitas telah dilaksanakan sebagai-mana mestinya sesuai regulasi.

- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Berkaitan dengan prinsip ini, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah dinyatakan Kompeten dalam sertifikasi profesi Direksi BPR yang dikeluarkan oleh Lembaga Profesi Certif, sesuai ketentuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, Direksi dan Komisaris BPR Eka dalam penugasannya telah melalui sebuah proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit & proper*). Penugasan Direksi dan Dewan Komisaris juga sudah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan No.S-163/KO.0741/2017 tanggal 13 Juli 2017.

Seluruh anggota Direksi BPR Eka telah melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan melalui berbagai kegiatan seminar, pelatihan, workshop, dan/atau kegiatan serupa lainnya tentang perbankan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya didukung komite-komite yaitu; Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern, Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, BPR Eka dikelola oleh orang-orang yang kompeten dengan melalui proses uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan, didukung pengembangan dan peningkatan kemampuan yang secara kontinyu dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berupa Pertanggung Jawaban (*responsibility*) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Independensi (*Independency*)
Independensi tata kelola bank yang baik, dijelaskan dalam laporan tata kelola BPR Eka, yaitu mayoritas anggota Direksi, tidak memiliki hubungan kepemilikan, hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi; dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Independensi juga ditunjukkan dengan anggota direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari modal disetor pada BPR Eka dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di

lembaga jasa keuangan non bank.

Dalam hal independensi Dewan Komisaris, mayoritas anggota Dewan Komisaris, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi. Selanjutnya Independensi juga untuk Anggota Komite Audit, yang dalam hal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan dan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Berdasarkan penjelasan independensi di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan BPR Eka dilakukan secara profesional, bebas dan obyektif tanpa pengaruh atau segala tekanan dari pihak manapun. Dengan menerapkan pada prinsip independensi dalam pengelolaan usaha, benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* dapat dihindari dan tidak terjadi pada tahun 2018.

- e. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan (*stake holders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan tata kelola yang baik yaitu Kewajaran, menjadi komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk mematuhi dan menjalankan operasional, dengan menjunjung tinggi semua peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK, LPS dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dan Komisaris menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan pada kewajaran dan/ atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menerapkan prinsip kewajaran terkait gaji, diungkapkan dalam bentuk rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan prinsip kewajaran, menunjukkan bahwa BPR Eka dalam tata kelola bank telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menciptakan kesetaraan. Begitu juga dalam hal penetapan gaji pegawai, BPR Eka didasarkan pada perhitungan yang matang sehingga memperhatikan prinsip kewajaran.

2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola BPR

Penerapan tata kelola bank oleh BPR Eka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. Tata Kelola Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;

Dalam penerapan tata kelola BPR, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BPR Eka,

mengacu pada anggaran dasar BPR, peraturan perundang-undangan, dan termasuk ketentuan OJK yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam laporan tata kelola BPR Eka tahun 2018, menunjukkan bahwa jumlah Direksi BPR Eka telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015. Sesuai jumlah Aset BPR Eka, anggota Direksi minimal tiga orang.

Dalam penugasan jabatan anggota direksi PT BPR Eka Bumi Artha, telah memenuhi Peraturan yang berlaku. Persyaratan yang telah dipenuhi adalah memiliki Sertifikat Kompetensi dari LSP Certif sesuai BNSP, telah lulus dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper*), dan telah didaftarkan dalam pencatatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan No.5-163/KO.0741/2017 tanggal 13 Juli 2017. Selain itu juga dilaporkan pula mengenai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR Eka.

Dalam meningkatkan profesi sebagai Direksi BPR, anggota Direksi melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan melalui berbagai kegiatan seminar, pelatihan, *workshop* dan/atau kegiatan serupa lainnya tentang perbankan untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terinci sehingga dapat dipahami oleh seluruh anggota. Dalam pelaksanaan kepengurusan BPR Eka, di antaranya Direksi wajib mengelola BPR Eka sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar BPR Eka, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Eka di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi telah membentuk paling sedikit: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

Direksi BPR Eka mematuhi peraturan yang berlaku mengenai larangan yang telah disepakati di antaranya anggota Direksi dilarang menggunakan bank Eka untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Eka. Dalam laporan tata kelola BPR 2018, menunjukkan adanya transparansi Direksi dalam hal kepemilikan saham Direksi di BPR Eka dan perusahaan lain.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa BPR Eka telah menerapkan tata kelola yang baik dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara transparan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kompetensi yang dimiliki Direksi dan mematuhi peraturan yang berlaku,

maka tata kelola yang baik dapat diterapkan.

b. Tata Kelola Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam laporan tata kelola BPR Eka tahun 2018, menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris BPR Eka telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015. Berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Eka Bumi Artha yang dituangkan dalam Akte No. 1 tanggal 14 Juni 2017, anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris BPR Eka terdiri atas, jabatan Komisaris Utama bapak Awet Abadi, jabatan Komisaris bapak Muji dan bapak Johansyah Abu Bakar. Diketahui terdapat hubungan keluarga antara Komisaris utama dengan Direktur Kepatuhan.

Dewan Komisaris BPR Eka mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, Peraturan Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia serta memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar BPR Eka.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris BPR Eka dalam Pengawasan Strategis, Dewan Komisaris secara langsung melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Selanjutnya dalam pengawasan strategis, Dewan Komisaris memiliki kewenangan dalam menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB), dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB apakah sudah sesuai atau masih ada kelemahan. Selain itu Dewan Komisaris memastikan Direksi telah menindak lanjuti temuan Audit, dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.

Dalam hal pengawasan perusahaan, maka Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR Eka pada seluruh tingkatan jenjang organisasi. Dewan Komisaris juga dapat membentuk komite-komite yang relevan dengan dibuatkan pedoman dan tata tertib kerja yang jelas dan telah disetujui.

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa BPR Eka telah memiliki tata kelola yang baik dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Kondisi ini yang menjadikan Direksi BPR Eka selalu mendapat pengawasan yang baik dari Dewan Komisaris

sehingga operasional berjalan lancar dan tidak melanggar kebijakan yang telah dibuat termasuk semua peraturan yang mengikat BPR Eka.

c. Tata Kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite;

Dari hasil penelitian terhadap kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite, BPR Eka telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris BPR Eka dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, terkait dengan pengawasan dan evaluasi atas penerapan audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern dan termasuk proses pelaporan keuangan serta penerapan tata kelola yang baik.

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT BPR Eka Bumi Artha dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dan untuk memperoleh keyakinan agar manajemen risiko BPR Eka sesuai prosedur yang ditetapkan, sehingga kegiatan usaha BPR Eka dapat berjalan baik, terkendali dan menguntungkan.

Diungkapkan juga mengenai kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang secara keseluruhan memiliki kesesuaian.

Dalam hal independensi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, secara keseluruhan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan dan keluarga atau semenda dengan derajat kedua dengan; sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan pemegang saham pengendali.

Komite Audit BPR Eka yang terdiri satu orang Ketua Komite dan dua orang Anggota Komite dan telah memiliki rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Komite Audit di antaranya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.

Komite Pemantau Risiko terdiri atas satu orang Ketua Komite dan dua orang Anggota Komite, juga telah memiliki rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang. Komite Pemantau Risiko di antaranya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terkait hasil pemantauan risiko. Tugas lainnya memberikan rekomendasi dengan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Melakukan *Review* penerapan Manajemen Risiko yaitu laporan profil risiko, laporan tingkat

kesehatan bank, laporan lainnya terkait dengan pengelolaan enam jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik.

Berdasarkan pada penelitian dan penjelasan di atas maka BPR Eka telah memiliki sistem dan prosedur tata kelola bank yang baik karena Dewan Komisaris telah diangkat sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya telah membentuk dua komite yang mendukung tugas dan tanggung jawabnya, yang memiliki peran besar dalam terselenggaranya tata kelola BPR yang baik sesuai Peraturan Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan serta perundang-undangan lainnya yang terkait.

d. Tata Kelola Penanganan Benturan Kepentingan; Hasil penelitian pada tahun 2018, BPR Eka tidak terjadi benturan kepentingan. Namun demikian, BPR Eka sudah memiliki strategi dalam penanganan benturan kepentingan, hal ini dilakukan BPR Eka untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan. BPR Eka telah memiliki dan menerapkan kebijakan intern, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, meliputi penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Karyawan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan tidak adanya benturan pada tahun 2018, menunjukkan bahwa tata kelola BPR Eka tergolong baik dan Direksi telah menyusun kebijakan yang tepat dan strategis dan mengikat dalam upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan operasional BPR.

e. Tata Kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit intern, dan Audit ekstern;

Penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan BPR Eka dengan mengangkat Direktur Kepatuhan, sesuai keputusan pemegang saham tanggal 23 Mei 2017 dan telah dilaporkan serta ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Nomor S-163/KO.741/2017 tanggal 13 Juli 2017.

BPR Eka juga telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 098/EBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan menetapkan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.

Penelitian pada laporan tata kelola BPR Eka, fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Eka telah sesuai dengan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, Perundang-undangan dan lembaga lainnya.

Berdasarkan laporan tata kelola BPR Eka juga

- telah mengangkat Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 089/EBA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan menetapkan Kepala Satuan Kerja Audit, dalam rangka untuk membantu Direksi dalam rangka memastikan kepatuhan seluruh jenjang organisasi dalam melaksanakan kegiatan usaha atau operasional. Dalam hal penerapan fungsi Audit Ekstern, Rapat Saham Luar Biasa tanggal 22 November 2018 telah menetapkan penunjukkan Akuntan Publik/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan historis tahun 2018. Sedangkan untuk Audit Ekstern dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan pemeriksaan umum terhadap BPR Eka telah dilaksanakan pada tanggal 06 s.d 16 Agustus 2018, dan terhadap hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari OJK secara bertahap telah dipenuhi dan dilaporkan kembali kepada Otoritas jasa Keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa BPR Eka memiliki tata kelola yang baik sebab telah menerapkan fungsi dan organisasi kepatuhan, Audit Intern dengan baik, sehingga jika menghadapi audit ekstern baik oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk memiliki hasil penilaian yang baik. Direksi BPR Eka memiliki kepatuhan dalam menyampaikan perbaikan-perbaikan laporan hasil temuan dan rekomendasi pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Tata Kelola Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern; Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari laporan tata kelola BPR, berhubungan dengan Penerapan Manajemen Risiko secara komprehensif dan terpadu, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.13/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan Manajemen Risiko BPR Eka meliputi; Pengawasan Dewan Komisaris, Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Limit, yaitu: Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko. Selanjutnya mengenai Kecukupan proses dan sistem dan Pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian yang bersumber pada laporan tata kelola tahun 2018, BPR Eka dalam rangka pengawasan atas penerapan manajemen risiko, Direksi dan Komisaris telah menetapkan organisasi, dan pejabat yang bertanggung jawab, serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Berdasarkan pada penjelasan di atas, BPR Eka telah menerapkan tata kelola bank yang baik dan sehat. Hal ini ditunjukkan dengan diterapkannya Manajemen Risiko dengan kebijakan yang sesuai dengan peraturan dan telah membentuk organisasi dan pejabat yang bertanggung jawab.
- g. Tata Kelola Batas maksimum pemberian kredit; Hasil penelitian terhadap laporan tata kelola BPR Eka tahun 2018 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR Eka, tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan baik perorangan maupun kelompok (*group*). Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur besar, BPR Eka telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Berdasarkan data tersebut maka BPR Eka telah memiliki Tata Kelola yang baik dalam menjaga agar kredit yang diberikan tidak melanggar ketentuan BMPK, baik kepada pihak terkait maupun kelompok. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadikan BPR pada akhir Desember 2018 tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak terkait dan pada posisi Desember 2018 penyediaan kepada 25 debitur besar (inti) dengan outstanding sebesar Rp. 20.618.352.538,- atau 3,30% dari modal dan 0,32% dari total kredit yang diberikan.
- h. Tata Kelola Rencana bisnis BPR; Hasil penelitian pada laporan tata kelola BPR menunjukkan Direksi memiliki tiga tipe rencana bisnis, yaitu Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang. Untuk Rencana Jangka Pendek, memuat strategi pemberian kredit, strategi penghimpunan dana, dan strategi pengendalian kredit bermasalah. Dalam Rencana Jangka Menengah, Direksi menyusun strategi pemberian kredit, strategi penghimpunan dana, strategi pengendalian kredit bermasalah dan strategi pengembangan modal. Selanjutnya dalam Rencana Jangka Panjang, berdasarkan Arah Kebijakan Bank, maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi bank meliputi, strategi pemberian kredit, kebijakan penghimpunan dana, dan strategi perluasan jaringan kantor, strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. Dalam laporan perhitungan laba rugi tahun 2018, perolehan laba BPR Eka telah melampaui target, dimana laba (rugi) neto tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 208.161.028.000,-, pada realisasinya dapat dicapai sebesar Rp. 226.364.525.000,- atau mencapai 108,74%. Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa BPR Eka telah memiliki tata kelola yang baik dalam menyusun rencana kerja baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Rencana kerja ini memberikan gambaran bagaimana Direksi berupaya untuk mewujudkan visi dan misi menjadi BPR yang sehat dan kuat. Dengan rencana kerja yang lengkap akan menjadi

pedoman dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam mencapai target laba 108,74% menunjukkan tata kelola BPR Eka dilaksanakan secara konsisten sehingga memberikan hasil yang terbaik.

i. Tata Kelola Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil penelitian laporan tata kelola BPR tahun 2018, transparansi kondisi keuangan dituangkan secara jelas dan transparan dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Non Keuangan BPR Eka.

Dalam laporan keuangan tahunan di ungkap mengenai ikhtisar data keuangan penting, manajemen dan organisasi, Laporan Direksi atas pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan, tata kelola perusahaan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris. Selain itu juga disajikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah didaftar di Otoritas jasa Keuangan dan dibuat untuk satu tahun buku dan disajikan dalam bentuk perbandingan satu tahun buku sebelumnya dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan keuangan publikasi BPR Eka ditanda tangani oleh Direksi sesuai dengan format yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk dipublikasikan melalui *website* BPR dan/atau pada papan pengumuman pada setiap kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal laporan non keuangan bank, BPR Eka telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas dalam bentuk pelayanan lansung oleh petugas terkait atau melalui *banner*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di seluruh kantor.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa BPR Eka telah melaksanakan tata kelola yang baik dalam hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Dalam transparansi kondisi keuangan telah dibuatkan laporan tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui pemeriksaan Akuntan Publik. Laporan publikasi BPR dibuat sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilaporkan setiap tiga bulan. Laporan publikasi dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui *website* BPR Eka, sehingga dapat menjadi sumber informasi kepada nasabah atau masyarakat umum yang memerlukan informasi keuangan BPR Eka. Dalam laporan non keuangan, BPR Eka telah menginformasikan kepada masyarakat secara langsung maupun media cetak dan internet. Dalam hal pengaduan nasabah BPR Eka telah menanganinya dengan baik sesuai ketentuan pengaduan nasabah.

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola yang dilakukan BPR Eka yang tercantum dalam laporan tata kelola BPR Eka tahun 2018, di samping aspek

positif yang sudah dilakukan, akan tetapi masih terdapat beberapa aspek negatif, yaitu dalam hal struktur dan infrastruktur tata kelola yang belum sepenuhnya tersusun dan masih memerlukan pengkinian data. Selain itu masih terdapat aspek negatif terkait hasil tata kelola dalam penyediaan SDM yang dapat menopang volume usaha BPR yang terus berkembang yang berdampak pada sangat tingginya rasio aset yang dikelola setiap karyawan. Kebaruan penelitian ini dari yang sudah ada adalah dalam penelitian ini penulis lebih spesifik dalam memastikan bahwa BPR Eka Bumi Artha sebagai BPR terbesar di Indonesia dan selalu mendapat penghargaan sejak tahun 2011, terbukti didukung dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian bersumber dari laporan Tata Kelola yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan tata kelola bank tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan BPR Eka Bumi Artha telah melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. BPR Eka Bumi Artha memiliki kepatuhan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
3. BPR Eka Bumi Artha telah melaksanakan seluruh lingkup tata kelola seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh komite yang dibentuk dan diorganisasikan secara tepat dan sesuai peraturan tata kelola, telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Tidak adanya benturan kepentingan yang terjadi selama tahun 2018.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan penerapan tata kelola yang baik, kinerja keuangan BPR Eka tahun 2018 dalam bentuk perolehan laba mengalami peningkatan dan telah melampaui target laba yang direncanakan.

Terdapat beberapa saran peneliti yang perlu menjadi perhatian manajemen BPR Eka yaitu:

1. BPR Eka Perlu melakukan monitoring yang tepat dalam tata kelola manajemen risiko dengan adanya kepastian bahwa kebijakan dan SOP terkait harus selalu dilakukan pengkinian sesuai perkembangan usaha BPR dan peraturan dari

Otoritas Jasa Keuangan, LPS, Bank Indonesia, dan perundangan lainnya yang terkait.

2. Dengan semakin besarnya volume usaha BPR Eka, maka Direksi dalam tata kelola terkait rencana bisnis, perlu dicantumkan secara spesifik strategi pengembangan SDM baik dari kuantitatif maupun kualitatif sebagai modal utama dalam memajukan bisnis BPR Eka dan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi.

Diharapkan penelitian berikutnya dapat membahas mengenai teknis dalam penilaian sendiri (*Self assessment*) atas penerapan tatakelola BPR.

REFERENSI

- Dharmawan, N. K. S., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat: Pendekatan Good Corporate Governance Dan Asas Itikad Baik. *Jurnal Law Reform*, 14(2), 236–247.
- Fajri, D. E. N. (2017). Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jawa Barat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Repository Unpas*.
- Kurniasari, R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pada Hotel Bogor. *Jurnal Widya Cipta*, 3(1), 1–3.
- Mudashiru, A., Bakare, I. A. ., Babatunde, Y., & Ishmael, O. (2014). *Good Corporate Governance and Organisational Performance: An Empirical Analysis*. 4(7), 170–178.
- Nurdin. (2015). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, XII(1), 122–135.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang PenerapanTata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat*.
- Riyanto, A. (2018). Implikasi Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Pada PDAM Cibadak Sukabumi. *Jurnal Ecodemica*, 2(1).
- Sawitri, P. P., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2), 1093–1118.
- Sundari, H. (2014). Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank PD BPR Sarimadu. *Jurnal Sorot*, 9(1), 43–58.
- Supeno, W. (2017). Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Moneter*, IV(2), 121–131.
- Supeno, W. (2018). *Implementasi Kualitas Pelayanan di Era Disrupsi Pada PD BPR Bank Jombang Jawa Timur*. 2(2), 255–262.
- Supeno, W. (2019). Analisis Efisiensi BOPO Terhadap Laba Bersih Pada BPR. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 19(2), 182–194.
- Wijayanti, D., & Hutapea, T. (2019). Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Setelah Diberlakukannya Peraturan OJK Tentang Penerapan Tata Kelola BPR Di Wilayah Kerja Kantor OJK Malang. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 15–23.

PROFIL PENULIS

¹**Wangsit Supeno, SE, MM**, lahir di Jakarta, saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) sejak tahun 2002. Selain mengajar di kampus UBSI, saya menekuni aktivitas sebagai **Trainerpreneur dan Coachpreneur**. Saat ini menjabat Komisaris Utama pada PT Kolaborasi Cahaya Mulia (KCM) di bidang Pengembangan Diri. Aktivitas organisasi menjabat sebagai **Membership Director ASESCO** (Asosiasi ESQ 3.0 Coaching), anggota **The Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH)** dan anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Telah menulis jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui Google Scholar dan Sinta.

²**Vina Islami, S.Pi, MM**, lahir di Bima 25 Desember 1985, menyelesaikan S1 pada Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB) tahun 2008. Tahun 2010 menyelesaikan program Magister Manajemen Bisnis pada Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB – IPB). Mengajar pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) dari Maret 2013 sampai sekarang. Saat ini Jabatan Fungsional Dosen adalah Asisten Ahli Kum 150.

Pengaruh Tingkat Persediaan Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada PT Sepatu Bata, Tbk

Popon Rabia Adawia¹, Ayu Azizah²

¹⁾ Universitas Bina Sarana Informatika
popon.pra@bsi.ac.id

²⁾ Universitas Bina Sarana Informatika
ayu.azz@bsi.ac.id

(Adawia & Azizah, 2019)

Adawia, P. R., & Azizah, A. (2019). Pengaruh Tingkat Persediaan Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada PT Sepatu Bata, Tbk. *Moneter*, 6(2), 167–172.

Abstract - This study examines the effect of inventory levels on economic rentability at PT Sepatu Bata Tbk. Referring to two variables, namely economic rentability as the dependent variable / dependent variable (x) and inventory level as independent variables / independent variables (y). The purpose of this research is to find out whether or not there is a positive and significant influence between inventory level rotation, economic profitability at PT Sepatu Bata Tbk, and to find out how much influence the inventory level has on economic rentability. The research method used in carrying out this research is an associative research method which aims to determine the influence of the two variables studied. This study uses simple linear regression data analysis techniques, while for the hypothesis test statistical tests are carried out with the T test. For the regression equation obtained is $Y = 18.72 - 0.23X$. This study concludes that the inventory does not significantly influence the economic rentability of PT Sepatu Bata Tbk. These results can be seen from tcount of -1.585 and ttable of 2.015, which means that tcount is smaller than ttable. While the influence of inventory variables on economic rentability is 33.4% while the remaining 66.6% is influenced by other variables outside of this study.

Keywords: Inventory, economic rentability, profitability

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang program pemerintah dibidang perekonomian. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ini akan membawa dampak persaingan perdagangan yang ketat, terutama pada perusahaan sejenis. Dengan demikian perusahaan dituntut bekerja lebih efisien supaya dapat tetap bertahan dalam bidangnya masing-masing.

Dilihat dari segi globalisasi persaingan lebih tajam karena untuk masuk ke dalam pasar global, banyak faktor-faktor yang harus ditingkatkan dan diperbaiki. Faktor-faktor tersebut adalah kualitas, ketepatan waktu, dan tentu saja modal. Persaingan global yang dihadapi perusahaan tersebut memaksa para manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang berkualitas berdasarkan fakta-fakta. Laba atau *profit* merupakan salah satu tujuan utama berdirinya setiap badan usaha. Tanpa diperolehnya laba, perusahaan tidak dapat memenuhi tujuan lainnya, yaitu pertumbuhan yang terus-menerus (*going concern*) dan tanggung jawab sosial (*corporate*

social responsibility). Bagi perusahaan yang berorientasi laba, pasti akan selalu berusaha untuk meningkatkan laba yang diperolehnya. Segala macam cara akan ditempuh untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Menurut (Hanafi, 2010), laba adalah ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang didefinisikan sebagai berikut: laba = pendapatan – biaya. Kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) dipengaruhi oleh banyak hal antara lain aspek keuangan yang mencerminkan keberhasilan kinerja perusahaan. Aspek keuangan salah satunya dapat terlihat didalam laba (Suratminingsih, 2018).

Rasio rentabilitas atau yang dikenal juga dengan rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Hery, 2015). Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasikan laba selama periode tertentu (Riyanto, 2016). Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja belum cukup untuk mengukur apakah perusahaan tersebut telah bekerja dengan efisien atau belum. Efisien baru dapat

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung rentabilitasnya. Bagi perusahaan rentabilitas merupakan kemampuan manajemen dalam menggunakan *operating assets* secara efisien dan mampu memperoleh laba sebesar-besarnya, sehingga perusahaan dapat menjalankan produksi/usaha dengan lancar dan tidak mengalami hambatan. Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi dan memaksimalkan rentabilitasnya. Untuk dapat mencapai tingkat rentabilitas yang maksimal dari suatu perusahaan tidak lepas dari pengelolaan modal kerja.

Persediaan adalah elemen modal kerja yang sangat penting pengelolaannya untuk mencapai tingkat rentabilitas yang maksimal. Persediaan sebagai salah satu aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun manufaktur. Sebagaimana dikemukakan oleh Yunus dalam (Adawia, 2018) bahwa persediaan dikategorikan sebagai barang dagangan yang dimiliki dan disimpan untuk dijual kepada pelanggan (*customer*). Dimana harga pokok penjualan atas barang dagang yang dijual merupakan pengurang terbesar dari hasil penjualan tersebut yang nantinya akan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Semakin tinggi tingkat persediaan menunjukkan semakin tingginya volume penjualan. Dengan demikian resiko serta biaya persediaan dapat diminimalkan, misalnya biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan serta resiko susut atau kerusakan. Semakin tinggi laba yang diterima maka tinggi pula rentabilitas ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan tingkat persediaan terhadap tingkat pencapaian profitabilitas, dalam hal ini adalah rentabilitas ekonomi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 pada PT. Sepatu Bata, Tbk.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asosiatif dengan jenis kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat (pengaruh). Penelitian ini menjadikan PT Bata Tbk sebagai objek penelitian dengan mengambil data laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Untuk sumber data merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2012) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek/subjek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan data dan informasi keuangan PT Sepatu Bata Tbk. mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive, yaitu dengan kriteria-kriteria berikut :

- 1) Perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator – indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menunjang hasil penelitian tersebut, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara :

a. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan digunakan untuk melengkapi landasan teori yang dilakukan dengan cara membaca buku pustaka, referensi koran, serta hasil penelitian terdahulu agar diperoleh pengetahuan tentang yang diteliti sehingga dapat memecahkan masalah penelitian dengan cara yang cepat dan tepat.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian. Dokumen tersebut berupa data informasi keuangan PT Sepatu Bata Tbk. yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

c. Hipotesis Statistik

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan, maka bentuk pengujian hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ho : $\beta = 0$, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat persediaan dengan rentabilitas ekonomi PT Sepatu Bata Tbk.

Ha : $\beta \neq 0$, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat persediaan dengan rentabilitas ekonomi PT Sepatu Bata Tbk.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier sederhana, sedangkan untuk uji hipotesis dilakukan test statistik dengan uji T. Selain itu digunakan uji koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya variasi yang diturunkan oleh variabel X, dalam penelitian ini adalah data *time series*. Menurut (Umar, 2014) data *time series* merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, ataupun tahunan.

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mencari seberapa besar perhitungan tingkat persediaan dan pengaruhnya terhadap rentabilitas ekonomi dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (x) dengan variabel dependen (y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Sumber : (Sugiyono, 2012)

Dimana:

Y = variabel tak bebas

a = bilangan konstanta

b = koefisien arah garis

X = variabel bebas X

Dimana nilai a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum y) - b(\sum x)}{n}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

b. Koefisien Korelasi Parsial

Korelasi adalah indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan, meliputi kekuatan hubungan dan bentuk atau arah hubungan. Untuk mengetahui perhitungan tingkat persediaan dan hubungannya terhadap rentabilitas ekonomi PT Sepatu Bata Tbk. digunakan analisis korelasi dengan rumus *product moment* yaitu sebagai berikut :

$$r_{yx} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen

X = Variabel Independen

n = Jumlah data

b = Koefisien korelasi

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variasi (naik/turunnya) variabel terikat. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh perhitungan tingkat persediaan terhadap rentabilitas ekonomi yang dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinasi (*coefficient of determination*) sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Nilai Koefisien Determinasi

r = Nilai Koefisien korelasi

d. Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk menentukan atau menyimpulkan hasil penelitian, maka perlu diuji terlebih dahulu apakah r (koefisien korelasi) yang telah dilakukan diatas berarti atau tidak. Untuk mengetahui keberartian koefisien korelasi tersebut digunakan uji t dengan rumus :

$$t_{hit} = \frac{r \sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan : t = Nilai uji t

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Dengan ketentuan tingkat kesalahan (α)=0,05

dengan rumus: derajat bebas (db) = n-2

Dengan criteria pengujian sebagai berikut:

- Ho diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

- Ho ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis peneliti menggunakan data tingkat persediaan dan rentabilitas.

1. Analisis Tingkat Persediaan PT Sepatu Bata Tbk

Tingkat persediaan menunjukkan persentase seberapa besar kenaikan atau penurunan nilai persediaan dalam kurun waktu tertentu. Jadi untuk mengetahui nilai tingkat persediaan PT Sepatu Bata Tbk. yaitu menghitung nilai kenaikan atau penurunan persediaan tahun sebelumnya dengan nilai persediaan setelahnya lalu dibandingkan dengan nilai persediaan tahun setelahnya.

Berikut merupakan perhitungan tingkat persediaan PT Sepatu Bata Tbk dari tahun 2010 hingga tahun 2016.

Tabel 1. Persediaan PT. Sepatu Bata Tbk Tahun 2009 – 2016 (dalam ribuan Rp)

Tahun	Jumlah Persediaan
2009	153.761.143
2010	191.217.901
2011	193.997.433
2012	221.854.075
2013	281.405.718
2014	314.628.156
2015	282.546.591
2016	324.917.517

Sumber : Laporan Keuangan PT. Sepatu Bata Tbk periode 2009 – 2016

Sedangkan unuk tingkat persediaan tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebagai variabel X adalah sebagai berikut:.

Tabel 2. Tingkat Persediaan PT. Sepatu Bata Tbk Tahun 2010-2016

Tahun	Nilai Tingkat Persediaan (%)
2010	24.36
2011	1.45
2012	14.36
2013	26.84
2014	11.81
2015	-10.20
2016	15.00

Sumber : pengolahan data Laporan Keuangan PT. Sepatu Bata Tbk periode 2009 – 2016

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa tingkat persediaan dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 24.36% dari Rp 153.761.143 menjadi Rp 191.217.901. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan hanya 1.45% dengan nilai kenaikan Rp 2.779.532. Dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami kenaikan persediaan sebesar 14.36% menjadi Rp 221.854.075. Tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 26.84% menjadi Rp 281.405.718. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan 11.81%. Kemudian pada tahun 2015 nilai persediaan mengalami penurunan sebesar 10.20% dari angka Rp 314.628.156 di tahun 2014 menjadi Rp 282.546.591ribu. Tahun 2016 nilai persediaan

kembali naik yaitu sebesar 15% menjadi Rp 324.917.517.

2. Analisis Tingkat Rentabilitas Ekonomi PT Sepatu Bata Tbk.

Rentabilitas ekonomi menunjukkan perbandingan antara laba usaha dengan total modal yang digunakan untuk menghasilkan laba.

Tabel dibawah ini merupakan nilai rentabilitas ekonomi (sebagai variabel Y) tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 3. Nilai Rentabilitas Ekonomi PT Sepatu Bata Tbk Periode 2009-2016

Thn	Laba Usaha	Total Modal	Nilai Rentabilitas Ekonomi(%)
2009	52,980,646	301,343,895	17.58
2010	60,975,070	331,508,965	18.39
2011	56,615,123	354,480,088	15.97
2012	69,343,398	387,488,486	17.90
2013	44,373,679	394,361,411	11.25
2014	71,246,429	425,597,596	16.74
2015	129,519,446	547,187,208	23.67
2016	42,231,663	557,155,279	7.58

Sumber : Laporan Keuangan PT. Sepatu Bata Tbk periode 2009 – 2016 data diolah

Ditahun 2009 ke 2010 rentabilitas ekonomi PT Sepatu Bata Tbk mengalami kenaikan dari nilai 17.58% menjadi 18.39%. Ditahun 2011 rentabilitas ekonomi PT Sepatu Bata Tbk. mengalami penurunan 13.16% dari tahun sebelumnya, menjadi 15.97%. Ditahun 2012 rentabilitas ekonomi mengalami kenaikan menjadi 17.90%. Tahun 2013 rentabilitas ekonomi PT Sepatu Bata Tbk. mengalami penurunan 37.15% menjadi 11.25%. Kemudian ditahun 2014 rentabilitas ekonomi mengalami kenaikan kembali menjadi 16.74%. Dan ditahun 2015 pun mengalami kenaikan 41.4%, dengan nilai rentabilitas ekonomi menjadi 23.67%. Namun ditahun 2016 mengalami penurunan cukup signifikan yaitu 67.97% dengan nilai rentabilitas ekonomi hanya menjadi 7.58%.

3. Analisis Statistik

Analisis statistik digunakan untuk menunjukkan hubungan variabel independen (x) dengan variabel dependen (y), yaitu dengan menggunakan regresi linier sederhana. Untuk mengetahui suatu persamaan regresi yang dihasilkan baik digunakan uji koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi, dan uji T.

a. Analisa Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat persediaan terhadap rentabilitas ekonomi PT Sepatu Bata Tbk perlu adanya perhitungan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX.$$

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh mengenai hasil perhitungan tingkat persediaan dan rentabilitas ekonomi tahun 2009 sampai

dengan tahun 2016 yang dianalisis dengan menggunakan program SPSS 21.0 menghasilkan persamaan regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 4, Hasil Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients (Beta)	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	18.721	2.488		7.525	.001
persediaan	-.234	.148	-.578	-1.585	.174

a. Dependent Variable: rentabilitas

Jadi, rumus persamaannya yaitu :

$$Y = 18.72 - 0.23 X$$

Jadi, jika variabel X bernilai 0 maka nilai variabel Y adalah 18.72. Dari hasil analisis regresi sederhana diatas dapat diketahui bahwa nilai konstanta (α) sebesar 18,72 dan nilai koefisien regresi (β) sebesar -0,23 maka didapat persamaan regresi linear yaitu $Y = 18,72 - 0,23X$ adapun interpretasi dari persamaan diatas adalah :

1) $\alpha = 18,72$

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada perubahan jumlah persediaan ($X=0$), maka tingkat rentabilitas yang terbentuk adalah sebesar 18,72.

2) $\beta = -0,23$

Koefisien regresi X sebesar -0,23 menyatakan bahwa apabila setiap variabel persediaan meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat rentabilitas menurun sebesar 0.23

b. Analisis Koefisien Kolerasi Product Moment

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa koefisien korelasi (r) dengan rumus metode least square yaitu teknik analisa data untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel X (tingkat persediaan) terhadap variabel Y (rentabilitas ekonomi). Untuk dapat menghitung korelasi, maka penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 21.0 dengan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Korelasi

		Correlations	
		persediaan	rentabilitas
Persediaan	Pearson Correlation	1	-.578
	Sig. (2-tailed)		.174
	N	7	7
Rentabilitas	Pearson Correlation	-.578	1
	Sig. (2-tailed)	.174	

Correlations

		persediaan	rentabilitas
Persediaan	Pearson Correlation	1	-.578
	Sig. (2-tailed)		.174
	N	7	7
Rentabilitas	Pearson Correlation	-.578	1
	Sig. (2-tailed)	.174	
	N	7	7

Sumber : pengolahan data Laporan Keuangan PT. Sepatu Bata Tbk periode 2009 – 2016

Dari hasil analisis diatas kolerasi diatas diketahui bahwa hubungan negatif antara tingkat persediaan (variabel X) dengan rentabilitas ekonomi (variabel Y) dengan nilai koefisien kolerasi (r) sebesar -0,578 artinya semakin bertambah tingkat persediaan maka akan dibarengi dengan penurunan jumlah rentabilitas perusahaan. Kemudian dengan nilai kolerasi sebesar -0,578 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kolerasi antara persediaan terhadap rentabilitas adalah cukup kuat.

c. Uji Determinasi (Koefisien Determinasi)

Uji determinasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat persediaan terhadap rentabilitas ekonomi dalam bentuk persentase. Untuk mencari koefisien determinasi maka penulis mengolah data dengan menggunakan program SPSS 21.0 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.578 ^a	.334	.201

a. Predictors: (Constant), persediaan

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat persediaan hanya berpengaruh sebesar 33.4% terhadap rentabilitas ekonomi, sementara sisanya yaitu 66,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

d. Uji Hipotesis (Uji T)

Untuk menentukan atau menyimpulkan hasil penelitian, maka perlu diuji terlebih dahulu apakah r (koefisien korelasi) yang telah dilakukan diatas berarti atau tidak. Untuk menguji apakah koefisien korelasi (r) signifikan atau tidak, maka dilakukan pengujian melalui uji t dengan menggunakan program SPSS 21.0 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Statistik
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	18.721	2.488			7.525	.001
persediaan	-.234	.148	-.578		-1.585	.174

a. Dependent Variable: rentabilitas

Dari hasil analisis diatas, maka dapat diketahui nilai t_{hitung} adalah sebesar -1,585 kemudian untuk menentukan uji hipotesisnya perlu dicari nilai t_{tabel} menggunakan tabel T, untuk dapat mencari nilai t_{tabel} maka perlu diketahui dahulu nilai signifikan α dan nilai derajat bebas atau *degree of freedom* (DF). Dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut:

Derajat bebas (DF) = $n - 2$

$$(DF) = 7 - 2 = 5$$

Tingkat kepercayaan = 95%

$$\alpha = 1 - 95\%$$

Dari taraf signifikan dan derajat bebas yang telah diketahui, maka dapat ditentukan nilai t_{tabel} pada tabel T dalam penelitian ini adalah pada kolom signifikan 0,05 dan baris ke-5 yaitu 2,015. Berdasarkan hasil analisis uji t diatas, dapat diketahui nilai t_{hitung} sebesar -1,585 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,015 ini menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$) yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat persediaan terhadap rentabilitas pada PT Sepatu Bata Tbk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat persediaan terhadap rentabilitas pada PT Sepatu Bata Tbk. maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 18.72 dan nilai koefisien regresi (b) -0.23 maka rumus persamaan regresi sederhana yaitu $Y = 18.72 - 0.23X$ yang artinya apabila tidak ada nilai tingkat persediaan ($X=0$) maka nilai rentabilitas ekonomi adalah 18.72. Hasil koefisien korelasi parsial dengan nilai -0.578 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif atau berlawanan antara tingkat persediaan dan rentabilitas ekonomi. Yang artinya bahwa semakin bertambah nilai tingkat persediaan maka semakin berkurang nilai rentabilitas ekonomi. Kemudian nilai 0.578 dapat diketahui bahwa tingkat hubungan kedua variabel yaitu tingkat persediaan terhadap rentabilitas ekonomi pada PT Sepatu Bata Tbk. memiliki hubungan yang cukup kuat. Hasil koefisien determinasi menunjukkan hasil sebesar 33.4% yang artinya tingkat persediaan memiliki pengaruh

sebesar 33.4% terhadap rentabilitas ekonomi. Sedangkan sisanya yaitu 66.6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -1.585 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.015 yang berarti bahwa t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($t_{hitung} \leq t_{tabel}$) yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat persediaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rentabilitas ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu Bagi perusahaan, hendaknya mengatur dan memaksimalkan lagi persediaan yang ada sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal terhadap perusahaan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan objek penelitian yang berbeda, dan dengan variasi variabel independen (x) yang lain sehingga dapat diperoleh hasil yang positif dan signifikan.

REFERENSI

- Adawia, Popon Rabia, A. azizah dan A. (2018). Akuntansi Persediaan Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Indo-Sino Agrochemical. *PERSPEKTIF*, XVI(1 Sptember 2018), 196.
- Hanafi, M. M. (2010). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hery. (2015). *Laporan Analisa Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Centre of Academic Publisihing Service).
- Riyanto, B. (2016). *Dasar-Dasar Pembelanjaan* (Keempat). Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratminingsih. (2018). Pengaruh perputaran piutang, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap Profitabilitas. *AKADEMIKA*, 60-61.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian untuk Tesis dan Skripsi Bisnis* (7th ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PROFIL PENULIS

Popon Rabia Adawia, Penulis 1, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Akuntansi, STIE YAI Jakarta dan gelar S2 dari program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Saat ini menjadi Dosen Luar Biasa di UBSI Jakarta.

Ayu Azizah, Penulis 2, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, lulus 2010. Gelar S2 Magister Manajemen (MM) Universitas BSI Bandung. Saat ini menjadi Dosen Luar Biasa di UBSI Bandung.

Analisis Jumlah Wajib Pajak Pph OP Yang Tidak Menyampaikan SPT Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit

Dede Suleman

Universitas Bina Sarana Informatika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dede.dln@bsi.ac.id

(Suleman, 2019a)

Suleman, D. (2019a). Analisis Jumlah Wajib Pajak Pph OP Yang Tidak Menyampaikan SPT Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Moneter*, 6(2), 173–178.

Abstract - Tax is a mandatory contribution to the state one of which is a personal income tax which is one of the most potential tax revenues. In this study, it will give an idea of how the percentage of taxpayers who did not submit a tax return compared to the percentage of income tax income Op. The place of research in this study is the Jakarta Duren Sawit Tax Office. The results show that the number of taxpayers who do not send annual tax returns declined in 2017 to only 9.4% of taxpayers who did not send tax returns, this shows that taxpayers began to realize to submit their tax returns every year. The amount of tax revenue from personal income tax turned out to show the results that each year has increased especially in 2017 compared to 2016 which experienced an increase of 72% and the largest income occurred in 2017 at 89% of the target set.

Keywords: PPh OP, Target, penerimaan pajak, SPT

PENDAHULUAN

Pendapatan negara salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dan badan.

Upaya untuk tercapainya penerimaan pajak diharapkan kepada seluruh Wajib Pajak dapat menunaikan kewajiban sebagai warga negara dengan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) yang dilandasi kejujuran dan menyampaikannya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karena masalah kepatuhan wajib pajak termasuk masalah yang penting agar bisa ikut berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Saat Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang dan tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Melihat dari data didapati bahwa tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak khususnya pada KPP Pratama

Jakarta Duren Sawit tidak sepenuhnya wajib pajak patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya, padahal dengan jumlah Wajib Pajak yang patuh akan mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya dan dapat meningkatkan target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Ketidakpatuhan biasanya timbul apabila Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang memadai sehingga Wajib Pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau para Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar, seperti tidak membayar dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku (Mulyanti, D. & Sugiharty, 2016)

Pemerintah telah melakukan reformasi pada undang-undang perpajakan. Terutama pada pajak penghasilan itu sendiri yang telah mengalami reformasi undang-undang mulai dari tahun 1084 dan tahun 2000 dan yang terakhir pada tahun 2008. Reformasi ini dilakukan untuk mempermudah dan menyederhanakan perhitungan pajak dan pembebanan pajak yang dikondisikan dengan Wajib pajak. Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan

pemerintah dalam hal perumusan dan pembuatan aturan dan Undang-Undang dan penyempurnaan administrasi perpajakan yang memudahkan

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tanggungjawab warga negara sebagai Wajib Pajak, yang punya kewajiban dalam hal membayar dan melaporkan pajak harus secara akurat dan tepat waktu agar Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

Semakin besar kesadaran Wajib Pajak tentang pentingnya kepatuhan perpajakan, maka akan semakin besar pula penerimaan pajak yang akan diperoleh oleh negara. Jika penerimaan negara meningkat, maka kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pun juga akan meningkat.

Sehingga dalam penelitian ini ingin mengetahui berapa prosentase Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT nya dengan selisih dari target penerimaan Pajak. Dengan data jumlah SPT tahunan penerimaan pajak orang pribadi periode tahun 2013-2017.

1. Pengertian Pajak

Pajak (Inggris, Tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu (masdiasmi,2011)

(Rahayu, 2017), "Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara". Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari Target penerimaan pajak tercapai.

- Tingkat kepatuhan pajak tinggi.
- Tax ratio tinggi.
- Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan
- jumlah masyarakat usia produktif.
- Jumlah tagihan pajak rendah.
- Tingkat pelanggaran rendah.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (waluyo dalam (Suleman, 2018)

Menurut (Resmi, dalam (Suleman, 2019b)) ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak :

- Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Pajak di pungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayaan public investment.

Ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut menurut Suandy dalam (Suleman, 2019b):

- Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
- Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dan dipergunakan untuk membiayai public investment.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

Fungsi pajak menurut (Diana dalam (Suleman, 2019b)) memiliki dua fungsi utama, diantaranya :

- Fungsi penerimaan (*budgeter*) Yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan membiayai pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan Negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara
- Fungsi Mengatur (*regulerend*) Sebagai fungsi alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).

Menurut (masdiasmo, 2016) Jenis Pajak Jenis Pajak

a. Pajak Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung (Direct Tax) Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada Wajib Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, Surat Ketetapan Pajak (SKP) memuat berapa besar pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si Wajib Pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak yang tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 - 2) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak hanya jika Wajib Pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini bisa dikenakan, jika ada Wajib Pajak yang melakukan penjualan barang mewah.
- b. Pajak Menurut Sifatnya
- 1) Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), di mana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan.
 - 2) Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya. Contoh: Pajak Kekayaan, Bea Masuk, Bea Meterai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.
- c. Pajak Menurut Pemungutannya
- 1) Pajak Negara (Pusat) Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai
 - 2) Pajak Daerah (Lokal) Pajak Daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contoh: Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.

Pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja menurut (Rahayu, 2017).

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2. Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut (Rahayu, 2017), “Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan Perpajakan yang berlaku, sedangkan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

- a. Kepatuhan pajak formal adalah Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi Ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
 - 1) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
 - 2) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terhutang.
 - 3) Tepat waktu dalam melaporkan pajak.
- b. Kepatuhan Perpajakan Material adalah Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
 - 1) Tepat dalam menghitung pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - 2) Tepat dalam memperhitungkan pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - 3) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara. Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, dan prosedur perpajakan yang baik pula.
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak

- kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharapkan imbalan secara langsung.
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan adalah kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyeludupkan pajak. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu pelaksanaan pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.
 - d. Kualitas pemeriksaan pajak dimana kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksa dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas merupakan ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun akan bertambah.
 - e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan ialah disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
 - f. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak dimana kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut (masdiasmo, 2016)

SPT memiliki beberapa fungsi menurut (Negara, 2017) sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana melaporkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.

- b. Sebagai laporan tentang pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Sebagai laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pemungut pajak orang pribadi atau badan lain. Merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang.

Secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi yaitu: Surat Pemberitahuan (SPT) masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau bagian dalam 1 (satu) tahun dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Menurut (masdiasmo, 2016) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, Jakarta Timur, Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wawasan keilmuan sebagai Data yang diolah adalah tahun 2015 -2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan akan diterangkan perbandingan data dari tahun ke tahun untuk Total Wajib pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) (yang menyampaikan SPT dan yang tidak menyampaikan) serta Target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren sawit.

1. WP Tidak Penyampaian SPT PPh OP

Tabel 1 Daftar WP Tidak Penyampaian SPT PPh OP Tahun 2015-2017 (Jiwa)

Tahun	Terdaftar	Tidak	Prosentase
		Menyampaikan	
2015	80.099	25.645	32%
2016	86.651	22.873	26.4%

2017	86.067	8.056	9.4%
------	--------	-------	------

Sumber: Hasil olah data 2019

Menyusun tabel analisis Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT PPh OP yaitu dengan metode perbandingan antara WP Tidak menyampaikan dan WP terdaftar pada tahun 2015-2017, Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{WP PPh OP Tidak Menyampaikan}}{\text{WP PPh OP Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{25.645}{80.099} \times 100\% = 32\%$$

Pada tahun 2015, prosentase Wajib Pajak PPh OP yang tidak menyampaikan SPT di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sebesar 32% . Jika dilihat dari data tahun 2015 merupakan tahun yang terbesar WP PPh OP tidak menyampaikan SPT.

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{WP PPh OP Tidak Menyampaikan}}{\text{WP PPh OP Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{22.873}{86.651} \times 100\% = 26.4\%$$

Pada tahun 2016, prosentase Wajib Pajak PPh OP yang tidak menyampaikan SPT di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit hanya sebesar 9,4% turun drastic dari 2 tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 ada selisih 2.772 jiwa Wajib Pajak PPh OP yang menyampaikan SPT atau sama dengan prosentase selisih 5,6%

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{WP PPh OP Tidak Menyampaikan}}{\text{WP PPh OP Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{8.056}{86.067} \times 100\% = 9.4\%$$

Pada tahun 2017, prosentase Wajib Pajak PPh OP yang tidak menyampaikan SPT di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sebesar 26.4%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 ada selisih 14.817 jiwa Wajib Pajak PPh OP yang menyampaikan SPT bisa dikatakan meningkat WP yang menyampaikan SPT sebesar 17% dari tahun 2016.

2. Data WP PPh OP Tidak Menyampaikan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Tabel 2. Target dan Penerimaan PPh Op

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Prosentase (%)
2015	318.869.596.946	271.294.523.643	85%
2016	611.956.572.906	498.234.262.011	81%
2017	768.869.404.940	688.035.703.646	89%

Sumber: Hasil olah data 2019

Dapat Disimpulkan dari Tabel 2 bahwa target dan realisasi penerimaan pajak PPh OP di KPP pratama Jakarta Duren Sawit setiap tahun tidak mencapai

target penerimaan yang telah ditetapkan karena prosentase realisasi hanya menunjukkan angka sekitar 89% persen yang tertinggi di tahun 2017

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{271.294.523.643}{318.869.596.946} \times 100\% = 85\%$$

Pada tahun 2015 Target penerimaan terhadap Realisasi penerimaan pajak PPh Op hanya mencapai 85% dari target yang di tetapkan.

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{498.234.262.011}{611.956.572.906} \times 100 = 81\%$$

Pada tahun 2016 Target penerimaan terhadap Realisasi penerimaan pajak PPh Op hanya mencapai 81% dari target yang di tetapkan. Namun jika di lihat jumlah nya dengan 2015 penerimaan meningkat jumlah nya sebesar 54% .

$$\text{Tahun 2017} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{688.035.703.646}{768.869.404.940} \times 100 = 89\%$$

Pada tahun 2017 Target penerimaan terhadap Realisasi penerimaan pajak PPh Op hanya mencapai 89% dari target yang di tetapkan ini merupakan angka prosentase tertinggi selama periode 3 tahun . Namun jika di lihat jumlah nya dengan 2016 penerimaan meningkat jumlah nya sebesar 72% .

KESIMPULAN

Wajib Pajak PPh OP yang menyampaikan SPT tidak tahun nya mengalami penurunan prosentase dan jumlah artinya bahwa setiap tahun masyarakat mulai sadar untuk melaporkan SPT PPh OP. Penurunan ini sangat drastis tiap tahunnya dan sampai 2016 hanya sekitar 9.4% saja yang tidak menyampaikan selebih nya menyampaikan SPT nya .

Penerimaan PPh OP tiap tahunnya memang tidak bisa mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan namun bisa dikatakan bahwa jumlah kenaikan penerimaan pajak PPh OP mengalami peningkatan

prosentase lebih dari 54% dari tahun 2015 ke 2016 dan juga sampai 72% dari tahun 2016 ke 2017.

REFERENSI

- Masdiasmo. (2011). *Perpajakan 2011*. Yogyakarta: CV.ANDI.
- masdiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV.ANDI.
- Mulyanti, D., & Sugiharty, F. S. (2016). Efektifitas wpop dan tingkat kepatuhan menyampaikan spt terhadap penerimaan pajak penghasilan. *Ecodemica, IV(2),(IV(2),)*, pp, 250–258.
- Negara, T. A. S. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Malang: Setara Press.
- Rahayu, siti kurnia. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Suleman, D. (2018). Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. *Moneter, Volume 5(No.2 Oktober 2018)*, pp. 1–6.
- Suleman, D. (2019a). Analisis Jumlah Wajib Pajak Pph OP Yang Tidak Menyampaikan SPT Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Moneter, 6(2)*, 173–178.
- Suleman, D. (2019b). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter, 6(1)(1 April 2019)*, pp. 7–12.
- waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia 2011*. Jakarta: Salemba Empat

PROFIL PENULIS



Dede Suleman adalah Doktor (c) Manajemen Marketing dari Universitas Mercubuana, Jakarta. Gelar Sarjana didapat dari dari Universitas Azzahra, jurusan Ekonomi, dan gelar Magister dari Universitas BSI Bandung.

Dede Suleman mengawali karier sebagai profesional di bidang ekspor dan import, kemudian sejak 2007 mulai menggeluti usaha di bidang Restaurant dengan mendirikan merk My Bento yang merupakan restaurant jaringan yang menyajikan menu makanan jepang siap saji. Saat ini menjabat sebagai *Business Expansion Director*. Dede Suleman juga berkarier sebagai Dosen tetap di Universitas Bina Sarana Informatika sejak Tahun 2011 banyak kontribusinya pada penulisan dalam skala nasional maupun Internasional berreputasi dengan tema penelitiannya ditema operasional waralaba ,manajemen keuangan, pemasaran dan perilaku konsumen, e-business, e-marketing dan e-commerce dan marketing 4.0

Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016

Novira Sartika¹, Adrian Irnanda Pratama²

¹ Politeknik Negeri Bengkalis
e-mail: novirasartika@polbeng.ac.id

² Politeknik Negeri Bengkalis
e-mail: adrianirnandapratama@polbeng.ac.id

(Sartika & Pratama, 2019)

Sartika, N., & Pratama, A. I. (2019). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 - 2016. *Moneter*, 6(2), 179–188.

Abstract - This study aims to determine the financial performance of the Siak Regency Government for the 2012-2016 fiscal year measured by financial ratio analysis. This research method is quantitative descriptive. The data are secondary data in the form of Budget Realization Report (LRA) for the 2012-2016 fiscal year. The analysis shows that the financial performance of the Siak Regency Government measured by ratio of regional financial independence shows very low with an average ratio of 9.83%. Furthermore, if measured by ratio of regional financial efficiency shows efficient with an average ratio of 67.51%. Then when measured by ratio of the effectiveness of Own-Source Revenue (PAD) shows effective with an average ratio of 112.51%. When observed by growth ratio shows fluctuation condition. The Last, measured from the equivalent ratio, especially the ratio of operating expenditure show average ration 64.95% and capital expenditure 31.53%. We conclude that the financial performance of the Siak Regency Government is efficient in terms of spending expenses to obtain revenue with the realization revenue received by government and effective in order to increase revenue of Own-Source Revenue (PAD) to self-financing for government program due to society tend to pay tax and retribution. Beside that the government should maintain success from year to year and focus more on capital expenditure budgeting than operating expenditure budgeting.

Keywords: Analysis of Financial Ratios, Performance

PENDAHULUAN

Definisi Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Tujuan utama dari Pemerintahan Daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dalam hal pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infra-struktur, dan penyediaan

barang kebutuhan publik misalnya penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di era reformasi yang dimulai pada 1 Januari 2001 telah memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Sistem Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dan dari Sistem Akuntansi Single Entry dan Cash Basis menjadi Sistem Akuntansi Double Entry dan Accrual Basis. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkat-kan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Laporan keuangan Pemerintahan Daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama dari laporan keuangan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Analisis kinerja keuangan daerah merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan atas pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan Pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya Pemerintah Daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya (Sularso dan Restianto, 2011). Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Siak tahun anggaran 2012-2016 yang diukur melalui analisis rasio keuangan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

1. Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan

menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013). Kinerja keuangan daerah merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan daerah. Salah satu alat untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

2. Analisis Rasio Keuangan

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{(\text{Pendapatan Transfer})} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan

kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan Tabel.1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Kemampuan Daerah dan Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Oppier, 2013

- Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim, 2007). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{(Realisasi Belanja Daerah)}}{\text{(Realisasi Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Keuangan daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
>100%	Tidak efisien
100%	Efisien berimbang
<100%	Efisien

Sumber: Mahsun, 2012

5. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{(Realisasi PAD)}}{\text{(Anggaran PAD)}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efektifitas PAD

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (%)
>100%	Efektif
100%	Efektif berimbang
<100%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2012

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{(P_n - P_0)}{P_0}$$

Keterangan:

- r = Rasio Pertumbuhan
- P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n
- P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum-n)

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

7. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007). Ada 2 (dua) perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90%.

Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operas } i = \frac{\text{(Total Belanja Operasi)}}{\text{(Total Belanja Daerah)}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2010).

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{(Total Belanja Modal)}}{\text{(Total Belanja Daerah)}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan daerah yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010).

Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum-n)

5. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90%. Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang

dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Secara geografis, Kabupaten Siak terletak di antara 1°16'30" LU sampai dengan 0°20'49" LU dan 100°54'21" BT sampai dengan 102°10'59" BT. Luas wilayah Kabupaten Siak adalah 8.556,09 Km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau dan merupakan wilayah terluas ke-6 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Secara administrasi, Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan, yang terdiri 9 kelurahan, dan 114 kampung serta 8 kampung adat. Sebelah utara Kabupaten Siak berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti; sebelah selatan Kabupaten Siak berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru; sebelah timur Kabupaten Siak berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kepulauan Meranti; dan sebelah barat Kabupaten Siak berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2016 sebanyak 453.052 dengan kepadatan penduduk sebesar 53 jiwa/Km² (Kabupaten Siak Dalam Angka Tahun 2017).

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik. Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Siak masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori utama; kategori Pertambangan dan Penggalian menjadi penggerak PDRB terbesar dengan sumbangan di atas 38,85% pada tiga tahun terakhir, disusul oleh kategori Industri Pengolahan dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara kategori-kategori lainnya masih memberikan distribusi terhadap struktur perekonomian Kabupaten Siak rata-rata di bawah 5%, seperti kategori konstruksi, kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta kategori lapangan usaha lainnya yang kontribusinya di bawah satu persen dari total PDRB Kabupaten Siak.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak

Anggaran daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel. 4 di bawah ini.

Tabel. 4 Laporan Realisasi APBD Kabupaten Siak Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun (dalam miliar rupiah)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Daerah	3.833,89	3.752,35	4.453,17	2.849,78	2.453,57
Pendapatan Asli Daerah	346,60	348,62	309,86	357,28	164,33
Pendapatan Transfer	3.487,28	3.403,73	4.143,30	2.492,50	2.289,24
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-
Belanja Daerah	2.071,32	2.285,37	2.647,68	2.690,44	1.686,81
Belanja Operasi	1.328,17	1.481,99	1.641,62	1.577,21	1.267,98
Belanja Modal	743,04	803,33	1.005,35	906,13	252,76
Belanja Tidak Terduga	0,11	0,05	0,71	-	0,17
Transfer/Bagi Hasil Ke Daerah	-	-	-	207,10	165,91
Surplus/Defisit	1.762,57	1.466,97	1.805,49	159,35	766,76
Pembiayaan Daerah	745,69	923,46	912,19	911,51	60,83
Penerimaan Pembiayaan	745,69	923,46	912,19	911,51	60,83
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	2.508,25	2.390,43	2.717,68	1.070,85	827,59

Sumber: Data olahan

Secara garis besar APBD Kabupaten Siak selama periode tahun anggaran 2012-2016 mengalami fluktuasi. Pendapatan daerah Kabupaten Siak tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.4.453.167,51 juta rupiah. Sedangkan untuk belanja daerah tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp.2.690.439,09 juta rupiah. Selanjutnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 2.717.675,14 juta rupiah.

3. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Siak

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun hasil perhitungan dari rasio kemandirian

keuangan daerah Kabupaten Siak dapat di lihat pada Tabel. 5 di bawah ini.

Tabel. 5 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	PAD (dalam juta rupiah)	Pendapatan Transfer (dalam juta rupiah)	RKKD	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2012	346.604,32	3.487.282,37	9,94%	Rendah Sekali	Instruktif
2013	348.618,60	3.403.727,56	10,24%	Rendah Sekali	Instruktif
2014	309.862,79	4.143.304,72	7,48%	Rendah Sekali	Instruktif
2015	357.281,97	2.492.502,60	14,33%	Rendah Sekali	Instruktif
2016	164.325,69	2.289.243,96	7,18%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel. 5 di atas tampak bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Siak tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Siak yaitu sebesar 9,83%. Hal ini berimplikasi bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi) masih sangat tinggi. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah terendah terjadi pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 7,18% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 14,33%.

Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Siak tidak mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang diterima Pemerintah Kabupaten Siak sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah harus lebih giat lagi dalam mengajak dan

menghimbau masyarakatnya untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014), kinerja keuangan daerah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong pola hubungan Instruktif. Menurut Pramono penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini yaitu Kabupaten Siak dan Kota Surakarta masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi penerimaan di daerahnya sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pusat saja.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun hasil perhitungan dari rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel. 6 di bawah ini.

Tabel. 6 Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Belanja Daerah (dalam juta rupiah)	Pendapatan Daerah (dalam juta rupiah)	REKD	Kriteria
2012	2.071.317,02	3.833.886,69	54,03%	Efisien
2013	2.285.374,04	3.752.346,16	60,91%	Efisien
2014	2.647.677,64	4.453.167,51	59,46%	Efisien
2015	2.690.439,09	2.849.784,56	94,41%	Efisien
2016	1.686.810,74	2.453.569,65	68,75%	Efisien

Sumber: Data olahan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel. 6 di atas dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Kabupaten Siak pada tahun 2012 sampai dengan 2016 tergolong efisien yang dilihat dari nilai rasionya berada di bawah 100%. Hal ini dikarenakan total belanja daerahnya yang lebih kecil dibanding total pendapatan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima sudah efisien. Rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Siak tergolong efisien karena rata-rata rasionya sebesar 67,51%. Dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Siak dalam mengelola keuangannya sudah baik dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lazyra (2016), dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2011-2015 jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah hanya efisien pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan tahun lainnya tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan total belanja daerah yang lebih besar dibandingkan total pendapatan daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian ini, dimana rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Siak sudah dikategorikan efisien. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Siak mampu menekan jumlah belanja daerahnya dan menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik.

c. Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). Adapun hasil perhitungan dari rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada Tabel. 7 di bawah ini.

Tabel. 7 Penghitungan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Realisasi PAD (dalam juta rupiah)	Anggaran PAD (dalam juta rupiah)	Efektifitas PAD	Kriteria
2012	346.604,32	226.935,42	152,73%	Efektif
2013	348.618,60	232.490,25	149,95%	Efektif
2014	309.862,79	292.980,84	105,76%	Efektif
2015	357.281,97	344.696,99	103,65%	Efektif
2016	164.325,69	325.644,75	50,46%	Tidak Efektif

Sumber: Data olahan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel. 7 di atas dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Siak pada tahun 2012-2016 hampir semuanya efektif kecuali pada tahun 2016 karena nilai rasionya berada di bawah 100% yaitu 50,46%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD sudah dikatakan cukup baik dan sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah Kabupaten Siak juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2016. Selain itu, juga dikarenakan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014) pada Kota Surakarta dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta jika

dilihat dari rasio efektivitas PAD pada tahun 2010 yang berstatus efektif berubah menjadi sangat efektif pada tahun 2011. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak hampir seluruhnya sudah efektif kecuali tahun 2016. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Akan tetapi masing-masing daerah diharapkan untuk tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Adapun hasil perhitungan dari Pertumbuhan dapat di lihat pada Tabel. 8 di bawah ini.

Tabel. 8 Penghitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Daerah	3.833.886,69	3.752.346,16	4.453.167,51	2.849.784,56	2.453.569,65
Pertumbuhan Pendapatan Daerah	-	-2,13%	18,68%	-36,01%	-13,90%
PAD	346.604,32	348.618,60	309.862,79	357.281,97	164.325,69
Pertumbuhan PAD	-	0,58%	-11,12%	15,30%	-54,01%
Belanja Modal	743.038,84	803.328,62	1.005.348,20	906.133,67	252.760,59
Pertumbuhan Belanja Modal	-	8,11%	25,15%	-9,87%	-72,11%
Belanja Operasi	1.328.166,76	1.481.991,58	1.641.624,16	1.577.209,39	1.267.977,32
Pertumbuhan Belanja Operasi	-	11,58%	10,77%	-3,92%	-19,61%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel. 8 di atas dapat dilihat bahwa selama periode tahun anggaran 2012-2016 semua rasio mengalami fluktuasi. Pertumbuhan pendapatan daerah pada periode tahun anggaran 2012-2016 hanya pada tahun 2014 memiliki trend positive yaitu sebesar 18,68%. Kemudian, pertumbuhan PAD hanya pada tahun 2013 dan 2015 memiliki pertumbuhan positif. Selanjutnya, pada pos belanja modal hanya pada tahun 2013 dan 2014 yang tumbuh positif sedangkan 2015 dan 2016

cenderung negatif. Terakhir, untuk pertumbuhan belanja operasional kondisinya sama dengan pertumbuhan belanja modal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerahnya selalu mengalami perkembangan secara positif karena selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan yang terjadi pada penelitian di Kabupaten Siak, dimana rasionya selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Siak perlu meniru kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

e. Rasio Kecerassian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal. Hasil dari perhitungan rasio belanja operasi dapat dilihat pada Tabel. 9 di bawah ini.

Tabel. 9 Penghitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2012	1.328.166,76	2.071.317,02	64,12%
2013	1.481.991,58	2.285.374,04	64,85%
2014	1.641.624,16	2.647.677,64	62,00%
2015	1.577.209,39	2.690.439,09	58,62%
2016	1.267.977,32	1.686.810,74	75,17%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel. 9 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi Kabupaten Siak yaitu sebesar 64,95%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 75,17% sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 58,62%. Untuk hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal dapat dilihat pada Tabel. 10 berikut ini.

Tabel. 10 Penghitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2012	743.038,84	2.071.317,02	35,87%
2013	803.328,62	2.285.374,04	35,15%
2014	1.005.348,20	2.647.677,64	37,97%
2015	906.133,67	2.690.439,09	33,68%
2016	252.760,59	1.686.810,74	14,98%

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel. 10 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Siak sebesar 31,53%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 37,97% sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 14,98%.

Menurut perhitungan di atas, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah Kabupaten Siak lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Siak kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2014) di Kabupaten Klaten, alokasi belanja operasinya lebih besar dibandingkan dengan belanja modalnya. Hal tersebut sama dengan penelitian ini, alokasi Belanja Operasi Kabupaten Siak juga lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modalnya. hal itu hampir sama dengan apa yang terjadi di sebagian besar kabupaten di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak sudah cukup efisien dalam hal pengeluaran biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima dan sudah cukup efisien dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan penerimaan PAD untuk membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak dan retribusi daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kemampuannya dalam memper-tahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya guna mengevaluasi potensi-potensi daerah yang ada serta lebih menitikberatkan anggaran belanja modal yang merupakan sumber pelayanan kepada masyarakat dibanding anggaran belanja operasi yang merupakan belanja rutin kegiatan pemerintahan.

REFERENSI

- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008- 2012. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Havid Sularso, Y. E. R. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2 Agustus 2011, 1*(483), 211–212. <https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a>
- Kabupaten, B. P. S. K. S. (2017). Kabupaten Siak Dalam Angka 2017. In *Siak Dalam Angka* (Vol. 2017). SIak. <https://siakkab.bps.go.id>.
- Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota medan. *Skripsi Program Studi Akuntansi, 1*–63.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan: Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Oppier, Hermi. (2013). “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”. *Jurnal Benchmark Volume 2* November 2013.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti, 7*, 83–112.
- Undang-undang no 23. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia, 460*. Retrieved from <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

PROFIL PENULIS

NOVIRA SARTIKA lahir di Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 22 November 1989. Saat ini menjadi dosen di Politeknik Negeri Bengkalis pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Jurusan Administrasi Niaga.

ADRIAN IRNANDA PRATAMA lahir di Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau pada tanggal 17 November 1989. Saat ini menjadi dosen di Politeknik Negeri Bengkalis pada Program Studi Administrasi Bisnis Internasional Jurusan Administrasi Niaga.